

[www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)  
tentrem\*marem\* gandum



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dengan baik dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, merupakan masa transisi tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018 dan awal periode RPJMD 2018-2023. Sebagai bahan evaluasi untuk program kerja yang belum tercapai akan selalu kita perbaiki dan program kerja yang sudah berjalan akan terus ditingkatkan.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan tahun ke lima media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Clean Governmen* dan *Good Governnance*. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government), sehingga pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah terukur dengan target tahun 2018 sebagaimana telah di reviu sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD 2013-2018.

Secara umum laporan kinerja tahun 2018 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini semoga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

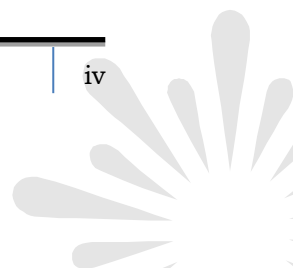
Temanggung, Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG

H.M AL KHADZIQ

## DAFTAR ISI

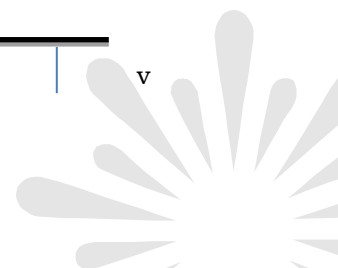
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN REVIEW	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Daerah.....	1
B. Aspek Strategis .....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	9
D. Kepegawaian .....	12
E. Capaian Reformasi Birokrasi .....	16
F. Isu Strategis .....	17
G. Sistematika Penyusunan .....	18
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA .....	<b>19</b>
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 .....	19
B. Indikator Kinerja Utama .....	24
C. Rencana Kinerja Tahunan .....	26
D. Perjanjian Kinerja .....	27
E. Instrumen pendukung Pengukuran Kinerja .....	31
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 .....	<b>33</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	33
B. Capaian Kinerja sasaran .....	35
C. Realisasi Anggaran .....	139
<b>BAB IV</b> PENUTUP .....	<b>146</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Temanggung .....	2
Gambar 1.2	Sistem Penilaian PMPRB .....	16
Gambar 2.1	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	27
Gambar 2.2	Sistem Perencanaan Daerah .....	31
Gambar 2.3	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	31
Gambar 2.4	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	32
Gambar 2.5	SAKIP Kabupaten Temanggung .....	32
Gambar 3.1	Tanam Perdana Bawang Putih di Tanggulanom Selopampang bersama Kementrian Pertanian.....	39
Gambar 3.2	Fasilitasi Perawatan Pasca Panen Pengering Hibryd Hasil Produksi Pertanian....	40
Gambar 3.3	Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Melakukan Cek Harga Tembakau .....	41
Gambar 3.4	Bupati Temanggung dan Kepala Dintanpangan diantara Tembakau Varietas baru Kemloko 4.....	42
Gambar 3.5	Alat Mesin Pertanian Hand Traktor .....	43
Gambar 3.6	Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani.....	43
Gambar 3.7	Pelatihan rice transplanter.....	44
Gambar 3.8	Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim .....	44
Gambar 3.9	Piagam Penghargaan Kelompok Tani Tingkat Provinsi Jawa Tengah .....	45
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah.....	46
Gambar 3.11	Piagam Penghargaan Adhykarya Pangan Nusantara .....	56
Gambar 3.12	Temu Usaha .....	60
Gambar 3.13	Pencanangan By The Way.....	61
Gambar 3.14	Curug Guwung .....	66
Gambar 3.15	Temanggung Night Carnival.....	67
Gambar 3.16	Desa Wisata Pasar Papringan.....	68
Gambar 3.17	Jobfair Temanggung 2018 .....	71
Gambar 3.18	Pemberian Bantuan Kepada Keluarga PMKS oleh Wakil Bupati Temanggung .....	76
Gambar 3.19	Razia Pelajar dan Bangunan yang tidak Mempunyai ijin.....	82
Gambar 3.20	Pembangunan jalan Pahlawan .....	84
Gambar 3.21	Kondisi jalan Tahun 2018 Kabupaten Temanggung .....	85
Gambar 3.22	Jembatan Seroyo .....	89
Gambar 3.23	Progo Pistan Kecamatan Jumo .....	91

Gambar 3.24	Bendung Tingal Kecamatan Kaloran .....	91
Gambar 3.25	Pembongkaran RTLH .....	92
Gambar 3.26	Taman Pengayoman .....	94
Gambar 3.27	Penerimaan Adipura Tahun 2018 .....	96
Gambar 3.28	Taman Pancasila .....	97
Gambar 3.29	Kegiatan Kelompok Belajar .....	102
Gambar 3.30	Pencairan BSM di UPTD Kecamatan Temanggung .....	105
Gambar 3.31	RSUD Kabupaten Temanggung .....	115
Gambar 3.32	Penyerahan Opini WTP .....	127
Gambar 3.33	Aplikasi e – Budgeting .....	129
Gambar 3.34	Website Pemerintah Kabupaten Temanggung .....	130
Gambar 3.35	SMS Gateway .....	128
Gambar 3.36	Lapor SP4N .....	129
Gambar 3.37	Media Sosial .....	129
Gambar 3.38	Kotak Saran Pengaduan .....	129
Gambar 3.39	Pelayanan Perijinan DPMPTSP .....	133
Gambar 3.40	Aplikasi e – Planning Kabupaten Temanggung.....	132
Gambar 3.41	Topologi Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Temanggung .....	138
Gambar 3.42	Penyerahan Piagam Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif .....	139

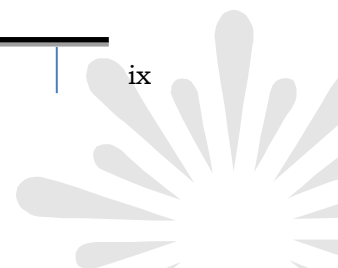


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018 .....	3
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	5
Tabel 1.4	Pemanfaatan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	6
Tabel 1.5	Jumlah, Sebaran, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018 .....	7
Tabel 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	8
Tabel 1.7	Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung .....	15
Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Temanggung.....	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .....	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	28
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	34
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja sasaran .....	35
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran .....	36
Tabel 3.4	Pencapaian Sasaran dan Indikator Misi 1 .....	38
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	38
Tabel 3.6	Jumlah Pengadaan alat mesin pertanian Tahun 2018 .....	42
Tabel 3.7	Peningkatan produktivitas daging tahun 2018 .....	46
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	50
Tabel 3.9	Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 .....	51
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	57
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 .....	61
Tabel 3.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2014-2018 .....	63
Tabel 3.13	Data Direktori Pasar .....	64
Tabel 3.14	Capaian Kinerja sasaran Strategis 5 .....	65
Tabel 3.15	Perkembangan Wisatawan Temanggung Tahun 2013-2018.....	66
Tabel 3.16	Pencapaian Misi II dan Indikator Sasaran Misi II .....	69
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 .....	70

Tabel 3.18	Jumlah Pencari Kerja,Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2018.....	70
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 .....	72
Tabel 3.20	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah 2018 .....	73
Tabel 3.21	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Temanggung Tahun 2013-2018.....	74
Tabel 3.22	Grafik Perkembangan garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	75
Tabel 3.23	Data PMKS Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	77
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.....	79
Tabel 3.25	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 .....	80
Tabel 3.26	Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Misi III .....	83
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 .....	84
Tabel 3.28	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 .....	85
Tabel 3.29	Data Angka Kecelakaan di Kabupaten Temanggung .....	86
Tabel 3.30	Daftar Kejadian Bencana yang Terjadi dan Ditangani Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	87
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran 10 .....	93
Tabel 3.32	Daftar Taman Kota Kabupaten Temanggung Tahun 2018.....	95
Tabel 3.33	Persentase Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 203 – 2018.....	95
Tabel 3.34	Pencapaian Misi dan sasaran misi 4 .....	98
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 .....	98
Tabel 3.36	Rata-rata Lama Sekolah .....	101
Tabel 3.37	Data Pengunjung dan Peminjam Buku.....	104
Tabel 3.38	Pencapaian Sasaran dan Indikator Misi 5 .....	106
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 .....	107
Tabel 3.40	Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung 2013-2018.....	108
Tabel 3.41	Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.....	108
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 .....	110
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 .....	112
Tabel 3.44	Jumlah Pasien yang dilayani menggunakan JKT Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018.....	112

Tabel 3.45	Pencapaian Sasaran dan Indikator Misi 6 .....	116
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 .....	117
Tabel 3.47	Hasil Penilaian SAKIP .....	118
Tabel 3.48	Nilai EKPPD .....	123
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16 .....	126
Tabel 3.50	Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2013 – 2018 .....	128
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 .....	129
Tabel 3.52	Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	132
Tabel 3.53	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 .....	133
Tabel 3.54	Tabel Aplikasi e-Government Kabupaten Temanggung .....	134
Tabel 3.55	Anggaran Belanja , Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Tahun 2018.....	140





# BAB I

## PENDAHULUAN

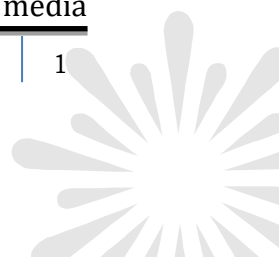
### A. LATAR BELAKANG DAERAH

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018, merupakan pelaksanaan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2018 mempunyai nilai strategis karena dari capaian kinerja di Tahun 2018 dapat dipetakan target yang tercapai dan yang tidak tercapai di akhir periode RPJMD 2013–2018. Tahun 2018 juga merupakan masa transisi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Drs.H.M. Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi, S.Si, M.M.Par ke pasangan HM. Al Khadziq dan Drs. Heri Ibnu Wibowo, dimana pada masa transisi tersebut terjadi beberapa kali pergantian Pejabat Bupati, yaitu Plt. Bupati Temanggung Drs. Suyono, dan Pj. Bupati Temanggung Drs. Sudaryanto, M.Si.

Berdasarkan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah yang telah disusun, dalam menyusun laporan kinerja diperlukan instrumen untuk mengukur keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai sasaran strategis menuju perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media



evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

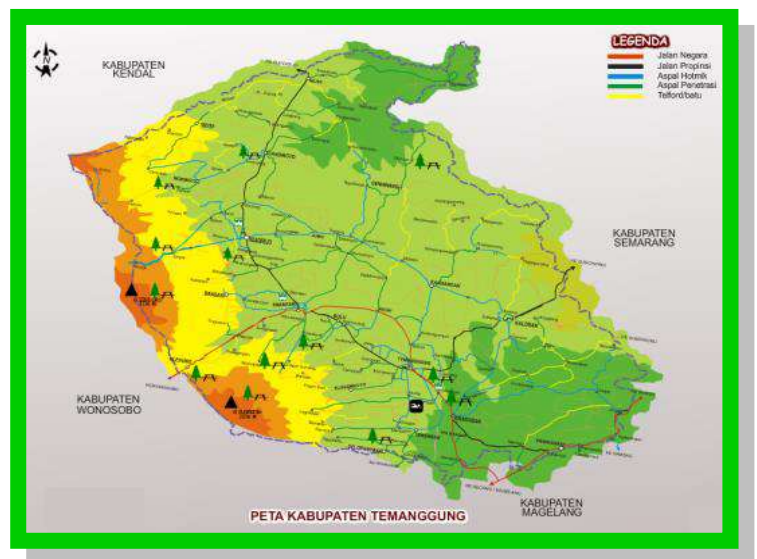
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahun kelima (terakhir) pelaksanaan RPJMD 2013-2018. Penyusunan LKjIP dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

## B. ASPEK STRATEGIS

### 1. ASPEK GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha. Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.354 Dusun, 147 Lingkungan, 1.529 Rukun Warga, dan 5.692 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 1.1 Peta Kab. Temanggung

Tabel 1.1  
**Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2018**

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotro
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

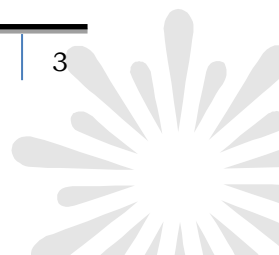
Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari kondisi di atas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan harus memperhatikan kondisi daerah-daerah yang terletak di perbatasan wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan lebih karena harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung terbagi atas 20 Kecamatan, 266 desa dan 23 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2  
 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonoboyo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candirotro	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2



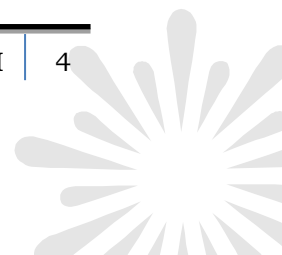
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-
18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018, data diolah

### Kondisi Topografi

Kabupaten Temanggung memiliki topografi yang kompleks dan beranekaragam sesuai dengan tipikal wilayah yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0 % - 70 % (datar sampai dengan sangat curam).

Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, tergambarakan melalui tabel di bawah ini.



Tabel 1.3  
**Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

No	Jenis/Kelas Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datar (0 - 2 %)	968	1,17
2.	Bergelombang (2 - 15 %)	32.492	39,31
3.	Curam (15 - 40 %)	31.232	37,88
4.	Sangat Curam (> 40 %)	17.983	21,64
<b>Jumlah</b>		<b>82.675</b>	<b>100</b>

*Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018*

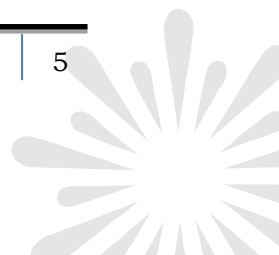
Berdasarkan tabel di atas maka topografi dan kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam dengan persentase terbesar berupa permukaan bergelombang yang mencakup 39,31 % dan terkecil berupa permukaan datar yang hanya 1,17 %.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 -1.450 m dpl, wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro, Gunung Sumbing dan Gunung Prahu yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

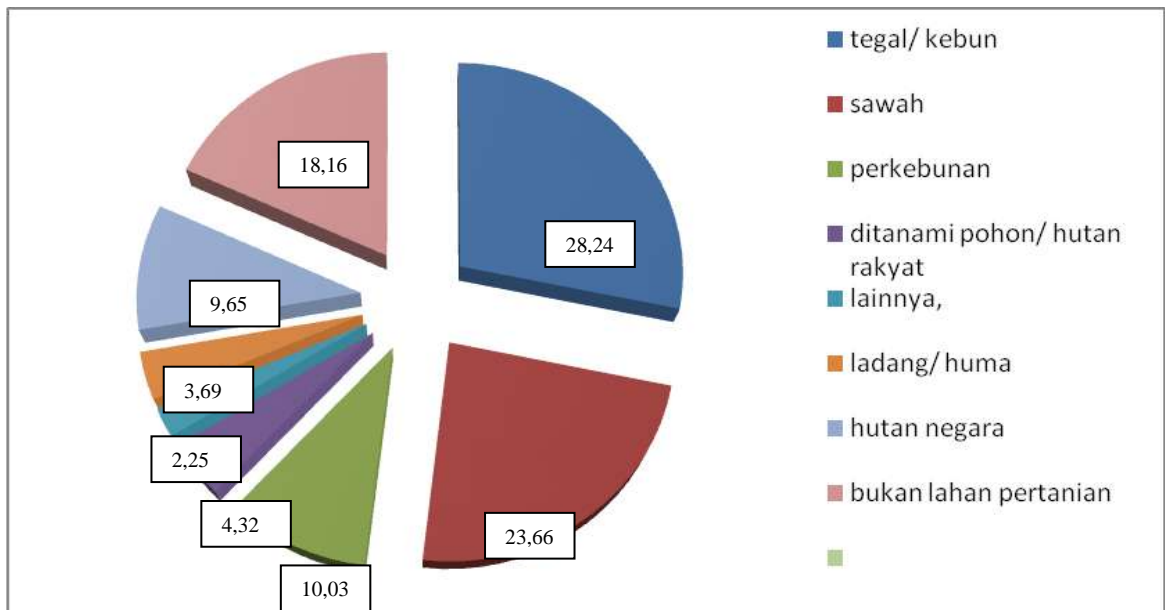
Selanjutnya berdasarkan Tabel 1.3 juga diketahui terdapat perbedaan luasan wilayah Kabupaten Temanggung dari sisi kemiringan lahan dan luasan secara administrasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena metode dan pendekatan penghitungan yang berbeda.

Untuk wilayah dengan kemiringan 0-2 % atau datar hanya sebagian kecil dengan jumlah 1,17 % yang terletak di wilayah Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.

Berdasarkan luas penggunaan lahan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.4  
**Pemanfaatan Lahan Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2017**



Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga sangat tepat jika Bupati dan Wakil bupati terpilih menjadikan Temanggung sebagai daerah agraris sesuai dengan visi misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Beberapa program telah diluncurkan untuk mewujudkan visi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani yang berjumlah 238.857 orang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Temanggung. Selain itu untuk lebih menggali potensi pertanian seperti tembakau dan kopi yang telah terbukti berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

## 2. ASPEK DEMOGRAFI DAERAH

Dalam pengambilan keputusan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tercatat sebanyak 780.148 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 896 jiwa/km<sup>2</sup> dan persebaran penduduk relatif merata. Adapun data

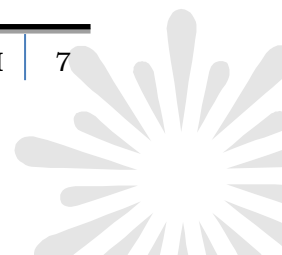
sebaran penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan Tahun 2018 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5  
**Jumlah, Sebaran, dan Kepadatan Penduduk  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Luas wilayah (km)	Kepadatan (jiwa/km)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Bulu	24.574	23.321	47.895	43,04	1.113
2	Tembarak	15.533	14.931	30.464	26,84	1.135
3	Temanggung	40.337	41.290	81.627	33,39	2.445
4	Pringsurat	25.715	25.523	51.238	57,27	895
5	Kaloran	22.580	22.374	44.954	63,92	703
6	Kandangan	25.884	25.334	51.218	78,36	654
7	Kedu	29.328	28.627	57.955	34,96	1.658
8	Parakan	26.561	26.316	52.877	22,23	2.379
9	Ngadirejo	28.019	27.426	55.445	53,31	1.040
10	Jumo	14.985	14.670	29.655	29,32	1.011
11	Tretep	10.757	10.215	20.972	33,65	623
12	Candiroto	16.352	16.320	32.672	59,94	545
13	Kranggan	23.877	24.310	48.187	57,61	836
14	Tlogomulyo	11.560	11.233	22.793	24,84	918
15	Selopampang	9.696	10.231	19.927	17,29	1.153
16	Bansari	12.089	11.792	23.881	22,54	1.059
17	Kledung	14.093	13.510	27.603	32,21	857
18	Bejen	10.706	10.563	21.269	68,84	309
19	Wonoboyo	13.239	12.921	26.160	43,98	595
20	Gemawang	16.971	16.385	33.356	67,11	497
<b>Jumlah Total</b>		<b>392.856</b>	<b>387.292</b>	<b>780.148</b>	<b>870,65</b>	<b>896</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari Tabel di atas pada Tahun 2018 jumlah penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung sebesar 81.627 jiwa dengan kepadatan 2.445 jiwa/km<sup>2</sup> dan paling sedikit di Kecamatan Selopampang sebesar 19.927 jiwa dengan kepadatan 1.153 jiwa/km<sup>2</sup>, namun kepadatan penduduk terkecil adalah



Kecamatan Bejen dengan kepadatan 309 jiwa/km<sup>2</sup> dikarenakan luas wilayah Bejen yang relatif lebih luas daripada wilayah yang lain.

### 3. ASPEK EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6.  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung,  
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional  
Tahun 2013-2017**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2013	5,20	5,14	5,74
2014	5,03	5,42	5,02
2015	5,24	5,4	4,79
2016	4,98	5,27	5,02
2017	4,68	5,27	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah namun hampir berimbang dengan pertumbuhan nasional. Hal itu mengandung arti bahwa Kabupaten Temanggung belum mampu menjadi pusat perekonomian jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah namun hampir setara dengan mayoritas daerah-daerah lain dalam skala nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung di Tahun 2018 diperkirakan berada pada angka 4,80 atau lebih tinggi jika dibandingkan Tahun



2017 yang berada di angka 4,68. Hal ini seiring dengan musim panen Tembakau yang didukung oleh musim, dan panen Tembakau di Tahun 2018 tersebut disertai pula dengan harga yang lebih baik atau tinggi.

### **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan pada akhir Tahun 2016 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2017. Perangkat daerah di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

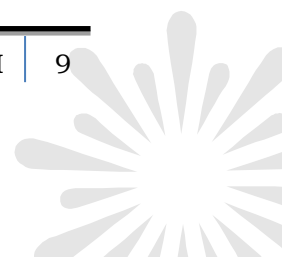
#### **1. SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah.
3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 9 Bagian, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe B;



1. Asisten Pemerintahan, membawahi 3 Bagian, yaitu: Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian, yaitu: Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Asisten Administrasi, membawahi 3 Bagian yaitu: Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan Bagian Hubungan Masyarakat.

## **2. SEKRETARIAT DPRD**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

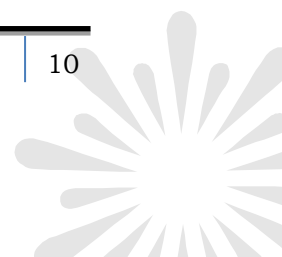
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi rapat-rapat DPRD;
4. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat DPRD, terdiri dari Sekretaris, 3 Bagian, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe B; sekretaris membawahi tiga Bagian, yaitu: Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, Bagian Keuangan, dan Bagian Rapat dan Perundang-Undangan.

## **3. INSPEKTORAT**

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
6. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi (counseling) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
8. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Inspektorat, terdiri dari Inspektur, Sekretariat, 4 Inspektur Pembantu, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe A;

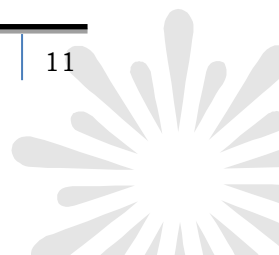
#### **4. DINAS DAERAH**

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya, dengan fungsi sebagai berikut:

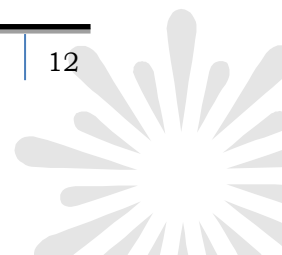
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidangnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Dinas Daerah; terdiri dari 18 Dinas, dengan berbagai Tipe sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakannya, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;



2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;



14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
17. Dinas Pertanian dan Kertahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan.

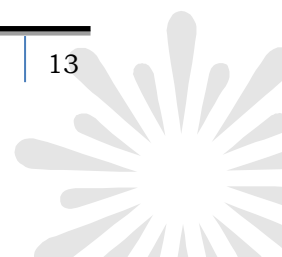
#### **4. BADAN DAERAH**

Badan Daerah, sebagai pelaksana fungsi penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjangnya dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan fungsi penunjangnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi penunjangnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi penunjangnya;
4. pelaksanaan kesekretariatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya;

Badan Daerah, terdiri dari 3 Badan, dengan berbagai Tipe sesuai dengan fungsi penunjang yang dilaksanakannya, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



## 5. KECAMATAN

Kecamatan dipimpin Camat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

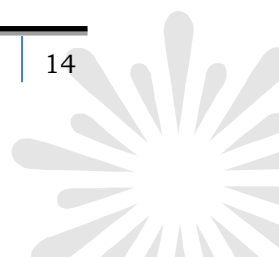
Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan, sedangkan 23 kelurahan yang ada menjadi perangkat kecamatan dan bukan perangkat daerah tersendiri.

Kelurahan tersebut terbagi di 4 Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Temanggung : 19 Kelurahan
- Kecamatan Parakan : 2 Kelurahan
- Kecamatan Ngadirejo : 1 Kelurahan
- Kecamatan Kranggan : 1 Kelurahan

## D. KEPEGAWAIAN

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Tabel 1.7.  
**Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung**

NO	JENIS DATA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I.</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>8.266</b>	<b>7.993</b>	<b>8.156</b>	<b>7.277</b>	<b>7.213</b>	<b>6.778</b>
	1. Golongan I	454	433	418	373	370	338
	2. Golongan II	1.753	1.489	1.519	1.322	1.301	1.128
	3. Golongan III	3.076	3.200	3.485	3.262	3.328	3.245
	4. Golongan IV	2.981	2.871	2.734	2.320	2.214	2.067
<b>II.</b>	<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>	<b>801</b>	<b>779</b>	<b>847</b>	<b>763</b>	<b>784</b>	<b>710</b>
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II	21	22	25	25	30	23
	3. Eselon III	142	141	150	136	156	144
	4. Eselon IV	589	567	620	566	598	543
	5. Eselon V	49	49	52	52	0	0
<b>III.</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>8.266</b>	<b>7.993</b>	<b>8.156</b>	<b>7.277</b>	<b>7.213</b>	<b>6.778</b>
	Laki-Laki	4.050	3.894	3.929	3.438	3.336	3.089
	Perempuan	4.216	4.099	4.227	3.839	3.877	3.689

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2018 merupakan tahun dimana jumlah PNS di kabupaten Temanggung berada di angka terendah dan hal tersebut menjadi pola yaitu semakin turun di tiap tahunnya. Semakin sedikitnya jumlah PNS diakibatkan moratorium pengadaan CPNS yang sudah berlangsung beberapa tahun. Dapat terlihat pula bahwa jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan Tabel 1.7, jumlah pejabat struktural juga naik turun karena pola pembinaan karier terutama yang bersifat pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilakukan setiap saat, baik bagi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) atau Jabatan Eselon III (Jabatan Administrator), atau IV (Jabatan Pengawas).

Jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas) menjadi jabatan terbanyak yang ada yaitu sejumlah 543 (76,48%) pejabat sedangkan PNS yang memiliki golongan III yaitu sejumlah 3.245 (47,88%) menjadi komposisi terbesar PNS di Kabupaten Temanggung.

## E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam form ini penilaian dilaksanakan pada 8 (delapan) area perubahan dengan kriteria penilaian sesuai dengan sistem Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan kegiatan PMPRB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 72,34. Jika dibandingkan dengan penilaian Tahun 2017 yang memperoleh nilai 72,23% telah mengalami kenaikan, apalagi jika dibandingkan Tahun 2016 dimana PMPRB Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 66,68 %.

Untuk target pencapaian PMPRB ini memang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap di Tahun 2019 ini ada peningkatan yang lebih baik mengenai pelaksanaan Refomasi Birokrasi.

PROSES		%	HASIL		%
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	4,24	84,87 %	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KIBERJA ORGANISASI (20)	7,25	36,24 %
PENYATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5	100 %	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI (10)	8,25	82,5 %
PENYATAAN DAN PENGLAUTAN ORGANISASI (5)	3,68	73,6 %	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	7,5	75 %
<b>TOTAL HASIL (40)</b>				<b>23</b>	<b>76,66 %</b>

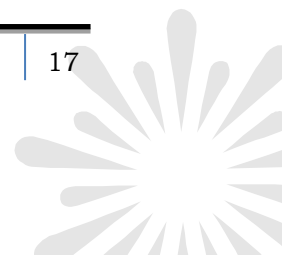
Gambar 1.2. Sistem Penilaian PMPRB



## F. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2013-2018 adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
6. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan lingkungan hidup;
7. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
9. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
10. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
11. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
12. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan system akuntabilitas kinerja pemerintah
13. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan *e-Goverment*;
14. Belum optimalnya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat.



Isu-isu strategis yang merupakan hasil pengelompokan atas identifikasi permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan daerah akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan umum pembangunan daerah dan prioritas dalam menetapkan program kegiatan.

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

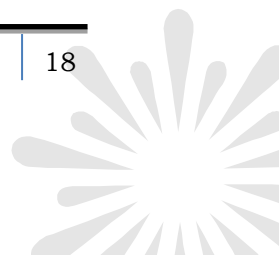
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyusun laporan kinerja Tahun 2018. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Pada akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan reviu RPJMD Kabupaten Temanggung. Selanjutnya hasil reviu dimaksud telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang

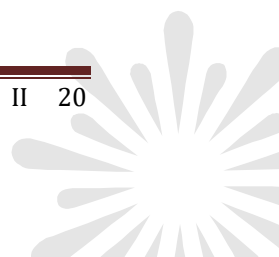
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagai perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi daerah yaitu:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS  
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA,  
DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Penjelasan dari visi sebagai berikut:

1. Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Bermasyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.
3. Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

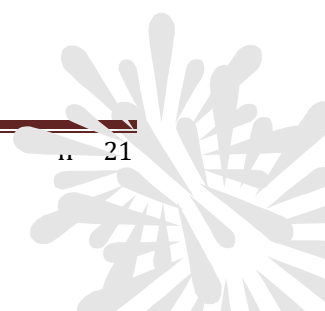


4. Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan agamis. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Guna mewujudkan visi Drs. H. M. Bambang Sukarno (Bupati) dan Irawan Prastiyadi, SE, M.M.Par (Wakil Bupati) telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: “**BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG**”.



Tabel 2.1  
**Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Kabupaten Temanggung**

<b>VISI: TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS  BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA,  DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"</b>				
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Jumlah investasi	Laju investasi
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan
		2.	Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan			Menurunnya angka kriminalitas
<b>No.</b>	<b>Misi</b>			<b>Tujuan</b>

3.	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase minimal bencana yang terselesaikan Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik
		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan sampah perkotaan	Persentase pelayanan sampah perkotaan
4.	Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal	Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
5.	Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
				Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
				Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)
				Angka Harapan Hidup
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>

		Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga a. Keluarga Sejahtera III b. Keluarga Sejahtera III plus Laju pertumbuhan penduduk
		Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
6.	Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Evaluasi kinerja penyeenggaraan pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pengelolaan <i>e-Government</i>	Cakupan Jaringan Sistem Informasi <i>e-Government</i>

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan



Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama
Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Jumlah investasi	Laju investasi
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan
Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya angkapengangguran
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya angka kemiskinan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya angka kriminalitas
Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman
		Persentase minimal bencana yang terselesaikan
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pelayanan sampah perkotaan
Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
		Peresentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
		Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)
		Angka Harapan Hidup
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	a. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III
		b. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III plus
		Laju pertumbuhan penduduk
Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah
Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pengelolaan <i>e-Government</i>	Cakupan Jaringan Sistem Informasi <i>e-Government</i>

### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2018 ada pada Lampiran III.

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah



Gambar 2.1 Penandatanganan Perjanjian kinerja Tahun 2018 secara langsung

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET 2018
1	2	3	4	4
<b>A. Misi Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern Yang Berwawasan Lingkungan</b>				
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)	Indeks harga yang diterima petani (It) ----- Indeks harga yang dibayar petani	101,5
2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	Ketersediaan pangan per kapita per hari ----- x kandungan kalori x 100 bagian Yang dapat dimakan	2980 kkal/ka p/hr
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	Ketersediaan pangan per kapita per hari ----- x kandungan kalori x 100 bagian yang dapat dimakan	75,99 gr/kap/hr
3.	Jumlah investasi	Laju investasi	Nilai investasi tahun berjalan- nilai investasi th sebelumnya ----- x 100 nilai investasi th sebelumnya	14,43 %
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi	PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1 ----- x 100 PDRB tahun n-1	5 %
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah wisatawan yang berkunjung per tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan data dasar	30 %
<b>B. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</b>				
6.	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya angkapengangguran	Jumlah penganggur ----- x 100 jumlah angkatan kerja	4.25%
7.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran ----- x 100 Jumlah Rumah Tangga	11 %
8.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun ----- x 10.000 jumlah penduduk	0,46

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018
1	2	3	4
<b>C. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan</b>			
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman ----- x 100% panjang jalan kabupaten	82 %
		Persentase minimal bencana yang terselesaikan ----- x 100 % Jumlah lokasi bencana	100%
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik -----x 100 % Luas Wilayah perkotaan Kabupaten Temanggung	31.25%
		Persentase pelayanan sampah perkotaan ----- x 100 % Tingkat pengelolaan sampah Kabupaten Jumlah timbulan sampah Kabupaten	87 %
<b>D. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>			
11.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) ----- x 100 Jumlah penduduk di atas 15 tahun	7,19 %
		Peresentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) ----- x 100jumlah penduduk usia di atas 15 tahun	99,17%
<b>E. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</b>			
12.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup ----- x 100 jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama	100 perkilomil
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup ----- x 1000 jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama	11 permil
		Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan) ----- x 100 jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama	<0,5 %
		Angka Harapan Hidup Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	72,92 tahun
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018

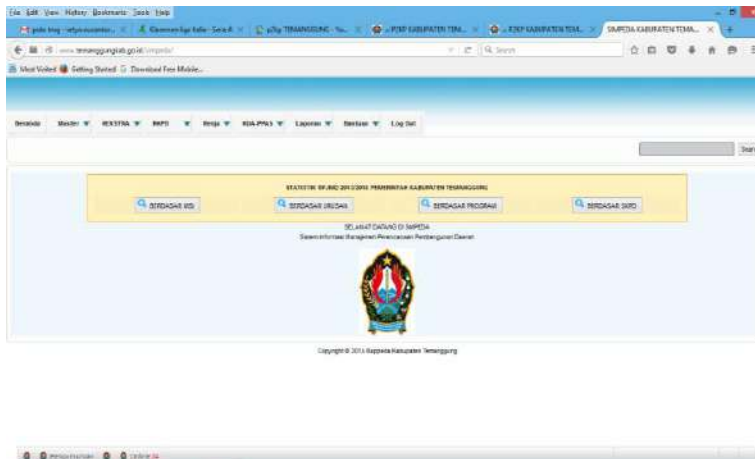
	1	2	3	4
13.	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera III}}{\text{jumlah seluruh keluarga}} \times 100$	45,22%
		Meningkatnya kualias kesejahteraan Keluarga Sejahtera III plus	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera III Plus}}{\text{jumlah seluruh keluarga}} \times 100$	4,14 tahun
		Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk th n} - \text{jumlah penduduk (tahun n-1)}}{\text{jumlah penduduk (tahun n-1)}} \times 100$	0,6 %
14.	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani (JKT) selama 1 tahun (lama dan baru)}}{\text{Jumlah seluruh penduduk miskin sakit yang tidak ditanggung Jamkesmas}} \times 100$	100%
<b>F. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>				
15.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	B
		Nilai Evaluasi kinerja penyelesaian pemerintahan Daerah	Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	sangat tinggi
16.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SKPD dengan IKM B (75) atau lebih dibandingkan dengan seluruh SKPD	75
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun (x)}}{\text{jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada thn (x)}} \times 100\%$	100%
18.	Terwujudnya Pengelolaan e-Government	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	$\frac{\text{Jumlah Sistem Informasi e-Government yang tersedia}}{\text{jumlah organisasi perangkat daerah}} \times 100$	75 %

## E. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah ditetapkan beberapa inovasi antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini diharapkan tidak ada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.2 Sistem perencanaan daerah

2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan RKA, DPA, DPA sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.3 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem



pembangunan Daerah

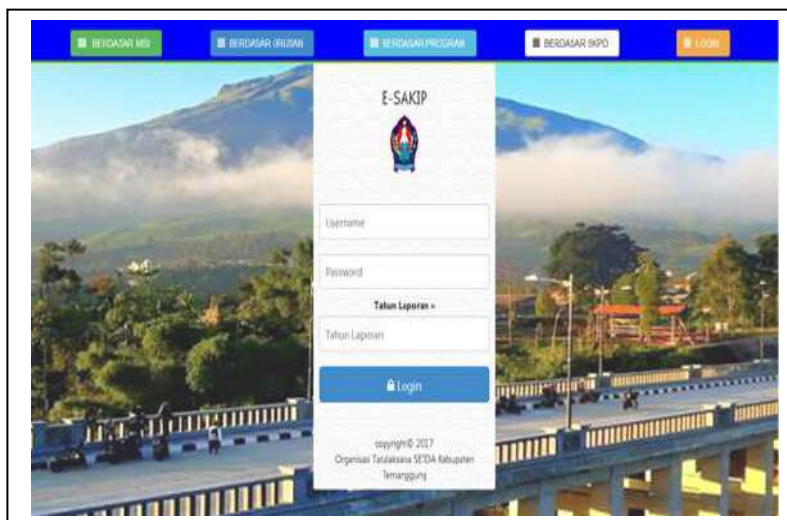
Melalui aplikasi ini pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat dilihat secara realtime. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya, dengan cara input data pelaksanaan kegiatan, capaian fisik dan realisasi keuangan.



Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah informasi Akuntansi daerah

#### 4. E SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan system akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung



**PENGUKURAN KINERJA**  
**LKJIP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

Misi 1: = 99.9%

89.51

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kesejahteraan petani								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Program	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101.5	102.17	100.66	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	560,000,000.00	515,515,684.00	92.06
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	7,020,414,470.00	6,908,539,139.00	98.41
					Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5,512,630,000.00	4,755,128,243.00	86.26
					Program pemberdayaan petani	390,000,000.00	369,847,762.00	94.83
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	155,000,000.00	148,593,500.00	95.87
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100.66</b>		<b>13,638,044,470</b>	<b>12,697,624,328</b>	<b>93.10</b>
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
2	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	2980	2950	99.0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	330,000,000.00	316,196,584.00	95.82
3	Tingkat Ketersediaan protein per Kapita	75.5	115.34	100	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25,000,000.00	24,742,500.00	98.97
					Program pengembangan budidaya perikanan	1,626,347,000.00	1,588,068,270.00	97.65
					Program pengembangan perikanan tangkap	100,000,000.00	91,435,000.00	91.44
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	95,000,000.00	94,079,999.00	99.03
					Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	500,000,000.00	472,023,300.00	94.40
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	40,000,000.00	29,993,310.00	74.98
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	355,000,000.00	341,515,647.00	96.20
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,042,800,000.00	1,757,530,750.00	86.04
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	15,000,000.00	13,555,000.00	90.37
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	50,000,000.00	48,908,900.00	97.82					
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>99.50</b>		<b>5,179,147,000</b>	<b>4,778,049,260</b>	<b>92.26</b>
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Investasi Daerah								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Program	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
4	Meningkatnya laju investasi	14.43	39.92	100	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	471,466,000.00	462,325,531.00	98.06
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	718,421,500.00	647,688,173.00	90.15
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>1,189,887,500</b>	<b>1,110,013,704</b>	<b>93.29</b>
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
5	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5 %	4,80%*	96	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59,334,000.00	56,943,940.00	95.97
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20,000,000.00	17,831,000.00	89.16
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	54,484,000.00	48,988,580.00	89.91
					Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	458,013,000.00	389,129,375.00	84.96
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204,490,000.00	195,183,642.00	95.45
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198,060,000.00	193,187,000.00	97.54
					Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	42,995,000.00	22,019,500.00	51.21
					Program Pengelolaan Pasar Daerah	3,592,752,000.00	3,193,565,520.00	88.89
					Program Pembinaan Pedagang	20,000,000.00	15,042,838.00	75.21
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354,505,000.00	345,346,012.00	97.42					

				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	316,055,000.00	276,057,500.00	87.34
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>96</b>		<b>5,320,688,000</b>	<b>4,753,294,907</b>	<b>89.34</b>

SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kunjungan wisatawan								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
6	Tingkat kunjungan wisatawan	30%	15.41%	51.37	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	340,237,000.00	308,279,652.00	90.61
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	791,372,500.00	740,455,299.00	93.57
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	197,312,000.00	196,122,500.00	99.40
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	284,465,000.00	248,118,800.00	87.22
					Program Pengembangan Kemitraan	569,120,000.00	565,060,320.00	99.29
					Program Pengembangan Produk Wisata	471,382,000.00	440,843,674.00	93.52
					Program Pengembangan Nilai Keagamaan	2,282,611,000.00	2,130,109,241.00	93.32
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>51.37</b>		<b>4,936,499,500</b>	<b>4,628,989,486</b>	<b>93.77</b>
<b>Misi 2 :</b>		<b>100</b>						
SASARAN STRATEGIS 6 : Menurunnya Tingkat Pengangguran								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
7	Menurunnya Angka Pengangguran	5.35	3.24	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	822,010,000.00	728,709,980.00	88.65
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221,546,000.00	204,048,268.00	92.10
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	204,255,000.00	182,606,666.00	89.40
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	106,300,000.00	103,450,650.00	97.32
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>1,354,111,000</b>	<b>1,218,815,564</b>	<b>90.01</b>
SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
8	Menurunnya Angka kemiskinan	11	9.87	100	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	350,135,500.00	341,272,879.00	97.47
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	418,160,500.00	369,252,984.00	88.30
					Program pembinaan anak terlantar	138,850,000.00	133,762,000.00	96.34
					Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	138,352,000.00	135,126,125.00	97.67
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,473,820,000.00	1,307,051,048.00	88.68
					Program pengembangan wawasan kebangsaan	63,500,000.00	55,330,640.00	87.13
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	158,692,000.00	158,488,750.00	99.87
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,101,472,000.00	1,067,894,023.00	96.95
					Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70,805,000.00	63,478,000.00	89.65
					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	428,119,000.00	408,357,040.00	95.38
					Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan	199,550,000.00	195,903,000.00	98.17
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	86,265,000.00	79,082,000.00	91.67
					Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	49,018,000.00	47,508,000.00	96.92
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	12,844,000.00	64.22
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	192,347,000.00	178,029,000.00	92.56
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	845,946,050.00	434,268,910.00	51.34
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	16,222,000.00	15,647,000.00	96.46					
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	26,840,000.00	26,550,800.00	98.92					
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>5,778,094,050</b>	<b>5,029,846,199</b>	<b>87.05</b>
SASARAN STRATEGIS 8 : Meningkatnya ketertiban dan keamanan								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
					Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,099,500,000.00	1,069,678,207.00	97.29

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	200,000,000.00	126,541,000.00	63.27
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50,000,000.00	49,110,000.00	98.22
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00

9	Angka Kriminalitas	4.6	4.6	100	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	760,143,000.00	647,381,565.00	85.17
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50,000,000.00	49,533,000.00	99.07
					Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	797,000,000.00	793,193,000.00	99.52
					Program pengembangan wawasan kebangsaan	275,973,000.00	259,538,134.00	94.04
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	217,370,000.00	208,283,648.00	95.82
					Program pendidikan politik masyarakat	154,681,000.00	149,398,074.00	96.58
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>3,619,667,000.00</b>	<b>3,367,656,628.00</b>	<b>93.04</b>
<b>Misi 3:</b>		<b>100</b>						

**SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur**

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%	
	Target	Realisasi	%					
10	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	82	84.15	100	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,975,363,000.00	51,728,899,574.00	92.41
					Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,959,864,248.00	2,902,935,365.00	98.08
					Program Pembangunan turap/talud/brojong	3,389,545,400.00	3,304,174,515.00	97.48
					Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5,779,759,100.00	5,481,734,688.00	94.84
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,606,061,700.00	1,538,177,528.00	95.77
					Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11,541,973,825.00	10,185,937,887.00	88.25
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	198,629,400.00	194,459,200.00	97.90
					Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	217,225,200.00	193,565,145.00	89.11
					Pengembangan Prasarana Perkotaan	18,879,127,500.00	15,403,669,452.00	81.59
					Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	3,153,023,850.00	3,134,956,658.00	99.43
					Program Pemberdayaan jasa Konstruksi	43,262,840.00	28,937,585.00	66.89
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	402,808,450.00	329,500,030.00	81.80
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,997,119,440.00	4,672,226,883.00	93.50
					Program Pengembangan Perumahan	1,184,454,000.00	1,150,025,137.00	97.09
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,249,695,900.00	1,213,020,728.00	97.07
					Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8,200,000,000.00	8,169,209,827.00	99.62
					Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38,411,000.00	36,987,296.00	96.29
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	250,540,000.00	197,023,466.00	78.64
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,481,329,000.00	1,325,338,861.00	89.47
					Program peningkatan pelayanan angkutan	265,146,000.00	259,164,981.00	97.74
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,662,691,000.00	3,553,284,908.00	97.01					
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	6,010,070,000.00	991,124,407.00	16.49					
11	Persentase minimal bencana yang terselesaikan (%)	100	100	100	Program Pengembangan Data/Informasi	6,930,000.00	6,930,000.00	100.00
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349,903,000.00	304,980,950.00	87.16
					Program Tanggap Darurat dan Logistik	2,664,149,000.00	2,313,319,981.00	86.83
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2,033,320,450.00	1,800,516,850.00	88.55
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>136,540,403,303</b>	<b>120,420,101,902</b>	<b>88.19</b>

**SASARAN STRATEGIS 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%	
	Target	Realisasi	%					
12	Persentase taman/ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten dengan kriteria baik (%)	31.25	34.89	100	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60,800,000.00	59,622,000.00	98.06
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,599,161,700.00	3,698,754,252.00	66.06
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,959,363,200.00	1,808,836,022.00	92.32
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	351,568,000.00	341,431,501.00	97.12
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250,000,000.00	233,795,300.00	93.52
13	Persentase pelayanan sampah perkotaan (%)	87	92	100	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	480,284,000.00	477,115,900.00	99.34
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>8,701,176,900</b>	<b>6,619,554,975</b>	<b>76.08</b>

<b>Misi 4:</b>		<b>99.67</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Program	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
14	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.19	7.19	100	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64,125,000.00	62,587,000.00	97.60
					Program pendidikan anak usia dini	530,902,500.00	522,404,005.00	98.40
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82,720,320,701.00	76,823,885,024.00	92.87
					Program Pendidikan Non Formal	2,907,000,000.00	2,855,692,500.00	98.24
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,152,600,000.00	17,040,870,740.00	99.35
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	514,950,000.00	507,418,600.00	98.54
					Program peningkatan peran serta kepemudaan	125,000,000.00	94,747,500.00	75.80
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	235,000,000.00	183,988,800.00	78.29
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	500,000,000.00	482,043,000.00	96.41
					Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	358,123,500.00	324,961,011.00	90.74
					Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	400,000,000.00	305,445,000.00	76.36
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
					Program Pendidikan Non Formal	171,480,000.00	164,911,930.00	96.17
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21,440,000.00	18,405,000.00	85.84
15	Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	99.17	98.51	99.33	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	655,950,000.00	585,307,700.00	89.23
					Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	134,975,500.00	123,917,975.00	91.81
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115,519,000.00	99,853,500.00	86.44
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6,000,000.00	5,400,000.00	90.00
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>99.67</b>		<b>106,638,386,201</b>	<b>100,226,839,285</b>	<b>93.99</b>
<b>Misi 5:</b>		<b>90.51</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS 12: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	100	87.6	100	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,375,000.00	68,468,894.00	74.93
17	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	11	12.85	83.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,583,000.00	25,248,100.00	77.49
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,826,752,600.00	1,717,226,297.00	94.00
18	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	<0,5	0.3	100	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63,473,259,824.00	51,009,748,815.00	80.36
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	149,732,200.00	132,982,100.00	88.81
19	Angka Harapan Hidup	72.92	75.43	100	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	75,000,000.00	74,990,000.00	99.99
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	192,673,500.00	184,090,882.00	95.55
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	576,097,000.00	528,494,100.00	91.74
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408,283,500.00	259,307,400.00	63.51
					Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12,088,144,000.00	11,892,819,409.00	98.38
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	251,612,600.00	248,154,500.00	98.63
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1,452,741,500.00	1,386,238,729.00	95.42
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>94.40</b>		<b>80,677,862,724</b>	<b>67,582,878,936</b>	<b>83.77</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 13 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
20	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	45.22	45.57	100	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	154,860,000.00	151,406,340.00	97.8
21	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus	4.14	3.23	78.02	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201,293,500.00	184,768,025.00	91.8
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.6	0.88	53.33	Program Keluarga Berencana	7,530,805,800.00	5,936,141,097.00	78.8
					Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	473,876,500.00	468,246,000.00	98.8
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>77.1</b>		<b>8,360,835,800</b>	<b>6,740,561,462</b>	<b>80.6</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 14: Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
23	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100	100	100	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5,000,000,000.00	4,999,941,600.00	100.0
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	20,719,000,000.00	20,673,939,976.00	99.8
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	118,290,721,574.00	103,738,106,249.00	87.7
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426,084,300.00	244,160,647.00	57.30

				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	13,654,846,500.00	13,207,194,370.00	96.72
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	26,061,000.00	24,817,900.00	95.23
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	80,416,000.00	29,451,000.00	36.62
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23,335,000.00	21,215,000.00	90.91
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>100</b>		<b>158,220,464,374</b>	<b>142,938,826,742</b>	<b>90.34</b>

<b>Misi 6:</b>		<b>99.4</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS 15:Terwujudnya pengelolaan e-Government</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
24	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	75	100	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,756,964,000.00	1,747,288,618.00	99.4
					Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	118,230,000.00	115,859,944.00	98.0
					Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	4,417,852,100.00	4,374,957,854.00	99.0
					Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	649,720,000.00	644,361,380.00	99.2
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>100</b>	<b>6,942,766,100</b>	<b>6,882,467,796</b>	<b>99</b>	

<b>SASARAN STRATEGIS 16:Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2017			Program	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	CC	97.2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00	136,352,000.00	92.1
					Program perencanaan pembangunan daerah	752,448,300.00	682,655,142.00	90.7
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,104,757,500.00	11,515,224,873.00	81.6
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	429,522,000.00	404,438,700.00	94.2
26	Nilai EKPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi *	100	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74,101,000.00	60,351,233.00	81.4
					Program Pendidikan Kedinasan	705,597,000.00	705,571,700.00	100.0
					Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1,193,492,400.00	923,349,195.00	77.4
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	683,974,900.00	641,407,911.00	93.8
					Program administrasi kepegawaian	206,251,500.00	187,695,518.00	91.0
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	43,465,000.00	36,095,000.00	83.0
					Program Kerjasama Daerah	24,000,000.00	22,860,000.00	95.3
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
					Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	43,000,000.00	41,800,000.00	97.2
					Program pendidikan politik masyarakat	99,415,500.00	99,415,500.00	100.0
					Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	43,250,000.00	42,644,000.00	98.6
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19,998,000.00	18,335,000.00	91.7
					Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	24,891,000.00	23,606,000.00	94.8
					Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,780,233,600.00	2,226,968,200.00	80.1
					Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	35,000,000.00	25,000,000.00	71.4
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,686,282,500.00	11,287,675,336.00	76.9
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00	136,352,000.00	92.1
					Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100,000,000.00	99,691,150.00	99.7
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	185,000,000.00	179,222,700.00	96.9
					Program Kerjasama Daerah	45,000,000.00	44,975,000.00	99.9
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,222,287,600.00	1,937,885,050.00	87.2					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	239,598,500.00	235,171,600.00	98.2					
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>98.60</b>	<b>39,089,746,300</b>	<b>31,766,742,808</b>	<b>81.27</b>	

<b>SASARAN STRATEGIS 17 :Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2017			Proram	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				



27	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	871,645,000.00	822,200,752.00	94.3
					Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	231,000,000.00	227,492,589.00	98.5
					Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum	248,000,000.00	236,816,698.00	95.5
					Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160,000,000.00	91,124,040.00	57.0
					Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,844,011,142.00	6,127,505,109.00	89.5
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200,000,000.00	190,540,100.00	95.3
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90,000,000.00	66,972,401.00	74.4
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	61,594,900.00	57,524,150.00	93.4
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>100</b>		<b>8,706,251,042</b>	<b>7,820,175,839</b>	<b>90</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 18: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>								
INDIKATOR KINERJA		Tahun 2018			Program	Pagu	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
28	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,025,451,000.00	2,689,535,720.00	88.9
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26,000,000.00	24,982,500.00	96.1
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	219,754,500.00	202,277,900.00	
29	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	98	98	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7,206,605,650.00	6,788,596,577.00	94.2
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>99</b>		<b>10,477,811,150</b>	<b>9,705,392,697</b>	<b>92.63</b>
<b>Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung</b>				<b>96.51</b>	<b>Rata-rata realisasi keuangan</b>			<b>89.22</b>

**PENGUKURAN KINERJA**  
**LKJIP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

<b>SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kesejahteraan petani</b>					
INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	560,000,000.00	515,515,684.00	92.06
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	7,020,414,470.00	6,908,539,139.00	98.41
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5,512,630,000.00	4,755,128,243.00	86.26
		Program pemberdayaan petani	390,000,000.00	369,847,762.00	94.83
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	155,000,000.00	148,593,500.00	95.87
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>13,638,044,470</b>	<b>12,697,624,328</b>	<b>93.10</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah</b>					
2	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	330,000,000.00	316,196,584.00	95.82
3	Tingkat Ketersediaan protein per Kapita	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25,000,000.00	24,742,500.00	98.97
		Program pengembangan budidaya perikanan	1,626,347,000.00	1,588,068,270.00	97.65
		Program pengembangan perikanan tangkap	100,000,000.00	91,435,000.00	91.44
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	95,000,000.00	94,079,999.00	99.03
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	500,000,000.00	472,023,300.00	94.40
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	40,000,000.00	29,993,310.00	74.98
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	355,000,000.00	341,515,647.00	96.20
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,042,800,000.00	1,757,530,750.00	86.04
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	15,000,000.00	13,555,000.00	90.37
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	50,000,000.00	48,908,900.00	97.82
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>5,179,147,000</b>	<b>4,778,049,260</b>	<b>92.26</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Investasi Daerah</b>					
4	Meningkatnya laju investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	471,466,000.00	462,325,531.00	98.06
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	718,421,500.00	647,688,173.00	90.15
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>1,189,887,500</b>	<b>1,110,013,704</b>	<b>93.29</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah</b>					
5	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59,334,000.00	56,943,940.00	95.97
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20,000,000.00	17,831,000.00	89.16
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	54,484,000.00	48,988,580.00	89.91
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	458,013,000.00	389,129,375.00	84.96
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204,490,000.00	195,183,642.00	95.45

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198,060,000.00	193,187,000.00	97.54
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	42,995,000.00	22,019,500.00	51.21
		Program Pengelolaan Pasar Daerah	3,592,752,000.00	3,193,565,520.00	88.89
		Program Pembinaan Pedagang	20,000,000.00	15,042,838.00	75.21
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354,505,000.00	345,346,012.00	97.42
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	316,055,000.00	276,057,500.00	87.34
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>5,320,688,000</b>	<b>4,753,294,907</b>	<b>89.34</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>					
6	Tingkat kunjungan wisatawan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	340,237,000.00	308,279,652.00	90.61
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	791,372,500.00	740,455,299.00	93.57
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	197,312,000.00	196,122,500.00	99.40
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	284,465,000.00	248,118,800.00	87.22
		Program Pengembangan Kemitraan	569,120,000.00	565,060,320.00	99.29
		Program Pengembangan Produk Wisata	471,382,000.00	440,843,674.00	93.52
		Program Pengembangan Nilai Keagamaan	2,282,611,000.00	2,130,109,241.00	93.32
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>4,936,499,500</b>	<b>4,628,989,486</b>	<b>93.77</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 6 : Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>					
7	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	822,010,000.00	728,709,980.00	88.65
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221,546,000.00	204,048,268.00	92.10
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	204,255,000.00	182,606,666.00	89.40
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	106,300,000.00	103,450,650.00	97.32
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>1,354,111,000</b>	<b>1,218,815,564</b>	<b>90.01</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin</b>					
8	Menurunnya Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	350,135,500.00	341,272,879.00	97.47
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	418,160,500.00	369,252,984.00	88.30
		Program pembinaan anak terlantar	138,850,000.00	133,762,000.00	96.34
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	138,352,000.00	135,126,125.00	97.67
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,473,820,000.00	1,307,051,048.00	88.68
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	63,500,000.00	55,330,640.00	87.13
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	158,692,000.00	158,488,750.00	99.87
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,101,472,000.00	1,067,894,023.00	96.95
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70,805,000.00	63,478,000.00	89.65
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	428,119,000.00	408,357,040.00	95.38
		Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan	199,550,000.00	195,903,000.00	98.17
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	86,265,000.00	79,082,000.00	91.67		

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	49,018,000.00	47,508,000.00	96.92
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	12,844,000.00	64.22
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	192,347,000.00	178,029,000.00	92.56
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	845,946,050.00	434,268,910.00	51.34
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	16,222,000.00	15,647,000.00	96.46
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	26,840,000.00	26,550,800.00	98.92
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>5,778,094,050</b>	<b>5,029,846,199</b>	<b>87.05</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 8 : Meningkatnya ketertiban dan keamanan</b>					
9	Angka Kriminalitas	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,099,500,000.00	1,069,678,207.00	97.29
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	200,000,000.00	126,541,000.00	63.27
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50,000,000.00	49,110,000.00	98.22
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	760,143,000.00	647,381,565.00	85.17
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50,000,000.00	49,533,000.00	99.07
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	797,000,000.00	793,193,000.00	99.52
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	275,973,000.00	259,538,134.00	94.04
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	217,370,000.00	208,283,648.00	95.82
		Program pendidikan politik masyarakat	154,681,000.00	149,398,074.00	96.58
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>3,619,667,000.00</b>	<b>3,367,656,628.00</b>	<b>93.04</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>					
10	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,975,363,000.00	51,728,899,574.00	92.41
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,959,864,248.00	2,902,935,365.00	98.08
		Program Pembangunan turap/talud/brojong	3,389,545,400.00	3,304,174,515.00	97.48
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5,779,759,100.00	5,481,734,688.00	94.84
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,606,061,700.00	1,538,177,528.00	95.77
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11,541,973,825.00	10,185,937,887.00	88.25
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	198,629,400.00	194,459,200.00	97.90
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	217,225,200.00	193,565,145.00	89.11
		Pengembangan Prasarana Perkotaan	18,879,127,500.00	15,403,669,452.00	81.59
		Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	3,153,023,850.00	3,134,956,658.00	99.43
		Program Pemberdayaan jasa Konstruksi	43,262,840.00	28,937,585.00	66.89
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	402,808,450.00	329,500,030.00	81.80
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,997,119,440.00	4,672,226,883.00	93.50
		Program Pengembangan Perumahan	1,184,454,000.00	1,150,025,137.00	97.09
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,249,695,900.00	1,213,020,728.00	97.07
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8,200,000,000.00	8,169,209,827.00	99.62
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38,411,000.00	36,987,296.00	96.29
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	250,540,000.00	197,023,466.00	78.64
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,481,329,000.00	1,325,338,861.00	89.47
		Program peningkatan pelayanan angkutan	265,146,000.00	259,164,981.00	97.74
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,662,691,000.00	3,553,284,908.00	97.01		
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	6,010,070,000.00	991,124,407.00	16.49		

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
11	Persentase minimal bencana yang terselesaikan (%)	Program Pengembangan Data/Informasi	6,930,000.00	6,930,000.00	100.00
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349,903,000.00	304,980,950.00	87.16
		Program Tanggap Darurat dan Logistik	2,664,149,000.00	2,313,319,981.00	86.83
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2,033,320,450.00	1,800,516,850.00	88.55
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>136,540,403,303</b>	<b>120,420,101,902</b>	<b>88.19</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>					
12	Persentase taman/ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten dengan kriteria baik (%)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60,800,000.00	59,622,000.00	98.06
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,599,161,700.00	3,698,754,252.00	66.06
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,959,363,200.00	1,808,836,022.00	92.32
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	351,568,000.00	341,431,501.00	97.12
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250,000,000.00	233,795,300.00	93.52
13	Persentase pelayanan sampah perkotaan (%)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	480,284,000.00	477,115,900.00	99.34
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>8,701,176,900</b>	<b>6,619,554,975</b>	<b>76.08</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan</b>					
14	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64,125,000.00	62,587,000.00	97.60
		Program pendidikan anak usia dini	530,902,500.00	522,404,005.00	98.40
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82,720,320,701.00	76,823,885,024.00	92.87
		Program Pendidikan Non Formal	2,907,000,000.00	2,855,692,500.00	98.24
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,152,600,000.00	17,040,870,740.00	99.35
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	514,950,000.00	507,418,600.00	98.54
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	125,000,000.00	94,747,500.00	75.80
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	235,000,000.00	183,988,800.00	78.29
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	500,000,000.00	482,043,000.00	96.41
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	358,123,500.00	324,961,011.00	90.74
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	400,000,000.00	305,445,000.00	76.36
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
		Program Pendidikan Non Formal	171,480,000.00	164,911,930.00	96.17
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21,440,000.00	18,405,000.00	85.84
15	Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	655,950,000.00	585,307,700.00	89.23
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	134,975,500.00	123,917,975.00	91.81
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115,519,000.00	99,853,500.00	86.44
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6,000,000.00	5,400,000.00	90.00
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>106,638,386,201</b>	<b>100,226,839,285</b>	<b>93.99</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 12: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>					
16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,375,000.00	68,468,894.00	74.93
17	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,583,000.00	25,248,100.00	77.49
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,826,752,600.00	1,717,226,297.00	94.00
18	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63,473,259,824.00	51,009,748,815.00	80.36
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	149,732,200.00	132,982,100.00	88.81
19	Angka Harapan Hidup	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	75,000,000.00	74,990,000.00	99.99
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	192,673,500.00	184,090,882.00	95.55
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	576,097,000.00	528,494,100.00	91.74
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408,283,500.00	259,307,400.00	63.51
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12,088,144,000.00	11,892,819,409.00	98.38
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	251,612,600.00	248,154,500.00	98.63

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1,452,741,500.00	1,386,238,729.00	95.42
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	59,608,000.00	55,109,710.00	92.45
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>80,677,862,724</b>	<b>67,582,878,936</b>	<b>83.77</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 13 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga</b>					
20	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	154,860,000.00	151,406,340.00	97.8
21	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201,293,500.00	184,768,025.00	91.8
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Keluarga Berencana	7,530,805,800.00	5,936,141,097.00	78.8
		Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	473,876,500.00	468,246,000.00	98.8
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>8,360,835,800</b>	<b>6,740,561,462</b>	<b>80.6</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 14: Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu</b>					
23	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5,000,000,000.00	4,999,941,600.00	100.0
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	20,719,000,000.00	20,673,939,976.00	99.8
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	118,290,721,574.00	103,738,106,249.00	87.7
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426,084,300.00	244,160,647.00	57.30
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	13,654,846,500.00	13,207,194,370.00	96.72
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	26,061,000.00	24,817,900.00	95.23
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	80,416,000.00	29,451,000.00	36.62
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23,335,000.00	21,215,000.00	90.91
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>158,220,464,374</b>	<b>142,938,826,742</b>	<b>90.34</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 15:Terwujudnya pengelolaan e-Government</b>					
24	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,756,964,000.00	1,747,288,618.00	99.4
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	118,230,000.00	115,859,944.00	98.0
		Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	4,417,852,100.00	4,374,957,854.00	99.0
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	649,720,000.00	644,361,380.00	99.2
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>6,942,766,100</b>	<b>6,882,467,796</b>	<b>99</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 16:Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah</b>					
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00	136,352,000.00	92.1
		Program perencanaan pembangunan daerah	752,448,300.00	682,655,142.00	90.7
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,104,757,500.00	11,515,224,873.00	81.6
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	429,522,000.00	404,438,700.00	94.2

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
26	Nilai EKPPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74,101,000.00	60,351,233.00	81.4
		Program Pendidikan Kedinasan	705,597,000.00	705,571,700.00	100.0
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1,193,492,400.00	923,349,195.00	77.4
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	683,974,900.00	641,407,911.00	93.8
		Program administrasi kepegawaian	206,251,500.00	187,695,518.00	91.0
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	43,465,000.00	36,095,000.00	83.0
		Program Kerjasama Daerah	24,000,000.00	22,860,000.00	95.3
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	43,000,000.00	41,800,000.00	97.2
		Program pendidikan politik masyarakat	99,415,500.00	99,415,500.00	100.0
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	43,250,000.00	42,644,000.00	98.6
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19,998,000.00	18,335,000.00	91.7
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	24,891,000.00	23,606,000.00	94.8
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,780,233,600.00	2,226,968,200.00	80.1
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	35,000,000.00	25,000,000.00	71.4
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,686,282,500.00	11,287,675,336.00	76.9
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00	136,352,000.00	92.1
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100,000,000.00	99,691,150.00	99.7
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	185,000,000.00	179,222,700.00	96.9
		Program Kerjasama Daerah	45,000,000.00	44,975,000.00	99.9
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,222,287,600.00	1,937,885,050.00	87.2		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	239,598,500.00	235,171,600.00	98.2		
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>39,089,746,300</b>	<b>31,766,742,808</b>	<b>81.27</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 17 :Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
27	Opini Pemeriksaan BPK	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	871,645,000.00	822,200,752.00	94.3
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	231,000,000.00	227,492,589.00	98.5
		Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum	248,000,000.00	236,816,698.00	95.5
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160,000,000.00	91,124,040.00	57.0
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,844,011,142.00	6,127,505,109.00	89.5
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200,000,000.00	190,540,100.00	95.3
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90,000,000.00	66,972,401.00	74.4
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	61,594,900.00	57,524,150.00	93.4
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>8,706,251,042</b>	<b>7,820,175,839</b>	<b>90</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 18: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>					
28	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,025,451,000.00	2,689,535,720.00	88.9
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26,000,000.00	24,982,500.00	96.1
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	219,754,500.00	202,277,900.00	
29	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7,206,605,650.00	6,788,596,577.00	94.2
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>10,477,811,150</b>	<b>9,705,392,697</b>	<b>92.63</b>

<b>SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kesejahteraan petani</b>			
INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu	
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	560,000,000.00
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	7,020,414,470.00
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5,512,630,000.00
		Program pemberdayaan petani	390,000,000.00
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	155,000,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah</b>			
2	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	330,000,000.00
3	Tingkat Ketersediaan protein per Kapita	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25,000,000.00
		Program pengembangan budidaya perikanan	1,626,347,000.00
		Program pengembangan perikanan tangkap	100,000,000.00
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	95,000,000.00
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	500,000,000.00
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	40,000,000.00
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	355,000,000.00
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,042,800,000.00
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	15,000,000.00
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	50,000,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Investasi Daerah</b>			
4	Meningkatnya laju investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	471,466,000.00
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	718,421,500.00
<b>SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah</b>			
5	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59,334,000.00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20,000,000.00
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	54,484,000.00
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	458,013,000.00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204,490,000.00



INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198,060,000.00
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	42,995,000.00
		Program Pengelolaan Pasar Daerah	3,592,752,000.00
		Program Pembinaan Pedagang	20,000,000.00
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354,505,000.00
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	316,055,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>			
6	Tingkat kunjungan wisatawan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	340,237,000.00
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	791,372,500.00
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	197,312,000.00
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	284,465,000.00
		Program Pengembangan Kemitraan	569,120,000.00
		Program Pengembangan Produk Wisata	471,382,000.00
		Program Pengembangan Nilai Keagamaan	2,282,611,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 6 : Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>			
7	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	822,010,000.00
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221,546,000.00
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	204,255,000.00
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	106,300,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin</b>			
8	Menurunnya Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	350,135,500.00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	418,160,500.00
		Program pembinaan anak terlantar	138,850,000.00
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	138,352,000.00
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,473,820,000.00
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	63,500,000.00
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	158,692,000.00
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,101,472,000.00
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70,805,000.00
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	428,119,000.00
		Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan	199,550,000.00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	86,265,000.00		

INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	49,018,000.00
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	192,347,000.00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	845,946,050.00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	16,222,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 8 : Meningkatnya ketertiban dan keamanan</b>		
9 Angka Kriminalitas	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,099,500,000.00
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	200,000,000.00
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50,000,000.00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	15,000,000.00
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	760,143,000.00
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50,000,000.00
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	797,000,000.00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	275,973,000.00
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	217,370,000.00
	Program pendidikan politik masyarakat	154,681,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>		
10 Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,975,363,000.00
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,959,864,248.00
	Program Pembangunan turap/talud/brojong	3,389,545,400.00
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5,779,759,100.00
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,606,061,700.00
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11,541,973,825.00
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	198,629,400.00
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	217,225,200.00
	Pengembangan Prasarana Perkotaan	18,879,127,500.00
	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	3,153,023,850.00
	Program Pemberdayaan jasa Konstruksi	43,262,840.00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	402,808,450.00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,997,119,440.00
	Program Pengembangan Perumahan	1,184,454,000.00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,249,695,900.00
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8,200,000,000.00
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38,411,000.00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	250,540,000.00
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,481,329,000.00
	Program peningkatan pelayanan angkutan	265,146,000.00
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,662,691,000.00
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	6,010,070,000.00

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu
11	Persentase minimal bencana yang terselesaikan (%)	Program Pengembangan Data/Informasi	6,930,000.00
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349,903,000.00
		Program Tanggap Darurat dan Logistik	2,664,149,000.00
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2,033,320,450.00
<b>SASARAN STRATEGIS 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>			
12	Persentase taman/ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten dengan kriteria baik (%)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60,800,000.00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,599,161,700.00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,959,363,200.00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	351,568,000.00
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250,000,000.00
13	Persentase pelayanan sampah perkotaan (%)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	480,284,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan</b>			
14	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64,125,000.00
		Program pendidikan anak usia dini	530,902,500.00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82,720,320,701.00
		Program Pendidikan Non Formal	2,907,000,000.00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,152,600,000.00
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	514,950,000.00
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	125,000,000.00
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	235,000,000.00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	500,000,000.00
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	358,123,500.00
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	400,000,000.00
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000.00
		Program Pendidikan Non Formal	171,480,000.00
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21,440,000.00
15	Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	655,950,000.00
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	134,975,500.00
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115,519,000.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6,000,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 12: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>			
16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,375,000.00
17	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,583,000.00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,826,752,600.00
18	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63,473,259,824.00
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	149,732,200.00
19	Angka Harapan Hidup	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	75,000,000.00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	192,673,500.00
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	576,097,000.00
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408,283,500.00
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12,088,144,000.00
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	251,612,600.00

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1,452,741,500.00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	59,608,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 13 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga</b>			
20	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	154,860,000.00
21	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201,293,500.00
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Keluarga Berencana	7,530,805,800.00
		Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	473,876,500.00
<b>SASARAN STRATEGIS 14: Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu</b>			
23	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5,000,000,000.00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	20,719,000,000.00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	118,290,721,574.00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426,084,300.00
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	13,654,846,500.00
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	26,061,000.00
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	80,416,000.00
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23,335,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 15: Terwujudnya pengelolaan e-Government</b>			
24	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,756,964,000.00
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	118,230,000.00
		Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	4,417,852,100.00
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	649,720,000.00
<b>SASARAN STRATEGIS 16: meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah</b>			
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00
		Program perencanaan pembangunan daerah	752,448,300.00
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,104,757,500.00
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	429,522,000.00

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu
26	Nilai EKPPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74,101,000.00
		Program Pendidikan Kedinasan	705,597,000.00
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1,193,492,400.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	683,974,900.00
		Program administrasi kepegawaian	206,251,500.00
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	43,465,000.00
		Program Kerjasama Daerah	24,000,000.00
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	52,000,000.00
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	43,000,000.00
		Program pendidikan politik masyarakat	99,415,500.00
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	43,250,000.00
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19,998,000.00
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	24,891,000.00
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,780,233,600.00
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	35,000,000.00
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,686,282,500.00
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148,090,000.00
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100,000,000.00
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	185,000,000.00
		Program Kerjasama Daerah	45,000,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,222,287,600.00		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	239,598,500.00		
<b>SASARAN STRATEGIS 17 :Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
27	Opini Pemeriksaan BPK	Program Peningkatan Professionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	871,645,000.00
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	231,000,000.00
		Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum	248,000,000.00
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160,000,000.00
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,844,011,142.00
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200,000,000.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90,000,000.00
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	61,594,900.00
<b>SASARAN STRATEGIS 18: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
28	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,025,451,000.00
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26,000,000.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	219,754,500.00
29	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7,206,605,650.00

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### TAHUN 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 -2018).

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

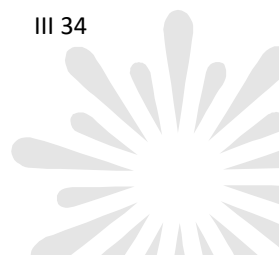
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 –2018 Kabupaten Temanggung.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebabterjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian 100,00%	Memuaskan
2	86,00% < capaian <99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian <69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## B. Capaian Kinerja Sasaran

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 18 sasaran dan 29 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	10	12
2	Sangat baik	6	13
3	Baik	1	3
4	Cukup	-	-
5	Kurang	1	1
Jumlah		18	29

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 18 sasaran hanya 1 saran dan darin 29 indikator sasaran hanya 1 indikator yang masih dalam kategori kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.3  
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	100	Memuaskan
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	2	99	Sangat Baik
3	Jumlah investasi	1	100	Memuaskan
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	1	96	Sangat Baik
5	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	51,7	kurang
6	Menurunnya tingkat pengangguran	1	100	Memuaskan
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	1	100	Memuaskan
8	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	1	100	Memuaskan
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	2	100	Memuaskan
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	100	Memuaskan
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2	99,67	Sangat Baik
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	94,4	Sangat Baik
13	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	3	77,1	Baik
14	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	1	100	Memuaskan
15	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	2	99,2	Sangat Baik
16	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1	100	Memuaskan
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	99	Sangat Baik
18	Terwujudnya Pengelolaan e-Government	1	100	Memuaskan
Jumlah		29	95,32	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 18 sasaran dan 29 indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati tahun 2018 dapat tercapai 95,32 % atau kategori “**sangat baik**”. Dimana 29 indikator yang diukur, terdapat 12 indikator (41,3%) dengan capaian 100% (memuaskan), 13 indikator (44,8%) dengan capaian 86% - 99% (sangat baik), 1 indikator (3%) dengan capaian 77,1% (baik ) dan 1 indikator (3%) dengan capaian 51,7 (kurang). Terdapat 2 Indikator sasaran yang masih di bawah target dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan capaian 51,7%
2. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga dengan capaian 77,1%

Penyebab dan solusi ketidaktercapaian pada indikator di atas dapat dilihat pada penjelasan capaian kinerja di masing-masing misi dan sasaran pada capaian kinerja.

## B. Capaian Kinerja

### **Misi Satu** Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan

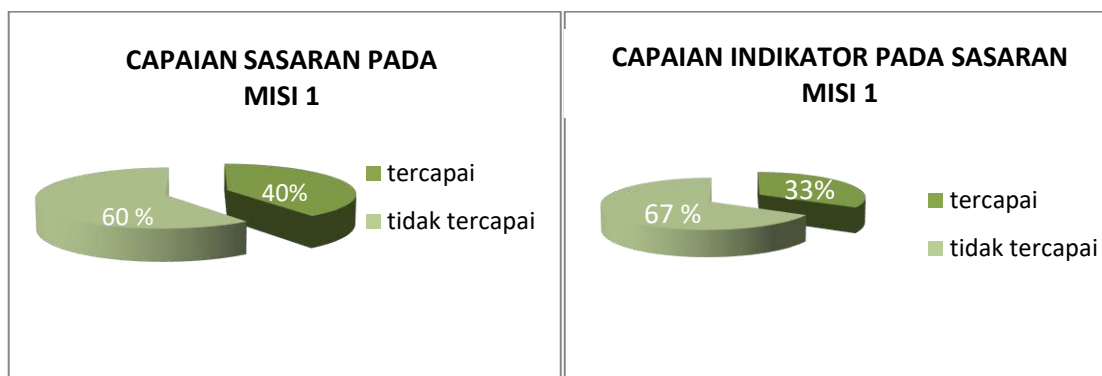
Pada misi I yaitu **mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan** terdapat 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya jumlah investasi
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
5. Meningkatnya kunjungan wisatawan

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4  
Pencapaian Sasaran dan indikator Misi I



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 5 sasaran yang terdapat pada misi I, 40% (2 sasaran) dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan 60% (3 sasaran) belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk indikator pada misi I ini terdapat 6 indikator kinerja dimana 33% (2 indikator) telah tercapai, sedangkan 67% (4 indikator) telah dilaksanakan, tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi I adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran strategis 1 : meningkatnya kesejahteraan petani**

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kesejahteraan petani											
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Nilai Tukar Petani	101,4	101,4	99,9	101,4	101,35	99,95	101,5	102,17	100	101,5
Rata-rata capaian sasaran				99,9			99,95			100	

Ket. : TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja\*) Angka Sementara

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani tahun 2018 sebesar 100,66% dari target yang ditetapkan (101,5%) sebagai target akhir

RPJMD. NTP tahun 2018 meningkat 0,81% jika dibanding tahun 2017, naik 0,76% dibanding tahun 2016, naik 0,96% dibanding tahun 2015 .

- Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dikeluarkan petani, meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan.
- Dalam perhitungannya NTP juga melibatkan kalkulasi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan, pendidikan, perumahan, rekreasi, olahraga, transportasi dan komunikasi.
- NTP yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

❖ Dukungan NTP dari sektor Pertanian

Kenaikan NTP Tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan harga gabah mencapai 3,17% yang menyebabkan Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,22%, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,20%.

Selain itu, karena adanya fluktuasi harga terutama komoditas tembakau dan hortikultura (bawang putih, cabai merah, bawang merah), sehingga mempengaruhi indeks harga yang diterima petani.



Gambar 3.1 Tanam Perdana Bawang Putih bersama Kementerian Pertanian

Komoditas bawang putih pada tahun 2017 mendapat alokasi pengembangan bawang putih seluas 1.170 hektar dari program APBN, yang tersebar di Kecamatan Kledung, Bansari, Parakan, Ngadirejo, Wonoboyo, Candiroto, Tretep, Bulu, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo dan Kaloran dengan estimasi produksi 7.020 ton pada bulan maret 2018.

Demikian juga untuk tahun 2018, pengembangan kawasan pertanian bawang putih seluas 1.930 hektar dengan anggaran APBN dan 300 hektar dari kewajiban importir bawang putih untuk menanam bawang putih dengan estimasi produksi pada bulan maret 2019 sebanyak 17.840 ton.

Selain itu, melalui pengembangan Kawasan pertanian nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Berbasis Korporasi Petani dan Keputusan Menteri Pertanian



Nomor 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional,

Gambar 3.2 Fasilitas Peralatan Pasca Panen Pengering Hibryd Hasil Produksi Pertanian

Kabupaten Temanggung merupakan pengembangan kawasan pertanian untuk 4 komoditas utama yaitu Padi, Cabai, Bawang Putih dan Bawang Merah sehingga arah kebijakan pembangunan pertanian dari Kementerian pertanian fokus pada pengembangan komoditas utama tersebut, mekanisasi pertanian, dan peningkatan infrastruktur pertanian sehingga memberikan pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Tahun 2017 hasil rata-rata produksi tembakau naik 2 kali lipat dengan produktivitas 0,62 ton/hektar, dibandingkan tahun 2016 dengan produktivitas 0,36 ton/hektar, sehingga sangat mempengaruhi pendapatan petani. Untuk tahun 2018 ini hasil rata-rata produksi tembakau naik dengan produktivitas 0,653 ton/ha. Peningkatan hasil pertanian yang berkorelasi

positif dengan peningkatan Nilai Tukar Petani dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong pencapaian target, diantaranya adalah :

- a. Pengadaan benih unggul tanaman pertanian bersertifikat yang terjangkau petani;
- b. Penanganan serangan hama dan penyakit tanaman;
- c. Distribusi Pupuk yang optimal untuk petani dan pelaksanaan pemupukan berimbang berwawasan lingkungan;
- d. Pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani dalam budidaya tanaman; dan
- e. Penyediaan sarana prasarana serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi, Embung dan Dam Parit.

Untuk meningkatkan kualitas hasil tembakau, telah di launching varietas unggul lokal Temanggung pada tanggal 7 September 2017, hasil kerjasama pemuliaan komoditas tembakau berupa varietas baru Kemloko 4, 5 dan 6 Agribun yang tahan terhadap 3 jenis hama penyakit.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target penggunaan bibit dan benih unggul diantaranya adalah melalui Kegiatan Penyediaan dan Pemurnian. Pemurnian Benih tembakau meliputi varietas Kemloko 4 Agribun, 5 Agribun dan 6 Agribun.

Benih yang digunakan adalah berasal dari benih dasar yang dimurnikan melalui 3 metode proses pemurnian yaitu :

1. Isolasi tempat dimana jarak dengan varietas lain minimal 200 meter
2. Isolasi waktu dimana waktu tanam diajukan 2 bulan dari varietas sekitarnya
3. Isolasi Bunga mengerodong bunga sejak menjelang bunga mekar sampai panen



Gambar 3.3 Bupati dan Wakil Bupati Temanggung melakukan cek Harga Tembakau di Gudang Garam dan Djarum



Hasil pemurnian benih tembakau ini akan digunakan untuk menyediakan benih tembakau varietas unggul bagi petani / kelompok tani tembakau di Kabupaten Temanggung sebagai salah satu alternatif di dalam melestarikan dan meningkatkan produksi, produktivitas dan Mutu tembakau Temanggung.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Pemurnian Benih Tembakau Kemloko

Peningkatan jumlah alat mesin pertanian bertujuan mendukung kemandirian pertanian, peningkatan percepatan mekanisasi, produksi dan produktivitas pertanian. Capaian kinerja indikator ini didukung melalui anggaran APBN, APBD I Provinsi Jawa Tengah , maupun APBD II Kab. Temanggung. Permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam pengelolaan alat mesin pertanian diantaranya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh petani mengenai penggunaan dan perawatan alat mesin pertanian masih kurang, karena itu diperlukan pantauan lebih lanjut tentang pemakaian dan perawatannya agar bantuan yang diberikan bisa memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Berikut kami sampaikan pengadaan alat mesin pertanian tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.6.  
**Jumlah pengadaan alat mesin pertanian tahun 2018**

No	Alat Mesin Pertanian	Jumlah
1	Kultivator	250
2	Perontok serbaguna	5
3	Power Trasher	1
4	APPO	272
5	Paddy Mower	5
6	Traktor	56
7	Roda Tiga	268
8	Pompa Air	267

Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung, jumlah jaringan irigasi usahatani terbangun, dan jumlah jalan usaha tani. Pada tahun 2018 ketiga indikator tersebut tercapai 100%



Gambar 3.5 Alat Mesin Pertanian Hand Traktor

dari target yang ditetapkan. Sumber dana yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten baik DAU, DAK maupun DBHCHT dan dana APBN Dekonsentrasi.

Terdapat 6 embung yang selama ini dikelola, yaitu embung Kledung, Nglarangan, Tlogopucang, Ngropoh, Soropadan, Jetis. Adanya kemauan memanfaatkan potensi embung untuk meningkatkan pengairan lahan pertanian di sekitarnya dan adanya kesadaran masyarakat sekitar embung dan pemerintah desa untuk menggunakan embung sebagai potensi meningkatkan taraf hidup menjadi faktor pendorong dalam pengelolaan kawasan embung secara maksimal.

Tahun 2018 Kabupaten Temanggung melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 39 unit Jaringan irigasi sehingga sampai dengan tahun 2018 telah tercapai 528 unit atau 100 % dari target RPJMD sebanyak 469 unit. Kegiatan tersebut bersumber dari anggaran APBN TP Provinsi Jawa tengah sebanyak 6 unit, APBN Pusat sebanyak 8 unit, DAK Pertanian sebanyak 11 unit, APBD II melalui Penggantian fungsi irigasi LP2B sebanyak 13 unit , serta pembangunan irigasi tetes di kebun induk kopi sebanyak 1 unit.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan memperluas pemanfaatan lahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Peningkatan



Gambar 3.6. Pembangunan infrastruktur Jalan Usaha tani



kapasitas SDM penyuluh diukur melalui peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian. Sebanyak 47 orang penyuluh pertanian yang diangkat dari THL-TBPP menjadi CPNS Penyuluh pertanian.

Peningkatan kapasitas SDM Petani dilaksanakan melalui pelatihan - pelatihan, magang, dan kunjungan lapang guna meningkatkan kompetensi anggota kelompok tani. Pelaksanaan bimbingan teknis, sekolah lapang, pelatihan-pelatihan, magang, studi orientasi dilakukan dalam berbagai jenis yang meliputi :

- a. Pelatihan budidaya tanaman
- b. Pelatihan penanganan pasca panen hasil pertanian
- c. Pelatihan Pengendalian hama penyakit tanaman
- d. Pelatihan sekolah lapang iklim

Penerapan teknologi pertanian dalam arti luas diwujudkan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, diantaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) tembakau di 20 lokasi / Kelompok tani, SLPHT kopi di 4 kelompok tani, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul di 2 lokasi kelompok, SL Padi Organik di 2 kelompok serta SL Iklim Tahap 2 melibatkan 10 kelompok yang dilaksanakan di Kecamatan Kledung. Jumlah besaran kelompok tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian di tahun 2018 sebanyak 39 kelompok, atau telah tercapai 89 % dari target RPJMD yaitu 1300 kelompok yang ditargetkan.

Kegiatan SLPTT padi unggul dilaksanakan di KT. Pangudi Bogo Desa Candimulyo dan KT. Berkah Desa Salamsari Kecamatan Kedu. Sekolah Lapang Sekolah Lapang Pengelolaan



Gambar 3.7. Pelatihan rice transplanter



Gambar 3.8. Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim -2

Tanaman Tepadu (SLPTT) Padi Unggul merupakan Penerapan teknologi berdasarkan spesifik lokasi, sehingga lebih tepat diterapkan oleh masing-masing kelompok tani. Melalui kegiatan ini diharapkan petani mau menggunakan benih unggul, sebagai usaha penyediaan bahan pangan organik dengan meminimalisir penggunaan bahan kimia. Hal ini untuk mencegah terjadinya residu baik ditanah maupun ditubuh manusia selaku pengonsumsi bahan pangan.

Sekolah Lapang Iklim Tahap II dilaksanakan sebagai upaya Memberikan informasi iklim dan hubungannya dengan tanaman Tembakau baik tentang anomali cuaca yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung dan memberikan informasi bagaimana cara menentukan mulai musim hujan dan mulai musim kemarau dengan menggunakan data curah hujan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kelompok tani khususnya di kawasan sentra tembakau.

Salah satu prestasi peningkatan kapasitas SDM petani diataranya adalah dengan diterimanya penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kelompok Tani “Makmur” Desa Simpar Kecamatan Tretep sebagai Juara I Kelompok Tani Upaya Khusus Jagung Teladan 2018. Penyuluh pertanian juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Juara II Kartu Tani Award 2018, dimana penyuluh pertanian merupakan petugas admin dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.



Gambar 3.9 Piagam penghargaan kelompok tani tingkat Provinsi





Gambar 3.10 Piagam penghargaan Penyuluh Pertanian tingkat Provinsi

❖ Dukungan NTP dari sektor peternakan

Berikut kami sampaikan tabel peningkatan produktivitas dan populasi ternak sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Peningkatan produktivitas daging tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi Capaian Kinerja		
			2016	2017	2018
Peningkatan Produktivitas daging Sapi	kg/ekor	176,65	169	173,20	178
Peningkatan Produktivitas daging Kambing	kg/ekor	13,66	13,55	13,55	13,66
Peningkatan Produktivitas daging Domba	kg/ekor	13,66	13,60	13,60	13,66
Peningkatan produksi telur ayam ras petelur	butir	79.255.574	124.578.618	124.967.968	135.062.280
Peningkatan populasi sapi	ekor	29.750	32.830	37.025	39.241
Peningkatan populasi domba	ekor	334.646	350.770	352.524	394.500
Peningkatan populasi kambing	ekor	64.388	75.685	85.450	85.630
Peningkatan populasi ayam buras	ekor	1.675.736	1.884.775	1.894.199	1.903.670

Sumber: Disnakan Kab. Temanggung 2018

1. Peningkatan produktivitas daging sapi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar 178 kg/ekor atau mencapai 100,76% melebihi target 169,79% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 173,20 kg/ekor meningkat 2,77% dan apabila dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 169 kg/ekor ada peningkatan sebesar 5,33%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 167 kg/ekor maka

ada peningkatan sebesar 6,59% dan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 165 kg/ekor ada peningkatan 7,88%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) tercapai 100,76% dari target yang ditetapkan sebesar 176,65 kg/ekor.

2. Peningkatan produktivitas daging kambing pada tahun 2018 sebesar 13,66 kg/ekor atau mencapai 100% dibandingkan target sebesar 13,66 kg/ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 sebesar 13,55 kg/ekor meningkat 0,81%. Capaian tahun 2018 ini dibanding capaian pada tahun 2015 sebesar 13,50 kg/ekor meningkat 1,18% dan dibanding capaian tahun 2014 sebesar 13,13 kg/ekor ada peningkatan 4,04%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 13,66 kg/ekor.

3. Peningkatan produktivitas daging domba pada tahun 2018 sebesar 13,66 kg/ekor atau mencapai 100% dibanding target sebesar 13,66 kg/ekor. Dibanding dengan capaian tahun 2017 dan 2016 sebesar 13,60 kg/ekor meningkat sebesar 0,44%. Capaian tahun 2018 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 13,50 kg/ekor ada peningkatan 1,18% dan apabila dibanding dengan capaian tahun 2014 sebesar 13,13 kg/ekor meningkat 4,04%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 13,66 kg/ekor.

4. Peningkatan produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2018 sebesar 135.062.280 butir atau mencapai 170,41% dari target sebesar 79.255.574 butir. Dibanding dengan tahun 2017 sebesar 124.967.968 butir meningkat sebesar 8,08%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016



sebesar 124.578.618 butir meningkat 8,41% dan jika dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 76.966.165 butir maka terdapat peningkatan sebesar 75,48% dan dibanding tahun 2014 sebesar 76.165.313 butir ada peningkatan 77,33%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sudah melebihi yaitu tercapai 170,41% dari target yang ditetapkan sebesar 79.255.574 butir.

5. Peningkatan populasi sapi pada tahun 2018 sebesar 39.241 ekor atau 131,90% dibandingkan target sebesar 29.750 ekor. Apabila dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 37.025 ekor meningkat sebesar 5,98%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebanyak 32.830 ekor meningkat 19,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian peningkatan populasi sapi tahun 2015 sebesar 29.697 ekor menunjukkan kenaikan sebesar 32,14% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 29.115 ekor menunjukkan kenaikan 34,78%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan upaya khusus sapi indukan wajib bunting dan gangguan reproduksi dari sumber dana APBN pada tahun berkenaan sehingga meningkatkan angka kelahiran dan berbanding lurus pada peningkatan populasi ternak sapi.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sebanyak 29.750 ekor, maka telah tercapai 131,90%;

6. Peningkatan populasi domba pada tahun 2018 sebesar 394.500 ekor atau 117,89 dari target sebesar 334.646 ekor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 352.524 ekor meningkat sebesar 11,91%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebanyak 350.770 ekor meningkat 12,47%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 288.918 ekor maka capaian tahun 2018 meningkat 36,54% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 286.058 ekor ada peningkatan 37,91%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sebanyak 334.646 ekor maka telah tercapai 117,89%;

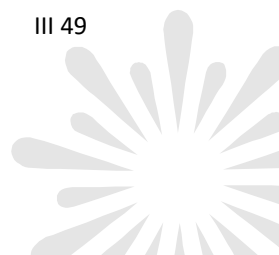
7. Peningkatan populasi kambing pada tahun 2018 sebesar 85.630 atau mencapai 132,99% dibanding targetnya sebesar 64.388 ekor. Dibanding capaian tahun 2017 sebesar 85.450 ekor meningkat 0,21%. Apabila capaian tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebanyak 75.685 ekor meningkat 13,14%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 70.186 ekor meningkat 22%. Jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 70.046 ekor ada peningkatan 22,20%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sebanyak 64.388 ekor maka target peningkatan populasi kambing sudah tercapai 132,99%;

8. Peningkatan populasi ayam buras pada tahun 2018 sebesar 1.903.670 ekor atau 113,60% dari target sebesar 1.675.736 ekor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 1.669.053 ekor ada peningkatan 14,06%. Dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.884.775 ekor meningkat 1,00%. Pencapaian ini dibanding tahun 2015 sebesar 1.881.013 ekor meningkat 1,20%. Dibanding capaian tahun 2014 sebesar 1.862.390 ekor meningkat 2,22%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sebanyak 1.675.736 ekor maka telah tercapai 113,60%.

Dengan dukungan seluruh program meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan secara konsisten, maka target akhir RPJMD Nilai Tukar Petani (NTP) tercapai sesuai dengan target sebesar 101,5%. Meskipun target di akhir tahun RPJMD telah tercapai, kedepan tetap perlu kerjasama seluruh stakeholder.





- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani adalah sebesar Rp12.697.624.328,00 atau 93,10 % dari total pagu sebesar Rp13.638.044.470,00.

Dengan capaian realisasi keuangan yang mencapai 93,10%, sedangkan capaian kinerja yang tercapai 100 % maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

- ❖ Pencapaian pada sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan beberapa program berikut ini:

- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan petani
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Untuk program Kehutanan yang terdiri dari 3 program sudah dilimpahkan ke Provinsi yakni :

- Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

## 2. Sasaran strategis Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	Kkal/kap/hr	2.940	2.940	100	2.940	3.458	100	2.980	2.912	98	2.980
2	Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	Gr/ kap/ hr	75,5	75,5	100	75,5	115,3	100	75,99	115,34	100	75,99
Rata-rata capaian sasaran				100			100				99	

Ket.:TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah tahun 2018 telah tercapai 99%, atau meningkat 0,88% jika dibanding tahun 2015, dan turun jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017 sebesar 1 %. Berikut kami sampaikan tabel capaian ketersediaan Energi, Protein dan Lemak:

Tabel 3.9  
**Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak perkapita  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018**

No.	Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Per Kapita											
		2015			2016			2017			2018		
		Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak
		kcal/hr	gr/hr	gr/hr	kcal/hr	gr/hr	gr/hr	kcal/hr	gr/hr	gr/hr	kcal/hr	gr/hr	gr/hr
1	Padi-padian	2.218	53,86	15,28	2453	59.81	17.72	2471	60,25.	17.65	2223	53,77.	14.63
2	Makanan Berpati	201	1,36	0,80	19	0.18	0.45	148	1.01	0.70	79	0,54	0,42
3	Gula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	0,10	0,33
4	Buah Biji Berminyak	11	0,53	1,02	15	0.82	1.42	6	0.32	0.54	87	4,71	8,27
5	Buah-buahan	33	0,35	0,37	1	0.01	0.02	28	0.27	0.48	31	0.30	0.53
6	Sayur-sayuran	142	6,57	1,19	123	11.19	1.21	182	8.57	1.60	299	33,73	3,00
7	Daging	44	3,01	3,47	337	26.22	25.07	490	39.03	35.91	64	4,25	5,08
8	Telur	28	2,10	2,00	27	2.09	1.98	73	5,54	5,32	41	3,16	2,92
9	Susu	0	0,02	0,03	0	0.02	0.02	2	0.09	0.10	1	0.05	0.05
10	Ikan	9	1,78	0,16	1	0.19	0.01	1	0.16	0.01	24	4.44	0.54
11	Minyak dan lemak	4	0,00	0.048	40	0.07	4.44	54	0.10	5.92	13	0.01	1.05
Jumlah		2.691	69,58	24,79	3.020	100.6	52.64	3.458	115.34	68.82	2950	105,07	37,44

Sumber : Dintanpangan 2018

- ❖ Berdasarkan perhitungan NBM, diperoleh bahwa ketersediaan energi untuk tahun 2017 adalah sebesar 2.950 kkal/kap/hr. Dengan capaian ini, maka jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2.980 kkal/kap/hr, capaian tahun 2018 tercapai 99%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian ketersediaan energi menurun dan tahun 2015 pencapaian ketersediaan energi meningkat.

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 2.200 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan



standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.000 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

- ❖ Protein merupakan komponen bahan pangan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Kedua komponen tersebut mendukung tercapainya cakupan ketersediaan protein sebesar 103.04 gr/kap/hr dimana target akhir RPJMD adalah 75.99 gr/kap/hari sehingga capaian kinerja untuk indikator cakupan ketersediaan protein per kapita telah tercapai 100%. Cakupan ketersediaan protein tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 menurun sebesar 12,30 gram/hari.
- ❖ Upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi pertanian menjadi pendorong utama peningkatan produksi pangan, yang memacu jumlah produksi pertanian tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) utama masyarakat Temanggung.
  - ✓ Berbagai upaya peningkatan produksi di sektor peternakan dan perikanan, serta pengembangan komoditas tanaman pangan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan menjadi tumpuan ketersediaan protein daerah, meskipun untuk komoditas kedelai Temanggung belum bisa swasembada, namun pasokan dari luar daerah mampu menjamin ketersediaan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.
  - ✓ Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjaga kelestarian lahan pertanian cukup tinggi ditunjukkan dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Gubernur Jawa Tengah memberikan penghargaan dan pin emas kepada Bupati Temanggung selaku pimpinan daerah yang peduli terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- ✓ Faktor pengendalian pertumbuhan penduduk juga turut menjadi kunci tingkat ketersediaan energi maupun protein, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan, sedangkan secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan percepatannya tidak sebanding.
- ✓ Untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dilakukan berbagai upaya antara lain :

1. Pemberdayaan lumbung pangan melalui kegiatan pemberdayaan lumbung pangan desa sejumlah 2 kelompok lumbung dari dana APBD I Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
  - a. Kelompok Kelompok Tani Margo Utomo 3 Desa Pringapus Kecamatan Ngadirejo
  - b. Kelompok Tani Remaja IV Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan

Melalui kegiatan pengisian lumbung pangan dengan bantuan berupa gabah kering masing – masing sejumlah 2.8 ton. Selain itu ada 6 Kelompok yang mendapat pembinaan melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang bersumber dana APBN Yaitu :

- a. Gapoktan Guyup Rukun Desa Lungge Kecamatan Temanggung;
- b. Kelompok Tani Bumi Makmur Desa Bumiayu Kecamatan Selopampang;
- c. Gapoktan Rejomakmur Desa Rejosari Kecamatan Pingsurat;
- d. Gapoktan Srimekar Desa Glapansari Kecamatan Parakan;
- e. Gapoktan Subur Makmur Desa Traji Kecamatan Parakan; dan
- f. Gapoktan Tani Makmur Desa Danurejo Kecamatan Bulu.

Dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya :

- a. Tersedianya modal usaha di gapoktan/ kelompok tani untuk mengembangkan usahanya;

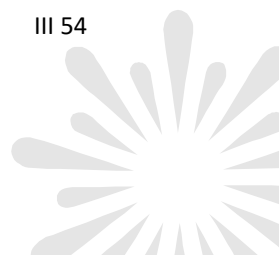


- b. Harga gabah/ beras di wilayah gapoktan dapat di stabilkan, terutama pada saat panen raya;
- c. Akses pangan khususnya bagi anggota gapoktan meningkat;
- d. Meningkatnya kemampuan manajemen gapoktan.

Sampai dengan akhir tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pemberdayaan bagi 55 lumbung, atau 93,22 % dari target kinerja sebesar 59 unit.

Tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan cadangan masyarakat diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
  - b. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam mengelola cadangan pangan;
  - c. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan;
  - d. Memasyarakatkan kegiatan padat karya pangan untuk mendekatkan akses pangan pada masyarakat yang masih memerlukan bantuan pangan;
  - e. Memberdayakan masyarakat melalui kerja gotong royong mengelola infrastruktur yang mendukung pembangunan di pedesaan untuk memperkuat kerja sama menuju ketahanan pangan tingkat rumah tangga; dan
  - f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha - usaha pangan masyarakat.
2. Cadangan Pangan Pemerintah juga terdapat di tingkat desa berupa CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang berada pada BPCP (Balai Pengelolaan Cadangan Pangan), atau pusat yaitu pada perum BULOG, dimana tiap-tiap Kabupaten mendapat alokasi 100 ton untuk dipergunakan apabila terjadi bencana. Kabupaten Temanggung memiliki gudang cadangan



pangan Pemerintah Kabupaten yang berada di Kelurahan Kertosari, dibangun melalui dana DAK tahun 2011 dengan kapasitas mencapai 100 ton. Pada 2017 telah dilaksanakan pengisian sebanyak 10 ton gabah kering giling (GKG) yang berlokasi di Desa Kertosari Kecamatan Temanggung melalui kegiatan Pengisian Gudang Cadangan Pangan sebagai Antisipasi Kerawanan Pangan. Sedangkan pada 2018 tidak teralokasikan dalam APBD

3. Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Temanggung telah dicapai melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan maupun melalui kegiatan replikasi dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten, di 10 desa, yaitu:

- a. Desa Getas, Kecamatan Kaloran;
- b. Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat;
- c. Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak;
- d. Desa.Purwosari Kecamatan Wonobojo;
- e. Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang;
- f. Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan;
- g. Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran;
- h. Desa Kaloran Kecamatan Kaloran;
- i. Desa Tlogowungu, Kecamatan Kaloran;
- j. Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan;

melalui kegiatan Pengembangan Model Kemandirian Pangan Desa dari target sebanyak 10 desa, dapat tercapai 9 desa atau 90%, dari akumulasi capaian desa mandiri pangan pada kurun waktu 2014 - 2018.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan merupakan program pemanfaatan pekarangan yang biasanya bersumber dari anggaran APBN.

Tahun 2018 melalui kegiatan APBD Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA yang outputnya berupa Simultan pemanfaatan pekarangan



untuk peningkatan ketersediaan pangan rumah tangga, dilaksanakan pada 8 lokasi yaitu :

- KWT Sari Rejeki Desa Glapansari Kecamatan Parakan;
- KT Remaja Tani Makmur V Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan;
- KWT Barokah Desa Tembarak Kecamatan Tembarak;
- KWT Sekar Aji Desa Traji Kecamatan Parakan;
- KWT Ngudi Rejeki Desa Medono Kecamatan Pringsurat;
- KWT Mekar Tani Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Temanggung;
- KWT Sumber Rejeki Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan; dan
- KT Makmur II Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak;

✓ Di Kabupaten Temanggung, pemantauan telah secara rutin dilaksanakan,

terutama pada komoditas beras (sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk

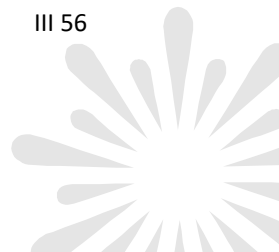
Temanggung), jagung, minyak goreng, kedelai, bawang merah, telur, gula pasir, daging

ayam, daging sapi, terigu, cabai, susu, dan ikan. Pantauan dilaksanakan oleh *enumerator* harga di tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen di beberapa titik pantau.

✓ Kegiatan pengembangan Pengolahan Pangan Lokal, Kelompok Wanita Tani Purwo Mandiri mendapatkan Penghargaan juara Ke-3 Adhikarya Pangan Nusantara dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah Kategori pelaku Ketahanan Pangan Desa Purwosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.



Gambar 3.11 Piagam penghargaan adhikarya pangan nusantara



- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp4.778.049.260,00 atau 92,26% dari total pagu sebesar Rp5.179.147.000,00.

Dengan capaian realisasi keuangan yang mencapai 92,35% dan capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,5 %, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh :
  - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan;
  - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
  - Program pengembangan budidaya perikanan;
  - Program pengembangan perikanan tangkap;
  - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
  - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;
  - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
  - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan;
  - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
  - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Investasi

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Investasi Daerah												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1 Laju investasi	%	14,43	18,05	100	14,43	39,92	100	14,43	361,87	100	14,43	
Rata-rata capaian sasaran				<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

Ket.:TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja **Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah** ditunjukkan dengan realisasi laju investasi tahun 2018 yang telah tercapai 100%. Dari target sebesar 14.43% laju investasi tahun 2018 tercapai sebesar 361,87%.
- ❖ Angka laju investasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 321,95% dari tahun 2017 (39,92%) dan naik sebesar 343,82% dari tahun 2016 (18,05%). Laju investasi dihitung dengan membandingkan total realisasi nilai investasi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Perhitungan realisasi nilai investasi terdiri atas sektor primer (tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan), sektor sekunder (industri), dan sektor tersier (listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang, komunikasi, perumahan, kawasan industri, perkantoran, jasa lainnya). Sektor industri mendominasi kontribusi terhadap total realisasi investasi pada tahun 2018. Jumlah realisasi investasi dari sektor industri tersebut sebesar Rp629.783.000.000,00 atau menyumbang 82,81% dari total nilai investasi.

Total nilai investasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp760.488.000.000,00 dari 390 investor, total nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp164.655.000.000,00 dari 381 investor, total tahun 2016 nilai investasi sebesar Rp117.674.000.000,00 dari 162 investor, dan total nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp99.055.000.000,00 dari 212 investor. Realisasi laju investasi tahun 2018 sebesar 361,87% sudah melebihi dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 14,43%.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat melebihi target di tahun 2018, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya investasi daerah sudah tercapai 100% di tahun 2018.
- ❖ Nilai investasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan strategis yang telah dilaksanakan untuk memudahkan, mempercepat dan memberikan kepastian investasi diantaranya paket kebijakan perizinan dan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk berinvestasi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis aplikasi online sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diantaranya:

- ✓ Aplikasi OSS (*online single submission*) yang merupakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan satu-satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga/gubernur, bupati atau walikota.
- ✓ SiCantik (Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik), merupakan aplikasi semi *opensource* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota masing – masing daerah.
- ✓ Website DPMPTSP Kabupaten Temanggung, yang memuat informasi kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan dan potensi investasi di Kabupaten Temanggung.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Investasi Derah adalah sebesar Rp1.110.013.704,00 atau 93,28% dari total pagu sebesar Rp1.189.887.500,00.  
Dengan capaian kinerja sasaran 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 93,28% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumber daya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini diupayakan melalui dua program yang telah dilaksanakan yaitu:
  1. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; dan
  2. program peningkatan pelayanan perizinan.Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, beberapa kegiatan strategis telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, diantaranya:
  - ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan perusahaan terkait dengan izin usaha yang dimiliki.
  - ✓ Penyelenggaraan *Matchmaking* dan Pameran Investasi dengan mengikuti kegiatan:





1. Invesda Expo pada tanggal 25-29 April 2018 di Yogyakarta;
2. Apkasi Otonomi Expo pada tanggal 6-8 Juli 2018 di Jakarta;
3. *Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF)* pada tanggal 26 November 2018 di Jakarta;
4. Temanggung *Fair* pada tanggal 1-5 November 2018 di Temanggung.

- ✓ Kegiatan Diseminasi Promosi Investasi, antara lain membuat video profil Temanggung yang mengusung tema Menggali Potensi Kopi Temanggung di lokasi perkebunan kopi dengan *tagline* “Nikmatnya Kopi Negeri Tembakau”



Gambar 3.12 Temu Usaha

- ✓ Penyelenggaraan Temu Usaha yang diselenggarakan sebanyak 5 kali:
  1. *Branding image* Komoditi Kopi dan Tembakau Temanggung “Ngopine Kopi Temanggung, Ngelinthinge Mbako Temanggung” yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2018 di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung.
  2. *Branding image* Kopi Temanggung “Nikmatnya Kopi Negeri Tembakau” pada tanggal 5 April 2018 di Kabupaten Temanggung,
  3. Sosialisasi dan Fasilitasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh Dirjen Bea Cukai Terkait Industri Rokok/Cigarette Kretek Temanggung pada tanggal 12 April 2018.
  4. Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sektor kopi pada tanggal 18 April 2018 di Loka Bhakti Praja Setda Kabupaten Temanggung.
  5. Sosialisasi dan Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor oleh Dirjen Bea Cukai di hadapan pelaku usaha industri se kabupaten Temanggung pada tanggal 18 September 2018.
- ✓ Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan:
  1. *Brainstorming* Pengembangan Investasi di wilayah Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, dan Kecamatan Wonoboyo pada tanggal 31 Juli 2018 di Taman Wisata Wagir Bawang Tretep.

2. Penganangan Kawasan “by the way” oleh Bupati Temanggung pada tanggal 17 Oktober 2018 di taman wisata Kembang Arum Desa Prangkoan Kecamatan Bejen.
3. Pendalaman dan tidak lanjut penganangan kawasan “by the way” pada 6 Desember 2018 di laksanakan di balai desa Semen Wonobojo.



Gambar 3.13 Penganangan By The Way

Kegiatan Fasilitasi *Roadmap* Investasi yang digunakan untuk menyusun buku profil investasi yang juga diikutsertakan pada lomba ajang bergengsi “Keris Jateng” dengan penyelenggara Bank Indonesia (BI). Profil ini mengusung “Rest Area Pringsurat” yang ada di Kecamatan Pringsurat sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Temanggung.

#### 4. Sasaran Strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk mengukur Sasaran keempat dilakukan pengukuran terhadap satu indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96%. Untuk mengukur sasaran Strategis 4 “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	%	5	4,98	99,60	5	4,68	93,6	5	4,80	96	5
Rata-rata capaian sasaran				99,60			93,6				96	

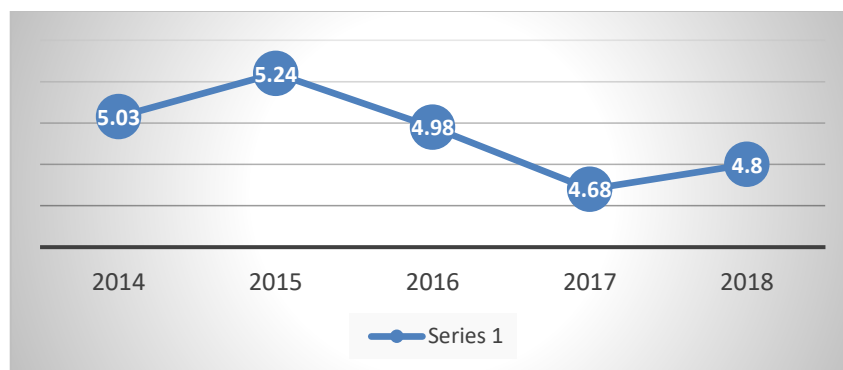
Ket. TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja \*data sementara

- ❖ Pada indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dari target 5% telah tercapai 4,80%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 96%.
- ❖ Pada tahun 2015 kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung tumbuh diatas 5%, sedangkan pada tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2016 – 2018 laju pertumbuhan ekonomi capaiannya dibawah target kinerja yang ditetapkan. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Temanggung tetap berjalan namun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penurunan kontribusi sektor pertanian sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung. Untuk itu diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal.
- ❖ Apabila dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Kedu yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menempati posisi ke 5 (lima), lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen namun lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo.
- ❖ Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah” telah tercapai 96%. Hal ini membuktikan bahwa upaya meningkatkan perekonomian telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari:
  - Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
  - Selama 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung sangat rendah yaitu dibawah 5%. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 3,24% sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara global. Pada Tahun 2015, tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung merupakan pengangguran yang terendah diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah.
  - Meningkatkan pendapatan per kapita  
Pendapatan per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung diukur dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2016 adalah sebesar Rp23.341.213,21 dan pada tahun 2017 sebesar Rp24.810.094,42.



- Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Nilai PDRB perkapita selalu naik menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik, namun dari prosentasenya pertumbuhan mengalami perlambatan pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.12  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 2014 – 2018**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

- Kontribusi sektor pembentuk PDRB sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang paling besar adalah kategori lapangan usaha industri pengolahan yaitu pada tahun 2017 sebesar 27,05% disusul kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,30% dan selanjutnya kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,43%. Sumbangan yang signifikan dari sektor industri dan perdagangan yang tinggi tidak hanya dinikmati oleh usaha besar, tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah adalah sebesar Rp4.753.294.907,00 atau 89,34% dari total pagu sebesar Rp5.320.688.000,00.

Dengan capaian kinerja sasaran 96% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 89,34% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan beberapa program yang meliputi:

- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- Program Pengelolaan Pasar Daerah;
- Program Pembinaan Pedagang;
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Berikut kami sampaikan data direktori pasar di kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13  
Data Direktori Pasar

No	Jenis Pasar	Jumlah	Keterangan
1	Pasar Daerah	8	Aktif
2	Pertokoan	3	Aktif
3	Pasar Desa	24	Aktif
4	Kios Terminal	5	Aktif
5	Pasar hewan	5	Aktif

Sumber: Dinsperindagkop dan UKM tahun 2018

Selain program di atas, beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya:

- ✓ Melakukan kegiatan penguatan industri kecil, diantaranya:
  - pengembangan industri kecil agro industri dan aneka industry;
  - pelatihan manajemen dan proses produksi bagi kelompok usaha;
  - pembinaan dan pengembangan potensi kelompok usaha.
- ✓ Melakukan promosi produk unggulan daerah seperti kopi, batik dan lainnya. Promosi yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain:
  - Pameran Produk TMII;
  - Pameran Jateng Fair;
  - Pameran Temanggung Fair;
  - Pameran INACRAF 2018;
  - Pameran Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah; dan
  - Dekranasda Carnival.

## 5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilakukan dengan pengukuran pada indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kunjungan wisatawan												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Tingkat kunjungan wisatawan	%	20	8,22	41,1	25	14,55	58,2	30	15,41	51,37	30
Rata-rata capaian sasaran				41,1			58,2				51,37	

Ket. TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan tahun 2018 dari target 30% kunjungan wisatawan telah tercapai 15,41% sehingga capaian pada indikator ini telah tercapai 51,37%.
- ❖ Peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung tahun 2018 tercapai sebesar 15,41% dari target yang ditentukan sebesar 30%. Angka ini

naik sebesar 0,86% dibanding tahun 2017 (14,55%) dan naik sebesar 7,19% dibanding tahun 2016 (8,22%). Capaian kinerja pada tahun 2018 ini belum mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 30%.

- ❖ Capaian kinerja ini dapat diukur dari data jumlah wisatawan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan jumlah wisatawan dari tahun 2013-2018 selalu mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15  
**Perkembangan Wisatawan Temanggung Tahun 2013-2018**

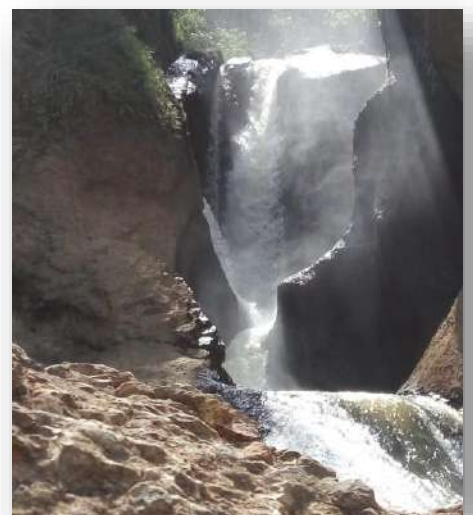
No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah wisatawan manca negara	77	155	435	364	107	161
2.	Jumlah wisatawan domestik	360.061	338.781	395.717	438.017	491.037	566.692
	<b>TOTAL</b>	<b>360.138</b>	<b>388.936</b>	<b>396.152</b>	<b>438.381</b>	<b>491.144</b>	<b>566.853</b>

Sumber: Dinbudpar Kab. Temanggung 2018

- Jumlah keseluruhan wisatawan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa destinasi wisata baru yang mulai tumbuh dengan berbagai fasilitas obyek baru dan penyelenggaraan event promosi hasil kerjasama dengan berbagai pihak terkait sehingga mengundang daya tarik pengunjung.

Hal ini membuktikan bahwa upaya meningkatkan kunjungan wisatawan pada sektor pariwisata dan budaya telah berhasil dilaksanakan, beberapa indikator yang mendukung pernyataan tersebut antara lain:

- Berkembangnya jumlah kawasan dan destinasi wisata.



Gambar 3.14 Curug Guwung



- Meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata yang dilaksanakan secara kontinyu dan reguler.
  - Meningkatnya pengelolaan wisata berbasis kemitraan.
  - Pengembangan promosi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata.
- ❖ Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan upaya keras yang berkesinambungan, maka indikator meningkatnya jumlah wisatawan pada akhir periode RPJMD 2018 sebagaimana tersebut pada tabel 3.14 di atas dapat tercapai.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan adalah sebesar Rp4.628.989.486,00 atau 93,77% dari total pagu sebesar Rp4.936.499.500,00. Dengan capaian sasaran 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 94,16% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa program yang telah dilaksanakan meliputi:
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
  - Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
  - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - Program Pengembangan Kemitraan;
  - Program Pengembangan Produk Wisata;
  - Program Pengembangan Nilai Keagamaan;
- Guna mendukung sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.15 Temanggung Night Carnival



- ✓ Promosi pariwisata nusantara dengan mengikuti Java Promo yang merupakan kerjasama promosi antara 9 Kabupaten/Kota di Jateng/DIY;
- ✓ Pawai Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan pawai kendaraan hias yang melibatkan OPD dan organisasi masyarakat;
- ✓ Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di 7 obyek wisata unggulan di Kabupaten Temanggung;
- ✓ Pembangunan Gardu Pandang;
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pariwisata Curug Guwung;
- ✓ Penyaluran stimulan desa wisata dan Pembinaan Masyarakat di destinasi wisata melalui partisipasi dalam Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah;
- ✓ Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
- ✓ Pembinaan dan sosialisasi informasi kepariwisataan kepada pelaku wisata se-Kabupaten Temanggung; dan
- ✓ Penyelenggaraan event/ festival kesenian dan kebudayaan daerah.

Berikut kami sampaikan event agenda rutin penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Temanggung yang diadakan setiap tahun:

- 1) Malam Anugerah Mas dan Mbak;
- 2) Temanggung Night Carnival;
- 3) Pawai Kendaraan Hias;
- 4) Suran Traji;
- 5) Festival Desa Wisata;
- 6) Festival Durian;
- 7) Rejegan Plabengan;
- 8) Lomba Bebek Bentisan;
- 9) Nyadran Pete
- 10) Kupat Sewu
- 11) Grebeg Cucur Menggoro



Gambar 3.16. Desa Wisata Pasar Papringan

## Misi Dua

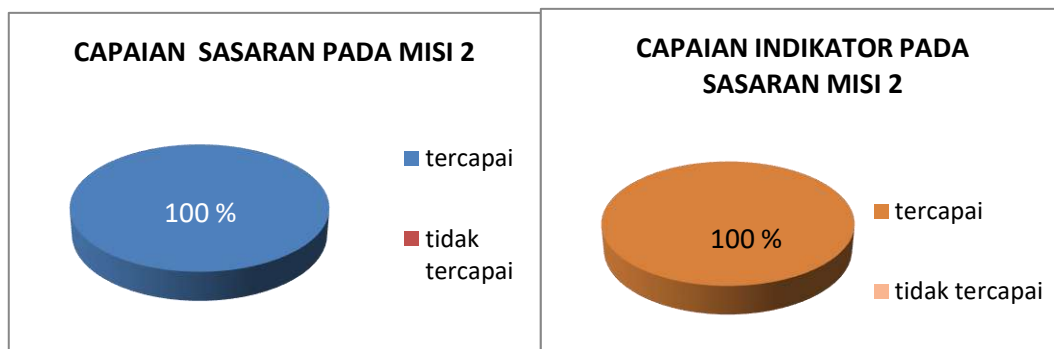
*Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis berbudaya dan sejahtera.*

Pada misi II yaitu **Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis berbudaya dan sejahtera** terdapat 3 sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin
3. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16  
**Pencapaian Misi II dan Indikator Sasaran Misi II**



Dari 3 sasaran yang ada pada misi 2, telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan dimana terdapat 3 sasaran tercapai 100%.

Dari 3 indikator kinerja sasaran pada misi 2 semuanya dapat tercapai 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati yang telah ditetapkan di tahun 2018. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi II adalah sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.17  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6**

SASARAN STRATEGIS : Menurunnya Tingkat Pengangguran												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Angka Pengangguran	%	4,75	1,50	100	4,5	1,50	100	5,35	3,24	100	4,25
Rata-rata capaian sasaran				100			100				100	

Ket. TK = Target Kinerja RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Secara umum capaian indikator pada sasaran “Menurunnya tingkat pengangguran” di Kabupaten Temanggung dapat dicapai dengan kategori memuaskan. Capaian Kinerja selama tahun tahun ini tercapai 100%. Pada tahun 2018, dari target yang telah ditetapkan angka pengangguran 5,35% tercapai 3,24%. Pencapaian Angka ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan dari target akhir RPJMD. Keberhasilan ini didukung oleh banyaknya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan tingkat kesempatan kerja berdasarkan lowongan kerja yang ada.

Tabel 3.18  
**Jumlah Pencari Kerja, Lowongan, dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2018**

BULAN	PENCAKER			LOWONGAN			PENEMPATAN		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L+P
Januari	105	159	264	45	92	137	30	75	105
Februari	54	78	132	43	56	99	31	38	69
Maret	355	368	723	32	76	108	13	35	48
April	48	54	102	29	54	83	20	40	60
Mei	39	45	84	35	65	100	10	61	71
Juni	48	55	103	45	125	170	37	125	162
Juli	133	196	329	276	844	1.120	37	125	162
Agustus	66	64	130	40	110	150	33	85	118
September	91	116	207	42	65	107	36	59	95
Oktober	104	80	184	15	40	55	9	33	42
Nopember	48	66	114	15	164	179	1	29	30
Desember	72	74	146	100	150	250	21	46	67
<b>JUMLAH</b>	<b>1.163</b>	<b>1.355</b>	<b>2.518</b>	<b>717</b>	<b>1.841</b>	<b>2.558</b>	<b>278</b>	<b>751</b>	<b>1.029</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Temanggung

- ❖ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pencari Kerja terbanyak ada di bulan Juli yaitu 276 Pencari Kerja, sejalan dengan lowongan yang ada sebanyak 1.120 lowongan kerja.
- ❖ Untuk memperoleh data tenaga kerja maupun jumlah pengangguran yang ada telah dibuat sistem aplikasi tenaga kerja.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp1.218.815.564,00 atau 90.01% dari total pagu sebesar Rp1.354.111.000,00.



Gambar 3.17. Jobfair Temanggung 2018

Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai

100% dan capaian realisasi keuangan 90.01%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.

- ❖ Pencapaian target kinerja tahun 2018, tidak terlepas keberhasilan program peningkatan kesempatan kerja yang meliputi:
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; dan
  - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Selain program yang telah dilaksanakan tersebut, berikut beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2018 untuk mengurangi angka pengangguran:

- ✓ Mengadakan *jobfair* atau bursa lowongan pekerjaan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda selama 2 hari. Kegiatan ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat Temanggung yang akan mencari pekerjaan.
- ✓ Menaikan upah minimum regional dari Rp1.431.500,00 menjadi Rp1.682.027,10

- ✓ Mewajibkan pekerja/buruh pabrik untuk menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional Tenaga Kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja bisa digunakan untuk meringankan beban tenaga kerja.
- ✓ pengembangan wilayah transmigrasi, dengan kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

## 2. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut :

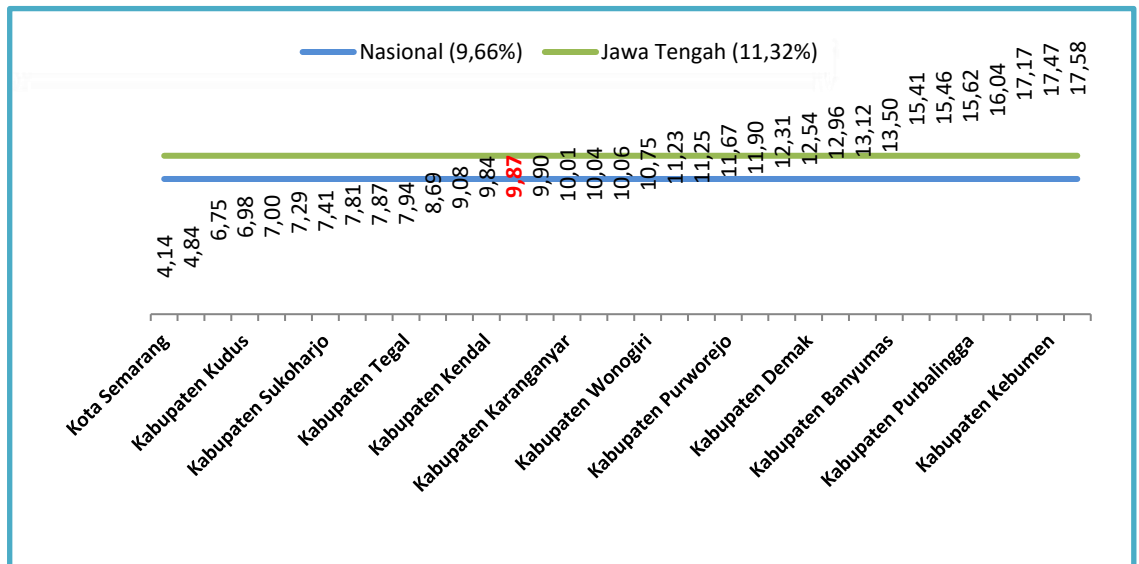
Tabel 3.19  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS : Menurunnya Tingkat Pengangguran												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Angka kemiskinan	%	13,3	11,5	100	12,2	11,06	100	11	9,87	100	11
Rata-rata capaian sasaran				<b>100</b>			<b>100</b>				<b>100</b>	

Ket. TK= Target Kinerja RK= Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerjasasaran “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin” dengan indikator angka kemiskinan di tahun 2018 telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 11% angka kemiskinan, berdasarkan penghitungan pada indikator di atas diketahui angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2018 telah berada pada angka 9,87%.
- ❖ Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun secara Nasional dapat dilihat pada grafik tingkat kemiskinan di bawah ini:

Tabel 3.20  
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah 2018



Sumber : BPS, data diolah

- ❖ Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 9,87%, menurun sebesar 1,59% dari jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2018 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,32%, tetapi sedikit dibawah tingkat Nasional yaitu sebesar 9,66%.

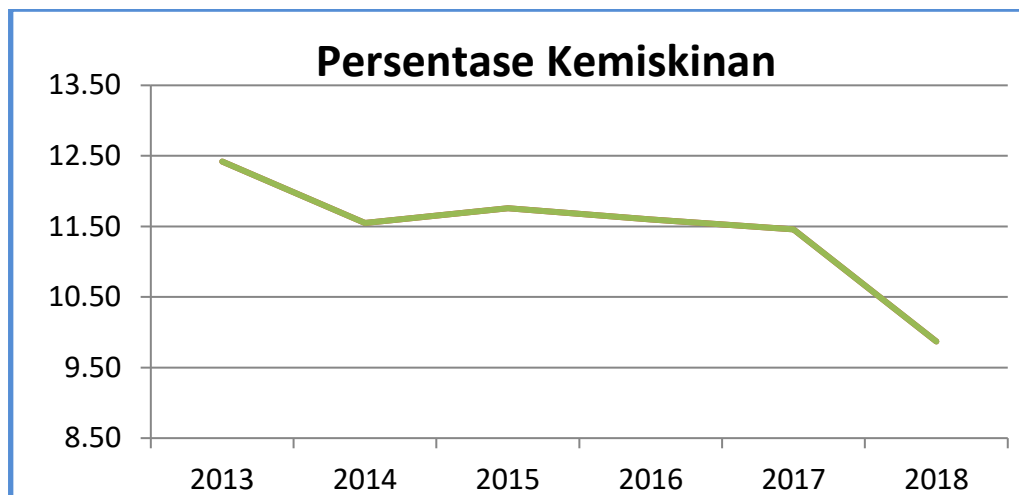
Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik di bandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya yaitu:

- Kabupaten Wonosobo (17,58%);
- Kabupaten Kebumen (17,47%);
- Kabupaten Purworejo (11,67%); dan
- Kabupaten Magelang (11,23%) .

Sedangkan dengan Kota Magelang kita berdada di bawahnya karena kota tersebut telah mencapai 7,87%.

- ❖ Sedangkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)  
Kab. Temanggung, Tahun 2013–2018

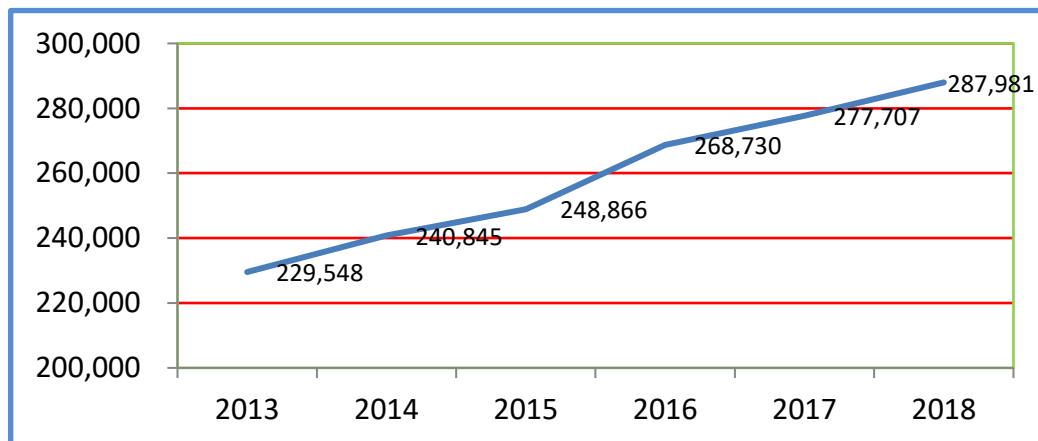


Sumber : BPS, data diolah

- ❖ Jika kita melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai 2018, maka persentase kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan kecuali pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan masih berada pada angka 12,42% kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 11,55%. Di tahun 2015 tingkat kemiskinan naik mencapai 11,76% kemudian turun menjadi 11,60% di tahun 2016. Mengalami penurunan sebesar 0,14% menjadi 11,46% di tahun 2017. Pada akhir tahun 2018 tercapai 9,87% turun sebesar 1,59% dibandingkan tahun 2017.
- ❖ Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai

penduduk miskin. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013–2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)



- ❖ Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2018 Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung naik sebesar Rp58.433,00 yaitu dari Rp.229.548,00 per kapita per bulan pada Tahun 2013 menjadi Rp.287.981,- perkapita perbulan pada Tahun 2018.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp5.029.846.199,00 atau 87.05% dari total pagu sebesar Rp5.778.094.050,00.  
Dengan capaian sasaran 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 87,05% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumber daya.
- ❖ Pencapaian target kinerja tahun 2018, tidak terlepas dari sinergi program penanggulangan yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain melalui:
  - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



- Program pembinaan anak terlantar
- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan
- Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan



*Gambar 3.18 Wakil Bupati Temanggung serahkan bantuan kepada warga miskin*

Berikut kami sampaikan data PMKS yang mendapat bantuan se Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.23  
**Data PMKS yang mendapat bantuan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PMKS	TANGGUNGAN JIWA	TOTAL	Yang menerima bantuan sosial											
					PKH	FM	WRSE	UT Pot	Tepi Hutan	ktk pm	per ma kanan	Adupenca	jslu	rtlh	ben cana	JML
1	BANSARI	1.385	5.117	6.502	926							27	16	1	1	970
2	BEJEN	1.480	4.044	5.524	1.283							10	30	2	-	1.323
3	BULU	3.117	7.666	10.783	2.373						20	9	18	25	11	2.431
4	CANDIROTO	2.784	6.766	9.550	1.567	30				1		4	49	11	1	1.652
5	GEMAWANG	2.726	6.091	8.817	1.745			30				7	29	13	3	1.814
6	JUMO	1.934	5.020	6.954	1.476							3	6	53	4	1.489
7	KALORAN	2.893	7.362	10.255	2.327		30					16	17	8	4	2.394
8	KANDANGAN	3.531	11.052	14.583	2.394			30				9	28	42	1	2.462
9	KEDU	2.252	6.210	8.462	2.175			30		3		8	20	22	14	2.250
10	KLEDUNG	716	2.251	2.967	1.128							11	5	10	2	1.146
11	KRANGGAN	1.793	6.428	8.221	984							8	34	14	-	1.026
12	NGADIREJO	5.291	93.358	98.649	3.699	30				2		-	12	26	10	3.753
13	PARAKAN	1.280	3.805	5.085	1.916		30	20				11	18	39	3	1.998

14	PRINGSURAT	3.795	7.643	11.438	1.343		30				44	19	29	31	1	1.466
15	SELOPAMPANG	1.572	4.944	6.516	1.024			10		3	69	11	15	16	-	1.132
16	TEMANGGUNG	3.974	9.006	12.980	1.825		30				176	14	37	11	-	2.082
17	TEMBARAK	3.651	12.606	16.257	1.400					1	62	9	2	4	2	1.476
18	TLOGOMULYO	1.786	5.642	7.428	1.008							6	9	10	-	1.023
19	TRETEP	868	2.321	3.189	1.035	30			20			-	12	58	3	1.100
20	WONOBOYO	1.642	5.498	7.140	1.325	30						18	14	18	11	1.398
	Total	48.470	212.830	261.300	32.953	120	120	120	20	10	371	200	400	414	71	34.385

- ❖ Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan adalah 48.470 jiwa, sedangkan PMKS yang mendapatkan bantuan ada 34.355 jiwa atau sebesar 70,88%.

Angka kemiskinan tercapai sesuai dengan target akhir RPJMD sebesar 11%. Meskipun target di akhir tahun RPJMD Tahun 2018 sudah tercapai, kedepan tetap perlu kerjasama seluruh *stake holder* untuk tetap fokus dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

Solusi untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Halini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya.

### 3. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketertiban dan keamanan, maka dilakukan pengukuran indikator kinerja menurunnya angka kriminalitas sebagai berikut:

Tabel 3.24  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan												
Indikator kinerja		Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD
			TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Menurunnya angka Kriminalitas	%	4,7	3,03	100	4,7	4,31	100	4,6	4,6	100	4,6
Rata-rata capaian sasaran					<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

Ket. TK= Target Kinerja RK= Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran “Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan” di Kabupaten Temanggung pada tahun ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target

4,6 angka kriminalitas, pada akhir 2018 berada pada angka 4,6. Dibandingkan tahun 2017 maka mengalami kenaikan sebesar 0,29 angka kriminalitas. Sedangkan dari sisi capaian indikator pada sasaran ini telah mencapai target 100%.

- ❖ Pada indikator sasaran ini dilihat dari 4 tahun terakhir menunjukkan konsistensi yang selalu tercapai 100%. Sehingga dengan ketertiban dan keamanan yang ada di Kabupaten Temanggung akan meningkatkan roda perekonomian maupun pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 4,6, maka capaian pada tahun 2018 dengan angka 4,6 sudah 100%, artinya target tersebut tercapai di akhir tahun periodisasi RPJMD.

Tingkat ketertiban dan keamanan dapat dilihat dari data angka kriminalitas yang terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Semakin tinggi angka kriminalitas, berarti tingkat ketertiban dan keamanan masyarakat semakin rendah. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan rumus jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Untuk mengetahui angka kriminalitas, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.25  
**Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2018**

No	Jenis Kriminalitas	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus narkoba	3	14	13	17	23	19
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	1	0	0	1	0
3	Jumlah kasus kejahatan seksual	3	6	11	19	20	11
4	Jumlah kasus penganiayaan	13	35	24	39	11	7
5	Jumlah kasus pencurian	64	97	134	117	201	54
6	Jumlah kasus penipuan	20	29	60	52	76	22
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	2	3	0	0	2
8	Jumlah Tindak Kriminal	104	184	245	244	332	115
9	Jumlah penduduk	739.873	731.061	788.264	803.745	769.843	780.148
10	Angka kriminalitas	1,41	2,49	3,11	3,03	4,31	0,015

Sumber: Kepolisian Resort Temanggung Tahun 2018

❖ Jika kita melihat angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, maka angka kriminalitas dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 angka kriminalitas masih berada pada angka 1,41 kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 2,49. Di tahun 2015 naik mencapai 3,11 kemudian turun menjadi 3,03 di tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kriminalitas naik pada angka 4,31 dan di tahun 2018 turun sebesar 4,29 dibandingkan tahun 2017.

❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp3.367.656.628,00 atau 93,04% dari total pagu sebesar Rp3.619.667.000,00.

Dengan target kinerja yang tercapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,04%, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

❖ Pencapaian target kinerja tahun 2018, tidak terlepas keberhasilan program sebagai berikut:

- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); dan
- Program pendidikan politik masyarakat.

Solusi untuk menurunnya angka kriminalitas Tahun 2018:

1. mengoptimalkan SDM yang ada guna melakukan upaya-upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara terpadu dan non yustisial.

2. Melaksanakan inisiasi kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar angka kriminalitas terus bisa ditekan meskipun sudah melebihi target sampai dengan akhir tahun RPJMD.



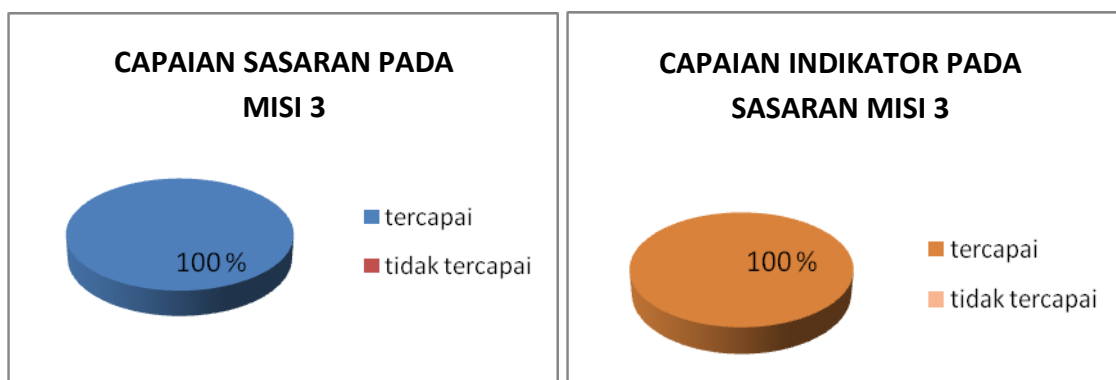
Gambar 3.19 Satpol PP Temanggung melakukan Razia pelajar dan bangunan yang tidak mempunyai ijin

Pada misi III yaitu “**mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan**” terdapat 2 sasaran yang merupakan sasaran ke 9 dan ke 10 dari keseluruhan sasaran strategis yang telah dilaksanakan yaitu.

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi III ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Tabel 3.26  
**Pencapaian Misi III dan Capaian Indikator Sasaran Misi III**



Dari 2 sasaran yang ada pada misi III, seluruh sasaran telah dilaksanakan dan telah tercapai sesuai dengan target (100 %). Untuk mengukur kinerja sasaran pada misi III telah ditetapkan 4 indikator kinerja, dimana seluruh indikator telah terlaksana sesuai dengan target (100%). Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi III adalah sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang menjadi sasaran strategis pada misi ke-3 diukur dengan melihat pencapaian 2 indikator kinerja yaitu Persentase Jalan yang menjamin Pengguna Jalan berkendara dengan selamat



dan nyaman dan Persentase minimal bencana yang terselesaikan. Capaian kinerja sasaran strategis 9 dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut :

Tabel 3.27  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9**

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Presentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman (%)	%	76	76,6	100	79	82,1	100	82	84,1	100	82
2	Persentase minimal bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran					<b>100</b>				<b>100</b>			<b>100</b>

Ket. RK = Realisasi CK = Capaian Kinerja TK = Target Kinerja

❖ Selama tiga tahun berturut turut (2016-2018) capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas infrastruktur” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, dan persentase minimal bencana yang terselesaikan dengan capaian kinerja dari sasaran ini 100% dari target yang ditetapkan.

❖ Panjang jalan di di Kabupaten Temanggung seluruhnya 739,127 km. Pencapaian pembangunan dan pemeliharaan jalan yang baik pada tahun 2018 sepanjang 621,992 km atau 82,15%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaiannya



Gambar. 3. 20 Pembangunan Jalan Pahlawan

telah melampaui (capaian 84,15%, target akhir RPJMD 82%). Target SPM Kementerian PUPR sebesar 60% pada tahun 2019 juga telah terlampaui. Dengan telah dicapainya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat sebesar 84,15%, maka jalan jalan di Kabupaten Temanggung telah bisa dinyatakan bahwa kondisi fungsi pelayanan jalan yang ada sudah layak untuk berkendara. Berikut kami sampaikan kondisi jalan di Kabupaten Temanggung.

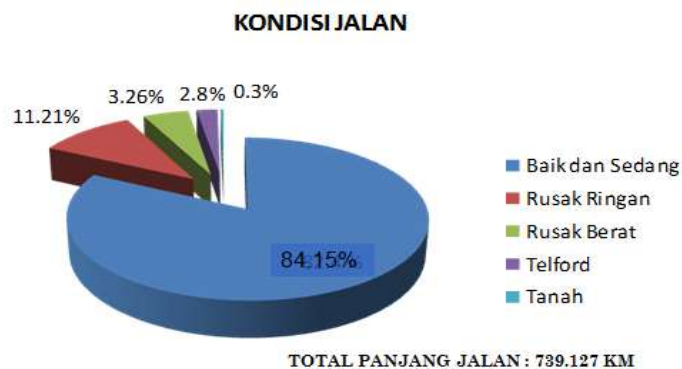
Tabel 3.28  
**Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

JENIS JALAN	KONDISI JALAN					
	PANJANG JALAN		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	(Km)	%	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)
ASPAL	657.823	89	499.936	74.801	73.287	739
BETON	58.391	7,9		57.438	9.569	443
TELFORD	20.696	2,8				20.696
TANAH	2.217	0,3				2.217
TOTAL	739.127	100	499.936	132.239	82.856	24.096
<b>Prosentase</b>			<b>67,6%</b>	<b>17,9%</b>	<b>11,21%</b>	<b>3,26%</b>

Sumber: DPUPKP 2018

Kondisi kelayakan jalan dapat diukur berdasarkan peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata cara, persyaratan, dan penetapan laik fungsi jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, kondisi jalan di Kabupaten Temanggung dapat disebut dalam kondisi baik (merupakan penambahan dari kondisi baik dan sedang).

Gambar 3.21  
**Kondisi Jalan Tahun 2018 Kabupaten Temanggung**



Pengukuran dampak (*Impact*) dari pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan melihat angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 329 kasus dengan korban jiwa sebanyak 58 orang meninggal dunia dan total kerugian materi sebesar Rp429.400.000,00. Angka kasus kecelakaan menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang terjadi sebanyak 337 kasus dengan korban jiwa 58 meninggal dan kerugian materi sebesar Rp313.000.000,00. Penurunan kejadian kasus kecelakaan di Kabupaten Temanggung, sebanyak 8 kejadian ini patut menjadi catatan mengingat pertambahan jumlah kendaraan dan mobilitas yang semakin tinggi. Data Angka Kecelakaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.29  
**Data Angka Kecelakaan di Kabupaten Temanggung**

NO	TAHUN	2016	2017	2018
1.	Total Kejadian	415	337	329
2.	Meninggal Dunia	80	58	58
3.	Luka Berat	0	2	1
4.	Luka Ringan	478	396	371
5.	Kerugian Material	642.800.000	313.000.000	429.400.000

Selain program yang dibiayai oleh APBD kabupaten, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mengupayakan pembangunan infrastruktur sektor jalan melalui pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN mengingat pentingnya sektor ini dalam memberikan *multiplier* efek bagi pembangunan di Kabupaten Temanggung. Beberapa diantaranya adalah Pembangunan Jalan Suwandi-Suwardi Cs, yang merupakan jalan utama di Kabupaten Temanggung, Penggantian Jembatan Progo Cs beserta Peningkatan jalan Nasional yang melalui Kabupaten Temanggung melalui kegiatan Preservasi Jalan Secang-Temanggung-bts Wonosobo melalui Dana APBN.

Indikator persentase minimal bencana yang terselesaikan dapat dilihat dari jumlah bencana yang ada dan dapat ditangani di Kabupaten Temanggung sepanjang Tahun 2018, dan capaian indikator kinerja utama ini 100%. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir bandang, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Temanggung juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran. Berikut daftar kejadian bencana dan yang tertangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 :

**Tabel 3.30**  
**Daftar Kejadian Bencana Yang Terjadi Dan Tertangani**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	Jenis Bencana	Status Korban	Nama Kepala Keluarga/Korban	Jumlah Korban			
					Dewasa		Anak-anak	
					L	P	L	P
1	Kedu	Angin	Mengungsi	Budiyono	2	2		2
2	Temanggung	Angin	Mengungsi	Bejo wahono	2	1		
3	Ngadirejo	Angin	Mengungsi	Tuwardi	2	2	1	
4	Bulu	Angin	Mengungsi	Jati Rukino	2	2		
5	Tretep	Kebakaran	Mengungsi	Imbuh		1		
6	Tretep	Kebakaran	Mengungsi	Juwahir	1	2		
7	Bulu	Angin	Mengungsi	Winarti	2	1		
8	Bulu	Angin	Luka ringan		1			
9	Kaloran	Angin	Mengungsi	Siti Abdiyah	1	1		
10	Candiroto	Longsor	Mengungsi	Lukito	2	1		1
11	Candiroto	Longsor	Mengungsi	Pujianto	3	2	1	
12	Kedu	Angin	Mengungsi	Maklah		1		
13	Bansari	Longsor	Meninggal	Saliyem		1		
14	Bansari	Longsor	Meninggal	Painten		1		
15	Tretep	Longsor	Luka ringan	Listofan	1			
16	Tlogomulyo	Angin	Mengungsi	Priyo	1	1		
17	Kaloran	Kebakaran	Mengungsi	Hardiyanto	2	2		1

18	Kaloran	Longsor	Mengungsi	Priyono	1	2	1	
19	Pringsurat	Longsor	Mengungsi	Emus	2	1		
20	Candiroto	Kebakaran	Mengungsi	Asiyono	1	1		
21	Ngadirejo	Kebakaran	Mengungsi	Suparti	2	1		
22	Tembarak	Kebakaran	Mengungsi	Rofik	2	2		
23	Tembarak	Angin	Mengungsi	Suprapti	1	2		
24	Bulu	Kebakaran	Mengungsi	Watukarung	2	3		
25	Ngadirejo	Kebakaran	Mengungsi	Katekan	1	4		
26	Kandangan	Angin	Mengungsi	Mukiyar	4	2		
27	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	Yaminah	1	1		
28	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	mujinah	1	1		
29	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	darsono	2	2		
30	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	zaenal	3	2		
31	Kedu	Kebakaran	Mengungsi	subaekah	1	1		
32	Kedu	Kebakaran	Luka ringan	adi suryono	1			
33	Jumo	Kebakaran	Luka ringan	rintoko	1			
34	Bulu	Kebakaran	Mengungsi	riyono	2	3		
35	Kandangan	Kebakaran	Mengungsi	danang	1	1		
36	Tlogomulyo	Kebakaran	Mengungsi	yamidi	3	2		
37	Tlogomulyo	Kebakaran	Mengungsi	ciptu	2	3		
38	Ngadirejo	Kebakaran	Mengungsi	turwanto	3	2		
39	Tretep	Angin	Mengungsi	mariyono	3	3	1	
40	Kledung	Kebakaran	Mengungsi	Sukarto	5	3	1	
41	Temanggung	Longsor	Meninggal	Dahono	1			
JUMLAH					68	63	5	4
					131		9	
JUMLAH TOTAL					140			

Sumber: BPBD Temanggung 2018

- ❖ Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:
  - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan;
  - Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan memakai pola skala prioritas terhadap korban bencana;

- Bekerjasama dengan SKPD lain yang mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam penanggulangan bencana;
  - Berkoordinasi dengan Instansi/ Dinas lain yang terkait secara Integral baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana;
  - Selalu mengadakan perbaikan terhadap manajemen bencana (*disaster management*);
  - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga terbentuk masyarakat tanggap bencana. Sosialisasi ini telah dilakukan sejak dini termasuk edukasi dan sosialisai pada anak-anak di tingkat pra sekolah atau taman kanak-kanak;
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini adalah sebesar Rp120.420.101.902,00 atau 88.19 % dari total pagu sebesar Rp136.540.403.303,00.

Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 100% dan capaian realisasi keuangan 88.19 %, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya. Efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar Rp23.225.186.244,00 antara lain disumbangkan oleh adanya Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses pelelangan sehingga ada efisiensi dari nilai penawaran lelang terhadap nilai perencanaan semula.

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur ini dipengaruhi oleh beberapa program yang meliputi:
- Program Pembangunan jalan dan jembatan;
  - Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
  - Program Pembangunan turap/talud/brojong;



Gambar 3.22 Jembatan Seroyo setelah dibangun

- Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
- Pengembangan Prasarana Perkotaan;
- Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar;
- Program Pemberdayaan jasa Konstruksi;
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- Program peningkatan pelayanan angkutan;
- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- Program Pengembangan Data/Informasi;
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Program Tanggap Darurat dan Logistik; dan
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Selain program diatas beberapa upaya untuk mencapai sasaran ini telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan jaringan irigasi dengan capaian kinerja pembangunan jaringan irigasi partisipatif maka pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaanya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani semakin besar. Kegiatan yang cukup menonjol yang



dapat kami laporkan adalah telah terbangunnya Bendung Progo Pistan di Kecamatan Jumo, Daerah irigasi tersebut direncanakan dengan panjang saluran 12,5 Km dengan total luas areal direncanakan 1108 Ha.



Gambar 3.23 DI Progo Pistan di Kec Jumo

Bendung Besar lain yang berhasil dibangun di Kabupaten Temanggung adalah Bendung Tingal dengan daerah irigasi yang terlayani sebagian meliputi:

Kecamatan Kaloran: Desa Geblog, Keblukan, Gandon, Tegowanuh, dan Gandulan dan Kecamatan Kranggan: Desa Kemloko, Klepu, Sanggrahan, Pendowo, Badran Bengkal, Pare Dan Kranggan. Total lahan yang akan diairi adalah 1355 Ha.



Gambar 3.24 Bendung Tingal di Kecamatan Kaloran



- Sedangkan untuk prosentase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi genangan telah tercapai 41 dan telah sesuai target tahunan dan target akhir RPJMD 40,7%. Pencapaian target ini selain dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan juga didukung oleh faktor geografis Kabupaten Temanggung yang berupa pegunungan saat ini tidak ada genangan air dan banjir di kawasan perkotaan.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berhasil meningkatkan rumah sehat dan layak huni yang tercermin pada meningkatnya jumlah rumah tipe A dan B serta berkurangnya rumah tipe C melalui berbagai kegiatan antara lain yang menonjol adalah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dari Jumlah penduduk di Kab. Temanggung sebanyak 804.051 jiwa, atau 251.915 KK ( Data Disdukcapil 2018 ) terdapat 197.722 unit rumah milik dari 202.851 unit rumah terbangun. Dari 197.722 unit rumah tersebut baru 175.731 unit rumah yang masuk kategori layak huni (88,87%) Penanganan yang telah dilakukan 2011 - 2018 sebanyak 10.229 unit rumah yang tersebar di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung.



Gambar 3.25 Pembongkaran RTLH bersama Gubernur Jateng

## 2. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis ini telah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.31  
Capaian Kinerja Sasaran 10

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria Baik (%)	%	30.25	30.25	100	30,5	34,9	100	31,25	34,89	100	31,25
2	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan	%	85	85	100	86	86.66	100	87	92	100	87
Rata-rata capaian sasaran					<b>100</b>			<b>100</b>				<b>100</b>

Ket. R K= Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja TK = Target Kinerja

- ❖ Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 2 indikator sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup capaian kinerjanya adalah sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian sasaran ini pada Tahun 2018 meningkat dari capaian Tahun 2017
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka rata-rata sasaran ini telah tercapai 100%. Dari 2 indikator yang ada telah tercapai melebihi angka yang di targetkan. Sehingga di akhir periode RPJMD indikator pada sasaran ini akan tercapai.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup ini adalah sebesar Rp6.619.554.975,00. atau 76.08% dari total pagu sebesar Rp8.701.176.900,00.

Dengan capaian indikator kinerja rata-rata 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 76.08%, maka dalam sasaran ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya.



Gambar 3.26 Taman Pengayoman

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut:
  - program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
  - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- ❖ Peningkatan realisasi kinerja Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan kriteria baik di Tahun 2018 dari tahun sebelumnya, tidak lepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memelihara dan meningkatkan RTH yang sudah ada/menciptakan RTH baru. Dari target 31,25% telah terealisasi sebesar 34,89%. Hal tersebut merupakan hasil dari penataan RTRW yang senantiasa dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan, maka langkah yang sudah baik dapat diteruskan dan peningkatan upaya dan peran semua pihak perlu terus dikembangkan. Tabel berikut menyajikan lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Temanggung:

Tabel 3.32  
**Daftar Taman Kota Kabupaten Temanggung Tahun 2018**

NO.	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
1	Taman Kota	Kecamatan Temanggung dan kecamatan Parakan (19 lokasi)	39,453.36 m <sup>2</sup>
2	Hutan Kota	Kecamatan Temanggung (2 lokasi)	10,950 m <sup>2</sup>
3	Pulau Jalan	Kecamatan Temanggung (7 lokasi)	342.51 m <sup>2</sup>
4	Jalur Hijau	Kecamatan Temanggung (13 lokasi)	7,921.10 m <sup>2</sup>
Jumlah Total			58,666.97 m <sup>2</sup>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung Tahun 2017*

- ❖ Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari menurunnya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama beberapa tahun terakhir. Berikut daftar Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018:

Tabel 3.33  
**Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kasus Lingkungan	5	1	8	6	9	17
2	Jumlah Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	5	1	8	6	9	17
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018*

- ❖ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengaduan masyarakat dari tahun 2013 sampai dengan 2018 cenderung meningkat, seiring dengan sikap kritis masyarakat dan juga semakin meningkatnya kegiatan masyarakat. frekuensi tindak lanjut pengaduan juga tergantung dari jumlah pengaduan yang masuk.

- ❖ Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan perhatian yang cukup serius terhadap capaian sasaran ini. Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diraih pada Tahun 2018 dalam hal kelestarian dan kebersihan lingkungan baik ditingkat nasional maupun provinsi, sebagai berikut:

1. Penghargaan Anugrah Adipura Tahun 2018



Gambar 3.27 Penerimaan Adipura Th 2018

2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 yaitu :
  - SMAN 1 Temanggung
  - SMP 2 Pringsurat
  - SMP 1 Parakan
3. Lomba Lingkungan Bersih Dan Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Peringkat Ke 3 Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
4. Kalpataru (Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup) antara lain :
  - Peringkat ke 6 Nama Sudi Hartino Jl.Cemoro Dieng,1 Km Rt.009 Rw.03 Desa Dadapan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung
  - Peringkat Ke 8 Nama Tuhar, Jl. Bumi Arum Rt.04 Rw.01 Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

- Peringkat Ke 4 Nama Kuwato,S.Pt, Soropadan Desa Watukumpul Kecamatan Parakan kabupaten Temanggung
- Peringkat Ke 5 Nama Nuryanti, Bangunsari Rt.01 Rw.08 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
- Peringkat Ke 7 Nama Agus Romadhon, Rt.03 Rw. 03 Dusun Kebumen, Desa Kebumen,Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung
- Peringkat Ke 1 Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
- Peringkat Ke 9 Kelompok Tani Makukuhan Mandiri JL. Raya Kedu,Gang III Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung



*Gambar 3.28. Taman Pancasila Temanggung*



# Misi Empat

Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal.

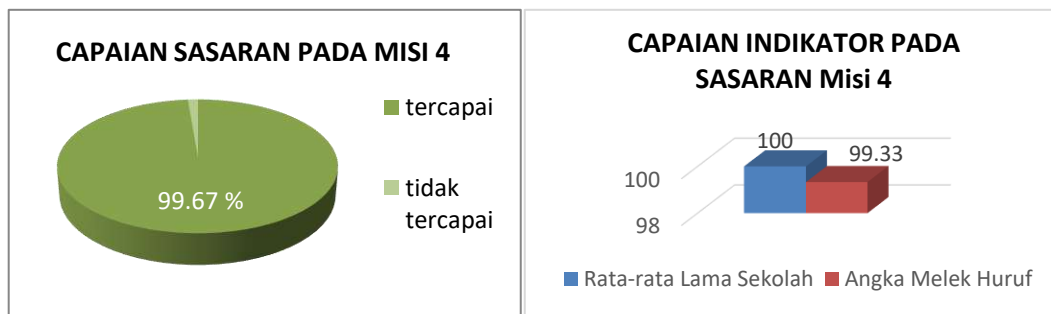
Padamisi 4 yaitu **Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal** memiliki sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan, dengan dua indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
2. Angka Melek Huruf (AMH)

Pencapaian misi dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel3.34

### Pencapaian sasaran dan Indikator misi 4



Dari 2 indikator sasaran yang ada pada misi 4, satu indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH) belum dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi 4 adalah sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis 11: Meningkatnya kualitas pendidikan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran initelah dilakukan pengukuran indikatorkinerja sebagai berikut :

Tabel 3.35

### Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan												
Indikatorkinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,15	6,55	91,61	7,17	6,90	96,23	7,19	7,19	100,00	7,19
2	Persentase angka melek huruf usia > 15 tahun	%	98,63	98,37	99,74	98,63	98,48	99,85	99,17	98,51	99,33	99,17
Rata-rata capaian sasaran					95,67			98,04			99,67	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

## 1. Rata-rata Lama Sekolah

- ❖ Data Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas sebesar 7.19 tahun, angka tersebut telah mencapai target kinerja tahun 2018 sebesar 7,19 tahun dan telah mencapai target akhir RPJMD. Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi dan Nasional digunakan data tahun 2017 karena belum ada rilis data tahun 2018 dari Provinsi dan Nasional. Berdasarkan data Pada tahun 2017 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,90 tahun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 7,27 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional tahun 2017 sebesar 8,10 tahun. Dengan angka tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hingga kelas 2 SMP. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-24 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih tertinggal di banding kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Tengah bahkan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke 5 dari 6 kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, maka rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 2 SMP, sedangkan rata-rata penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SMA. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 - 2018 menunjukkan tren peningkatan, hal ini berarti bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah semakin baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat sebagaimana berikut:
- ❖ Hambatan internal yang mempengaruhi rata-rata Lama Sekolah adalah:
  - Rendahnya kemampuan sebagian masyarakat membiayai pendidikan;
  - Persebaran penduduk yang tidak merata, letak geografis dan jarak yang jauh dari lokasi lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi;



- Belum tersedianya satuan pendidikan menengah di setiap kecamatan, ada beberapa kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah;
  - Belum memiliki perguruan tinggi negeri;
  - Belum adanya upaya bersama lintas Perangkat Daerah secara terorganisir dan simultan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung.
- ❖ Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya rata-rata Lama Sekolah adalah :
- Masih terdapat masyarakat yang memandang bahwa pendidikan itu tidak penting, sehingga menghambat program-program dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah;
  - Adanya sejumlah pihak yang memandang persoalan pendidikan secara parsial sehingga mengakibatkan berkembangnya isu dan iklim yang kurang kondusif bagi pelaksanaan program-program pembangunan bidang pendidikan;
  - Masih kurangnya komitmen dunia usaha dalam berperan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dengan masih banyaknya lowongan pekerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendidikan rendah;
  - Belum terintegrasinya data kependudukan dengan data pendidikan, sehingga data tingkat pendidikan belum termutakhirkan secara periodik.
- ❖ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, adalah:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dengan bekerjasama lintas sektor.
  - Meningkatkan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan pendidikan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan pendidikan.

- Meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menampung lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang lebih banyak, untuk mengurangi perpindahan lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
  - Melakukankerjasama, koordinasidansinkronisasidenganProvinsidalamrangkaintervensi kepe ndidikan menengah.
  - Penjajakan untuk melakukankerjasa mape manfaatan data kependudukan dengan instansi terkait.
- ❖ Perkembangan data Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2013 s/d 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36  
**Rata-rata Lama Sekolah**

No	Wilayah	2015	2016	2017	2017
1	Kab Temanggung	6,52	6,55	6,90	7,19
2	Prov Jawa Tengah	7,03	7,15	7,27	-
3	Nasional	7,84	7,95	8,10	-

Keterangan : Data BPS tahun 2018

## 2. Angka Melek Huruf

- ❖ Berdasarkan tabel 3.33 di atas AMH Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar 98,51% meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016. Akan tetapi capaian tersebut belum mampu memenuhi target akhir RPJMD. Terdapat kekurangan sebesar 0,66% untuk dapat mencapai target akhir RPJMD sehingga masih perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
- Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi dan Nasional digunakan data tahun 2017 karena belum ada rilis data tahun 2018 dari Provinsi dan Nasional. Berdasarkan data pada tahun 2017 Persentase Angka Melek Huruf Usia  $\geq 15$  tahun di Kabupaten Temanggung sebesar 98,51%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan

Persentase Angka Melek Huruf Usia  $\geq 15$  tahun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,99%, dan Persentase Angka Melek Huruf Usia  $\geq 15$  tahun Nasional tahun 2017 sebesar 95,92%.

- ❖ kegiatan pendukung dalam pencapaian AMH salah satunya adalah Pendidikan Orang Dewasa (POD) pada pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas. Layanan POD terdiri atas pendidikan keaksaraan dan



peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif.

Pendidikan keaksaraan merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan. Selanjutnya, mereka yang

telah memperoleh pendidikan keaksaraan dapat memperoleh pendidikan kesetaraan. Fokus 15

tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentas akan literasi dan akurasi dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usahamandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan.

- ❖ Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya indikator kinerja Angka Melek Huruf :
  - Masih rendahnya motivasi penduduk buta aksara untuk belajar.
  - Tidak adanya keberlanjutan program yang dilakukan secara massif dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dari masyarakat yang telah mengikuti kegiatan keaksaraan.
  - Minat baca dan budaya literasi yang masih rendah di masyarakat.

- ❖ Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya indikator Angka Melek Huruf adalah :
  - Persebaran penduduk buta aksara dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk membentuk satu kelompok pembelajaran keaksaraan.
  - Adanya anggapan bahwa pendidikan keaksaraan kurang mampu memberikan bekal untuk mengembangkan ketrampilan yang dapat menjamin warga belajar diterima di pasar kerja.
- ❖ Upaya-upaya yang dapat mendorong tercapainya indikator kinerja Angka Melek Huruf, adalah :
  - Peningkatan keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; pendidikan kesetaraan; dan penguatan lembaga satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat layanan bagi penduduk buta aksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program, Taman Bacaan Masyarakat, dan Sanggar Kegiatan Belajar sertapemberdayaan masyarakat melalui program desaliterasi, desavokasi.
  - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang dapat dilaksanakan melalui penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industry untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya, dan penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.
  - Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, dengan strategi penyesuaian pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
  - Meningkatkan akses masyarakat dengan layanan perpustakaan keliling.
  - Meningkatkan budaya literasi dengan membuat program-program unggulan yang dikemas secara menarik,

sehingga meningkatkan minat masyarakat. Berikut kami sampaikan data pengunjung dan peminjam buku Perpustakaan baik di Dinarpus Temanggung maupun Perpustakaan desa di tahun 2018:

Tabel 3.37  
Data pengunjung dan peminjam buku

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	PENGUNJUNG	PEMINJAM
1	DINARPUS	77.824	18.467
2	Perpustakaan Desa	491.846	490.651
Jumlah		569.670	509.118

Sumber : Dinarpus Temanggung 2018

- ❖ Dengan pencapaian kinerja yang dapat terealisasi di tahun 2018, maka sasaran akhir dari RPJMD hanya dapat dicapai pada indikator rata-rata lama sekolah, sedangkan indikator persentase angka melek huruf tidak dapat tercapai.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp100.226.839.285,00 atau 93.99% dari total pagu Rp106.638.386.201,00 sehingga terdapat efisiensi di sisi anggaran. Dengan pencapaian indikator kinerja yang dapat tercapai 99.67 % dan pencapaian realisasi keuangan 93.99%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.
- ❖ Beberapa program yang mendukung urusan pendidikan adalah sebagai berikut:
  - Program peningkatan sarana dan prasarana apartur
  - Program pendidikan anak usia dini
  - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - Program Pendidikan Non Formal
  - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - Program peningkatan peran serta kepemudaan
  - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Gambar 3.30 Pencairan BSM di Aula UPTD Kecamatan Temanggung

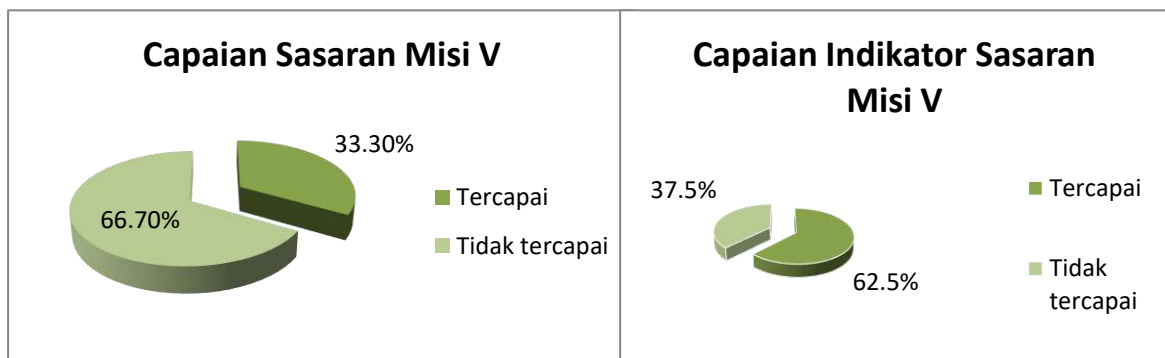
Pada misi lima yaitu **mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat** telah didukung dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu

Pencapaian Misi dan Sasaran Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38

### Pencapaian Sasaran dan Indikator Misi V



Dari 3 (tiga) sasaran yang ada pada misi V, 33,3% (satu sasaran) telah tercapai sesuai dengan target yaitu Meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang bermutu (100%) sedangkan 66,7% (dua sasaran) telah dilaksanakan tetapi belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (95,8%) dan sasaran Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga (77,1%).

Dari 8 indikator pada misi V ini capaian kinerja yang telah tercapai 100% ada 5 indikator kinerja (62,5%), sedangkan 3 indikator lainnya (37,5%) capaian kinerjanya belum tercapai sesuai target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi V adalah sebagai berikut:

## 1. Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.39  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat												
Indikator/kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per kilomil	101	93,2	100	100	67,5	100	100	87,6	100	100
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Per mil	13	12,7	100	12	13,2	90	11	12,85	83,2	11
3	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	0,3	100	<0,5	0,35	100	<0,5	0,3	100	<0,5
4	Angka harapan Hidup	tahun		75,27	-	-	75,41	100	-	75,43	100*	75,27
Rata-rata capaian/sasaran					100			96,7			94,4	

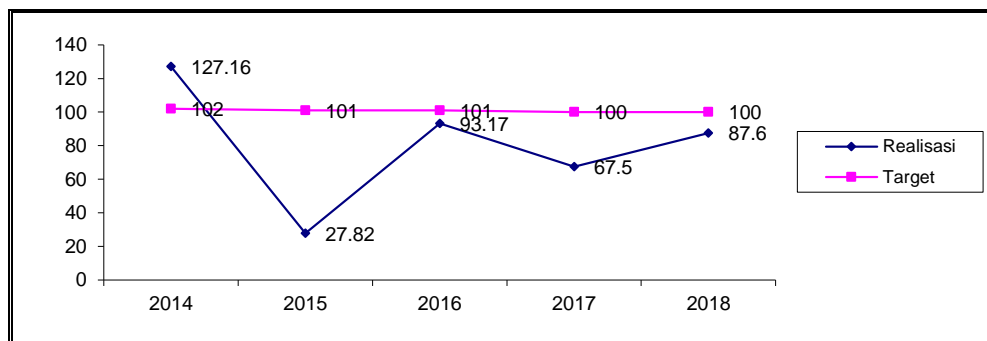
Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** diatas menunjukkan pencapaian 94,4% dari 3 indikator sasaran. Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat belum memperhitungkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) karena data belum dirilis oleh BPS.
- ❖ Dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 (76,6%), capaian tahun 2018 mengalami peningkatan (94,4%), tetapi bila dibandingkan tahun 2016 (100%) dan tahun 2017 (96,7%), capaian tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 94,4%, hal ini disebabkan Indikator Angka Kematian Bayi belum mencapai target (83,2%). Apabila dibandingkan dengan target nasional (32 per 1.000 kelahiran hidup) capaian AKB Kabupaten Temanggung sudah melebihi target nasional. Namun demikian beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu:



- Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, capaian tahun 2018 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 87,6 per 100.000 kelahiran hidup, begitu pula bila dibandingkan target nasional (116 per 100.000 kelahiran hidup). Berikut kami sampaikan target dan realisasi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung.

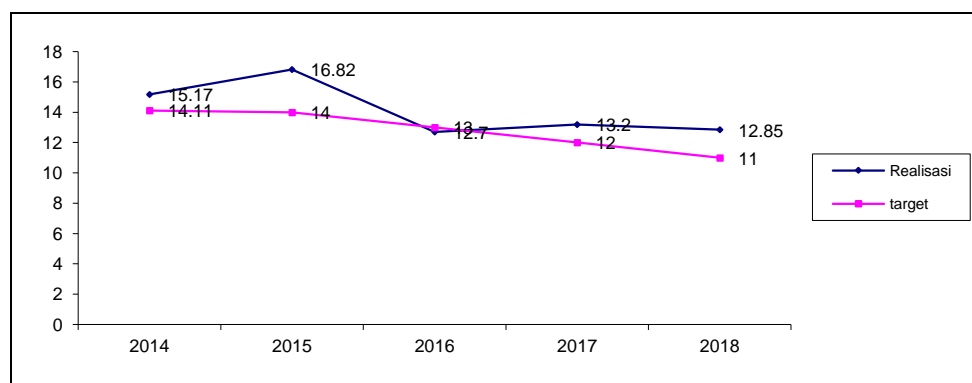
Tabel 3.40  
Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Temanggung 2018

- Realisasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup juga terlihat fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. AKB berhasil ditekan pada tahun 2016 dengan capaian 12,77 per 1.000 Kelahiran Hidup, tetapi tahun 2017 dan 2018 (12,85 per 1.000 Kelahiran Hidup) mengalami penurunan hingga capaiannya tidak memenuhi target. Namun demikian bila dibandingkan target nasional (24 per 1.000 Kelahiran Hidup) capaian AKB Kabupaten Temanggung sudah mencapai target, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.41  
Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018



- Penyebab dari kematian bayi yang masih tinggi diantaranya:
  - *Asfiksia* (Sesak nafas saat lahir)
  - Penyakit bawaan saat lahir (kelainan *kongenital*)
  - Berat Bayi Lahir Rendah (pola nutrisi ibu hamil yang buruk)
- ❖ Adapun alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah melalui:
  - Perbaiki Pola Nutrisi pada ibu hamil dengan adanya kelas ibu hamil;
  - Pelayanan persalinan 24 jam di puskesmas;
  - Peningkatan kemampuan kebidanan bagi tenaga bidan oleh tenaga ahli kebidanan;
  - Kunjungan Dokter spesialis kandungan/SpOG dan dokter spesialis anak ke tingkat dasar (puskesmas) untuk Deteksi dini resiko kehamilan dan penyakit penyerta pada bayi baru lahir;
  - Rujukan kasus resiko tinggi ke fasilitas rujukan (RS, Dokter spesialis kandungan/SpOG).
- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp80.677.862.724,00. dengan realisasi sebesar Rp67.582.878.936,00. atau 83.77%.

Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 94.40% dan capaian realisasi keuangan 83.77%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.
- ❖ Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu:
  - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
  - Program Perbaiki Gizi Masyarakat
  - Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

## 2. Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan pengukuran kinerja dengan tiga indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 42  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga												
Indikator/kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III	%	45,23	45,6	100	45,23	45,7	100	45,22	45,57	100	45,22
2	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III Plus	tahun	3,98	3,6	90,5	3,98	4	100	4,14	3,23	78,02	4,14
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63	0,98	44,4	0,62	0,86	59,7	0,6	0,88	53,33	0,6
Rata-rata capaian/sasaran					78,3			86,6			77,1	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

❖ Capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga”** di atas menunjukkan pencapaian 77,1%. Dari 3 indikator sasaran tersebut satu indikator sudah mencapai target yaitu indikator meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga sejahtera III, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target. Pembagian keluarga menurut kesejahteraannya ini didasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1992 dengan menggunakan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang sebagian besar pengetahuannya masih sederhana.

- ❖ Rendahnya capaian indikator kinerja Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2018 (0,88) dari target RPJMD sebesar 0,6 dan target Provinsi Jawa Tengah 0,79 menunjukkan masih belum efektifnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk. Namun demikian capaian Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan target nasional sebesar 1,36.
- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga mengalami fluktuatif dimana tahun 2015 tercapai (81,4%), menurun pada tahun 2016 (78,3%) mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 86,6%, kemudian turun kembali di tahun 2018 yaitu sebesar 77,1%.
- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga yang bermutu pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp8.360.835.800,00 dengan realisasi sebesar Rp6.740.561.462,00 atau 80,6%.
- ❖ Beberapa program telah dilakukan untuk mendukung sasaran ini sesuai Perjanjian Kinerja 2018 yaitu:
  - Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
  - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
  - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - Program Keluarga Berencana.

Untuk mendukung program pengendalian penduduk telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

  - ✓ Pelayanan KB gratis secara masal seperti Keluarga Berencana kesehatan Bhayangkara, Keluarga Berencana kesehatan TNI manunggal, Kesatuan gerak PKK, BBGRM;
  - ✓ Pelayanan KB secara rutin di masing-masing Fasilitas kesehatan KB (Puskesmas, Polindes/PKD, Rumah Sakit Pemerintah/ swasta, Dokter/ bidan praktek swasta);
  - ✓ Pemberdayaan petugas sampai klinik terbawah;
  - ✓ Advokasi kepada stake holder ;
  - ✓ Menjalani kerjasama dengan mitra kerja;

### 3. Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 43  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Akses masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran				100			100			100		

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

❖ Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu**” diatas menunjukkan pencapaian 100 % yang berarti bahwa semua penduduk miskin yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung semua terlayani meskipun tidak memiliki kartu BPJS karena dapat menggunakan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT). Jumlah pasien yang ditanggung dana JKT dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44  
Jumlah Pasien yang Dilayani Menggunakan JKT  
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

NO	PELAYANAN	2016	2017	2018
1	Rawat Jalan	2.438	2.557	1.678
2	Rawat Inap	2.504	2.371	1.460
3	Kontrasepsi KB Mantap Medis Operatif Wanita (MOW)	55	18	12
JUMLAH		4.997	4.946	3.150

Sumber : RSUD Kab. Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan pada jumlah pasien JKT atau jumlah penduduk miskin yang dilayani di RSUD Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 36,3% dari tahun 2017 meskipun semua pasien yang datang terlayani.

Capaian indikator kinerja TOI pada tahun 2018 sebesar 1,88 hari, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 1,12 hari, di bawah target 2 hari. Tingginya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit menunjukkan rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati semakin rendah. Meskipun demikian capaian ini masih masuk dalam *range* standar nasional (1-3 hari). Hal ini menuntut RSUD Kabupaten Temanggung untuk dapat meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan standar.

- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya, indikator pada sasaran ini selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada penduduk miskin selalu mendapat prioritas dan terdapat komitmen untuk melayani warga masyarakat tanpa memandang status sosialnya.
- ❖ Dengan melihat capaian indikator yang selalu konsisten tercapai selama 3 tahun terakhir, maka pada sasaran ini di akhir periode RPJMD tahun 2018 sudah tercapai.
- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang bermutu pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp158.220.464.374,00. dengan realisasi sebesar Rp142.938.826.742,00. atau 90,94%.  
Dengan capaian kinerja yang mencapai 100% dan realisasi anggaran tercapai 90,94%, maka pada sasaran ini telah terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu:
  - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
  - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
  - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD
  - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
  - Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
  - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
  - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- ❖ Untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan beberapa upaya antara lain :
1. Melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik pada Rumah Sakit Umum Daerah maupun pada Puskesmas-Puskesmas yang tersebar di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung.
  2. Telah melaksanakan penilaian akreditasi terhadap :
    - Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil Paripurna pada awal tahun 2017.
    - Puskesmas oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk Puskesmas Rejosari dengan hasil Madya pada tahun 2018, sehingga semua puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung (25 puskesmas) status puskesmasnya sudah terakreditasi dimana hal tersebut menjadi persyaratan untuk kerjasama dengan pihak BPJS Bidang Kesehatan, sedangkan 1 puskesmas (Banjarsari) yang merupakan puskesmas baru dan baru beroperasi tahun 2018 akan dilaksanakan proses penilaian akreditasi pada tahun 2020.
  3. Penerapan Sistem BLUD Puskesmas.  
 Pada akhir Tahun 2017 seluruh puskesmas telah dilaksanakan penilaian Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD oleh Tim penilai tingkat Kabupaten Temanggung dengan hasil BLUD penuh sehingga terhitung 1 Januari 2018 seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung (25 puskesmas) menerapkan Pelayanan BLUD secara penuh. Sedangkan untuk Puskesmas Banjarsari yang baru beroperasi awal tahun 2018 akan dilakukan penilaian Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD pada awal tahun 2019.

4. Perlu penyesuaian Struktur organisasi mendasari SK Bupati Temanggung yang berubah status dari RSUD type C menjadi RSUD type B.



Gambar 3.31 *RSUD Kabupaten Temanggung*

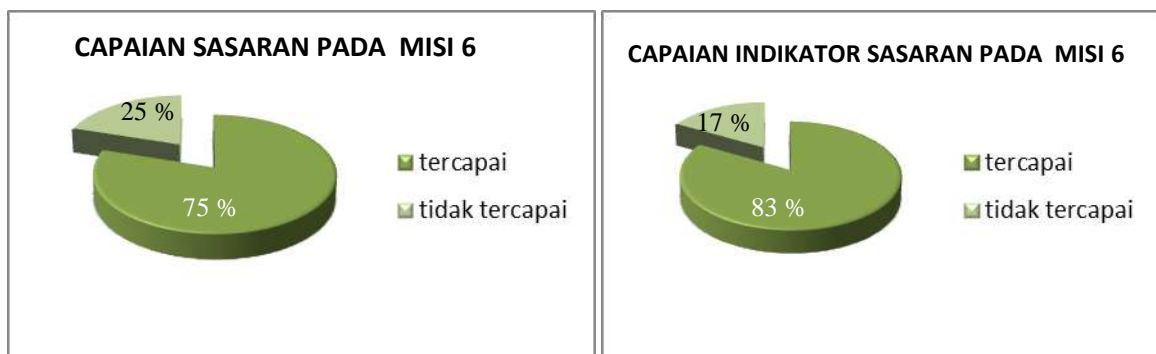


Pada misi VI yaitu **Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik** didukung dengan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah
2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Terwujudnya Pengelolaan *e-Government*

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi VI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.45  
**Pencapaian Sasaran dan Indikator Misi VI**



Dari 5 sasaran yang ada pada misi VI, 75 % (4 sasaran) telah tercapai sesuai dengan target, sedangkan 25 % (1 sasaran) telah dilaksanakan tetapi belum tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sasaran pada misi VI ini terdapat 6 indikator kinerja sasaran dimana 83 % (5 indikator) telah terlaksana, sedangkan 17 % (1 indikator) belum dapat terealisasi sesuai dengan target.

Upaya untuk mencapai misi keenam Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik tergambar dalam capaian sasaran sebagai berikut :

## 1. Sasaran Strategis 15: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.46  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah												
Indikator kinerja	Satuan	2015			2016			2017			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	indek	B (60)	CC (51,46)	85	B (60)	CC (58,32)	97,2	B (60)	CC (59,05)	98,4	B	
2. Nilai EKPPD	nilai	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat tinggi	
Rata-rata capaian sasaran				92,4			98,6			99,2		

Ket. TK= Target Kinerja; RK = Realisasi Kinerja; CK = Capaian Kinerja

❖ Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa Serta Lembaga Pemerintah” pada tahun 2018 sebesar 99,2 %, secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hal yang mendorong tingginya persentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain pada capaian untuk indikator Nilai EKPPD sebesar 100%, sedangkan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masih belum tercapai atau hanya sebesar 98,4%.

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2018 telah memperoleh nilai 59,05 atau kategori CC.

Jika dilihat dari capaian kerjanya maka capaian nilai SAKIP tahun 2017 yang diberikan di tahun 2019 telah mndapatkan predikat CC (nilai 59,05) dibagi target di tahun 2017 yaitu B (nilai 60), sehingga diperoleh capaian kinerja 98,4%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 0,73 poin. Beberapa unsur penilaian dalam LKjIP telah mengalami kenaikan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Jika dilihat target akhir RPJMD,

maka untuk SAKIP ini diperkirakan dapat tercapai pada penilaian SAKIP untuk Tahun depan predikat nilai B (nilai 60). Berikut kami sampaikan tabel penilaian SAKIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tebal 3.47  
Hasil penilaian SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	2013		2014		2015	2016	2017
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	35	15,16	30	14,80	16,39	18,11	<b>19,22</b>
b	Pengukuran Kinerja	20	7,63	25	9,53	10,95	14,20	<b>13,32</b>
c	Pelaporan Kinerja	15	8,29	15	8,67	10,01	9,49	<b>9,73</b>
d	Evaluasi Internal	10	3,26	10	4,23	4,40	4,83	<b>5,78</b>
e	Capaian Kinerja	20	11,35	20	9,24	10,02	11,69	<b>10,99</b>
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>45,69</b>	<b>100</b>	<b>46,47</b>	<b>51,77</b>	<b>58,32</b>	<b>59,05</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kiner</b>			<b>C</b>		<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>

Sumber data: Bagian Ortala Setda Tahun 2018

Berdasarkan Penilaian dari Kementerian PAN dan RB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Temanggung cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan dalam memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Namun demikian masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, antara lain :

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung (RPJMD) beserta Perangkat Daerah (Renstra) belum menetapkan indikator tujuan dan target keberhasilannya;
- Penetapan indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan dalam dokumen Renstra belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan dan kausalitas (hubungan sebab akibat) dengan dokumen RPJMD, RKT, Perjanjian Kinerja dan IKU sehingga mempengaruhi pencapaian sasaran strategis RPJMD;
- Penetapan target kinerja belum didukung dengan baseline data yang akurat dan andal;

- RPJMD dan Renstra SKPD belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan lain (RKT/ Perjanjian Kinerja/ RKPD/ Renja dan RKA), terutama untuk penetapan indikator dan target kinerja;
- Target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja belum digunakan untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;

## 2. Pengukuran Kinerja

- Sebagian indikator kinerja dalam IKU-SKPD belum selaras dengan IKU Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Kabupaten dan SKPD belum membangun sistem pengumpulan data kinerja (e-sakip) yang andal secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- Sebagian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen IKU belum dimanfaatkan sebagai indikator kinerja sasaran pada dokumen perencanaan strategis (RPJMD dan Renstra) serta dokumen perencanaan tahunan (RKT/ Perjanjian Kinerja/ RKPD/ Renja/ RKA);
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## 3. Pelaporan Kinerja

- LKjIP SKPD belum menyajikan informasi informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- Sebagian LKjIP SKPD belum menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya serta perbandingan lain yang relevan;
- Akuntabilitas keuangan yang dilaporkan dalam dokumen LKjIP masih sebatas informasi realisasi anggaran, belum menyajikan

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja masing-masing sasaran;

- Informasi kinerja dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi.

#### 4. Evaluasi Internal

- Evaluasi internal terhadap program dan kegiatan belum fokus pada pencapaian target hasil (outcome) dan hambatannya tetapi masih fokus pada penyerapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan;
- Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

#### 5. Capaian Kinerja

- Pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten pada tingkat output maupun outcome dinilai cukup baik namun demikian sebagian data kinerja yang dikumpulkan dinilai belum cukup andal.
- Capaian kinerja bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi cukup baik namun bidang ekonomi masih berada dibawah rata-rata kinerja di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata nasional;

Untuk peningkatan nilai SAKIP beberapa Perangkat Daerah telah melakukan perbaikan diantaranya:

1. Bappeda telah melakukan review RPJMD di tahun 2016 (Perbup No 69 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD 2013-2018) yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan review Renstra OPD baru.
2. Perubahan Perbup IKU bupati (IKU Bupati lebih makro)

3. Perjanjian kinerja dilakukan di depan Bupati secara langsung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja di masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan eselon terendah.
4. Capaian kinerja menjadi tanggungjawab semua perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang mendukung visi dan misi bupati
5. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Monitoring dan evaluasi renja Perangkat Daerah setiap 3 bulan oleh BAPPEDA
6. Monitoring dan evaluasi RKPK yang diinput setiap bulan dan dievaluasi setiap 4 bulan sekali oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Realisasi keuangan setiap bulan dengan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari pembuatan RKA/DPA, pembukuan keuangan, maupun barang oleh BPPKAD
8. Kementrian PAN dan RB telah mengeluarkan validasi kelas jabatan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah digunakan dalam pemberian TPP
9. Pegawai telah mendokumentasikan pekerjaannya setiap hari pada e-kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan pegawai

Dari hasil evaluasi, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk lebih mengefektifkan penerapan SAKIP, sebagai berikut:

- Memberikan perhatian khusus dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
- Melakukan reviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) sesuai kriteria indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/ Renstra/ IKU) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Perjanjian Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil;

- Membangun sistem pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
- Mempublikasikan setiap dokumen perencanaan (RPJMD/ Renstra/ RKT/ Perjanjian Kinerja/ RKPD/ Renja), dokumen-dokumen penganggaran (APBD/RKA/DPA), dokumen informasi kinerja (LKjIP) dan Laporan Keuangan (LKPD dan LRA-SKPD) melalui website sehingga dapat di akses dan diunduh oleh publik;
- Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja SKPD serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian reward & punishment;
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu sistem pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- APIP agar melaksanakan evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Temanggung.

## 2. Indikator Kinerja Nilai EKPPD.

Jika dilihat dari capaian kinerjanya maka capaian nilai Indikator Kinerja Nilai EKPPD tahun 2017 yaitu 100%, mencapai nilai sangat tinggi (nilai 3,05). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Temanggung telah mendapat nilai sangat tinggi sejak tahun 2012. Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai (scoring) total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja (95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (5%).

EKPPD terhadap LPPD, dilakukan dengan menggunakan cara *Desk Evaluation* dan *Common Sense Survey* (verifikasi lapangan). Berikut kami sampaikan data penilaian nilai EKPPD Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.48  
 Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Peringkat	26	89	22	58	24
2	Nilai	3.10	3.07	3.34	3.16	3.05
3	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST
4	Kepmendagri	No. 120-4761 Tahun 2014	No. 800-35 Tahun 2016	No. 120-10421 Tahun 2016	No. 100-53 Tahun 2018	Belum ditetapkan dalam SK
5	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai Tahun 2017 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam proses EKPPD juga dibuktikan dengan data dukung antara lain data tentang keuangan daerah, data perencanaan pembangunan daerah, data kepegawaian, data SOP, data aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Meskipun telah memperoleh nilai dengan kategori sangat tinggi, kedepan masih ada beberapa perbaikan diantaranya:

1. Keberadaan standar operating procedure (SOP) masih rendah;
2. Rasio PNS SKPD terhadap PNS se Kabupaten masih rendah;
3. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan masih sedikit;
4. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan masih sedikit;
5. Anggran SKPD terhadap total belanja APBD masih rendah
6. Belanja modal terhadap total belanja SKPD masih rendah;
7. Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD masih rendah;
8. Jumlah fasilitas / prasarana informasi masih kurang;
9. Keberadaan survey kepuasan masyarakat belum maksimal



Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan nilai EKPPD perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun SOP sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah
  2. Agar diisi oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan kepemimpinan
  3. Agar diisi oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan;
  4. Agar anggaran setiap SKPD disesuaikan proporsinya dengan belanja APBD;
  5. Agar meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja SKPD
  6. Agar meningkatkan proporsi belanja belanja pemeliharaan terhadap total belanja barang dan jasa SKPD
  7. Agar meningkatkan proporsi belanja belanja pemeliharaan terhadap total belanja SKPD
  8. Peningkatan fasilitas prasarana informasi;
  9. Agar dilaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❖ Dengan capaian sasaran yang telah mencapai 99,2 % di tahun 2018 (hasil evaluasi tahun 2017), maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah” diperkirakan dapat tercapai.
  - ❖ Untuk mencapai target sasaran ini Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:
    - ✓ Melakukan kerjasama dengan BPKP dalam mereviu baik LKjIP maupun LKPD
    - ✓ Menggunakan system aplikasi untuk memperoleh data/laporan yang valid
    - ✓ Melakukan evaluasi terhadap tupoksi di masing-masing Perangkat Daerah yang tumpang tindih
    - ✓ Melakukan evaluasi kelembagaan terutama untuk UPTD yang bersifat kewilayahan dihilangkan

- ✓ Membuat *Roadmap* Reformasi Birokrasi sebagai acuan menuju pemerintah yang bersih dan akuntabel
  - ✓ Meningkatkan pelayanan publik dengan menetapkan beberapa Perangkat Daerah menjadi Perangkat Daerah yang bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani
  - ✓ Melakukan fasilitasi dan pembinaan evaluasi Raperdes kekayaan desa
  - ✓ Melakukan penguatan dan pembinaan pengelolaan kekayaan (aset desa)
  - ✓ Peningkatan maturitas leveling sistem pengendalian intern pemerintah
  - ✓ Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas, adalah sebesar Rp31.766.742.808,00 atau 81,27% dari total pagu sebesar Rp39.089.746.300,00.
- Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 98,6% dan capaian realisasi keuangan 81,27%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah” dicapai dengan melaksanakan program :
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Program perencanaan pembangunan daerah
  - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
  - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Program Pendidikan Kedinasan
  - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - Program administrasi kepegawaian
  - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - Program Kerjasama Daerah
  - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Program Kerjasama Daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

## 2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan komparasi dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.49  
Capaian Kinerja Sasaran 16

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Indikator kinerja		Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD
			TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Opini Pemeriksaan BPK	nilai	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	*)		7,19
Rata-rata capaian sasaran					100		100			100		

Ket. : TK= Target Kinerja; RK = Realisasi Kinerja; CK = Capaian Kinerja

\*) Untuk tahun 2018 sampai dengan disusunya LKjIP, LKPD masih dalam proses pemeriksaan BPK,

- ❖ Pada Indikator kinerja “Opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk tahun 2018 sampai penyusunan LKjIP ini belum diketahui realisasi capaiannya karena LKPD masih dalam proses pemeriksaan BPK. Sejak tahun 2012 selama 6 (enam) tahun berturut-turut Kabupaten Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- ❖ Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk indikator Opini pemeriksaan BPK selama 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai target yaitu WTP.
- ❖ Dengan capaian kinerja yang telah tercapai 100% di tahun 2016 dan 2017, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu “meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan akan tercapai. Sampai dengan saat ini audit BPK sedang dilaksanakan sehingga hasil laporan keuangan untuk tahun 2018 belum ada.
- ❖ keuangan daerah” diperkirakan dapat tercapai di tahun 2018.



Gambar 3.32 Penyerahan Opini WTP

Hal tersebut artinya di Kabupaten Temanggung sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan, dan secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Audit Pemerintah (SAP) Maka pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Meskipun masih ada beberapa temuan, melalui Inspektorat beberapa Perangkat Daerah segera menindaklanjutinya sehingga kekurangan yang ada bisa diminimalisir. Berikut kami sampaikan data temuan hasil pemeriksaan oleh BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan 2018:

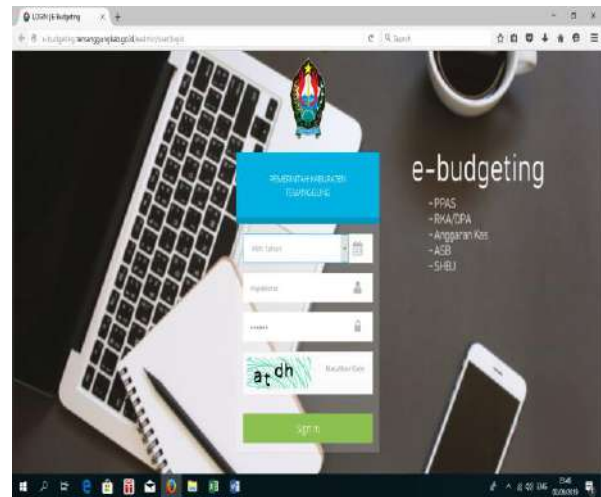
Tabel 3.50  
**Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut  
 Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013-2018**

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	28	65	65	100	-	-	-	-
2	2014	22	82	75	91	7	9	-	-
3	2015	14	28	26	93	2	7	-	-
4	2016	20	82	70	85	12	15	-	-
5	2017	9	27	20	74	7	26	-	-
6	2018	*)							

\*) Untuk tahun 2018 sampai dengan disusunnya LKjIP, LKPD masih dalam proses pemeriksaan BPK,

- ❖ Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah digunakan sumber daya keuangan sebesar Rp7.947.225.927,00 dari total anggaran sebesar Rp9.030.251.042,00 atau sebesar 88,01%.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dicapai dengan beberapa program yaitu:
  - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
  - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

❖ Untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung. telah membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*) yang terintegrasi sehingga perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.



Gambar 3.33 Aplikasi e-budgeting

### 3. Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.51  
Capaian Kinerja Sasaran 17

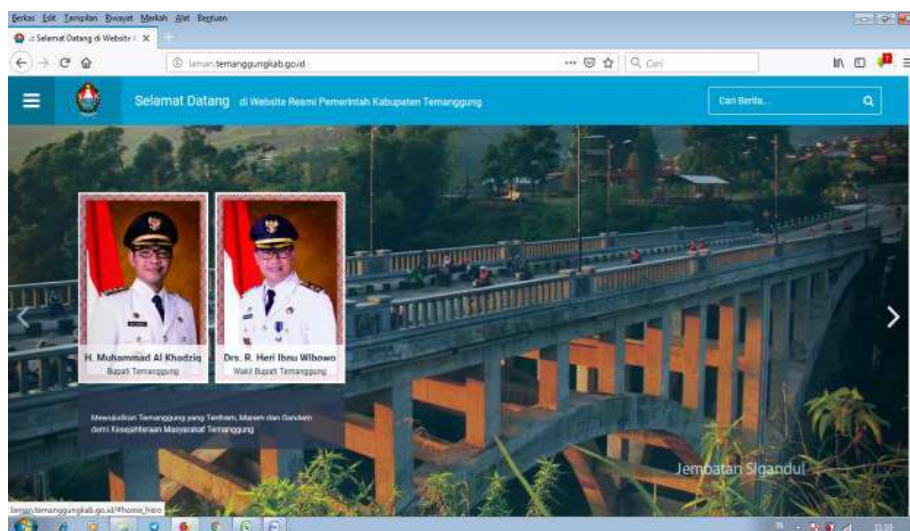
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tahun	75	75	100	B	B	100	B	100	100	100	
2. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	82,1	100	84,4	84,4	100	98	98	100	
Rata-rata capaian sasaran				91			92,2			99		

Ket. TK = Target Kinerja RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

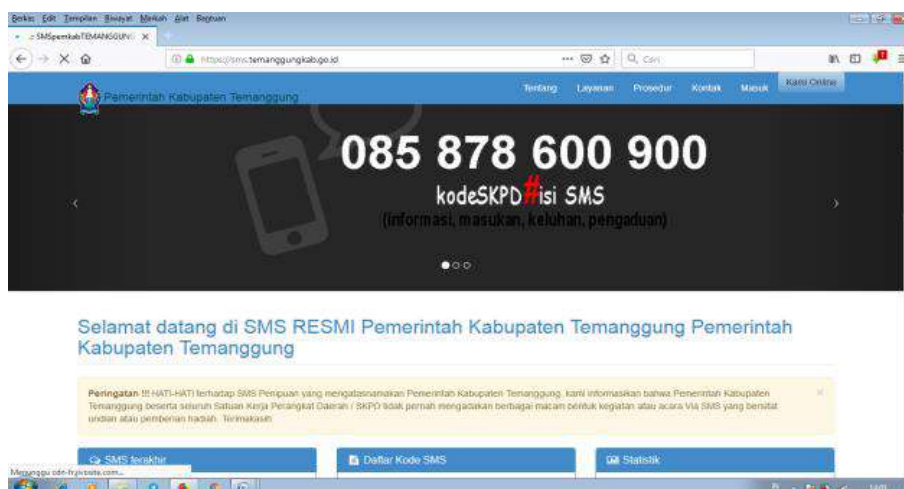
❖ Capaian kinerja indikator pada “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” ini belum tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2018 sebesar 99%.

❖ Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai 100% sesuai dengan target. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 telah dilaksanakan pada 19 perangkat daerah secara mandiri. Dari Hasil survey tersebut diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat kriteria “B” dengan nilai 79,95. Jika dibandingkan dengan perolehan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada 70 satuan pendidikan, DPMPTSP dan DINDIKPORA realisasi kinerja indikator ini masih sama yaitu mendapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat “B”. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran IKM, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan yang membangun melalui:

- a. website resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

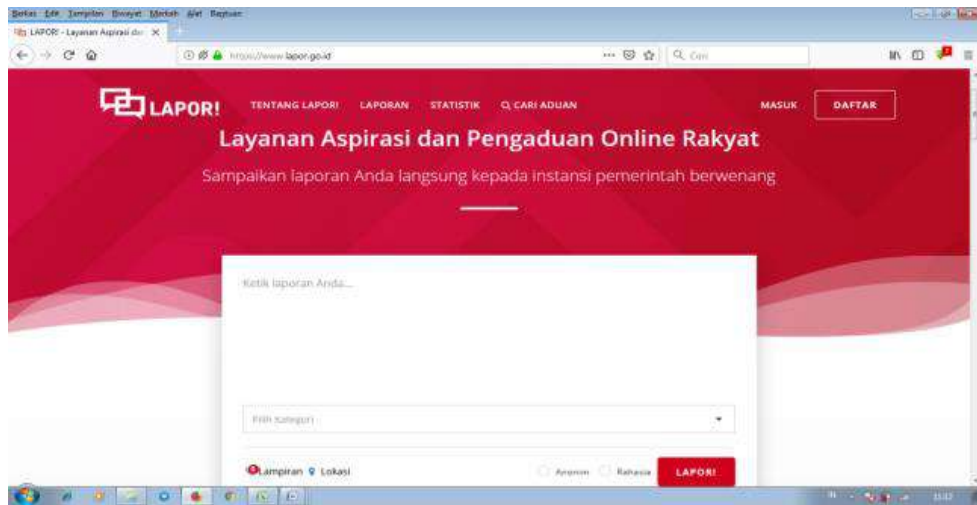


- b. [email@temanggungkab.go.id](mailto:email@temanggungkab.go.id)
- c. SMS Gateway 0857878600900





d. Lapori SP4N



e. Media Sosial



f. Menulis pada kotak saran pengaduan di semua Perangkat Daerah





Kepedulian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan dan saran melalui kanal resmi yang disediakan pemkab seperti SMS Gateway, Lapor SP4N, email, media sosial pemkab, kotak aduan sangat dinamis. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.52  
**Penanganan Pengaduan Masyarakat**

No	Tahun	Jumlah		%
		Pengaduan	Tindaklanjut	
1	2016	1.253	1.029	82,12
2	2017	1.321	1.115	84,40
3	2018	625	591	95

Suber: Bagian Humas Setda

Penanganan aduan masyarakat di tahun 2018 belum bisa tercapai 100%, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, prosentase penanganan aduan dan tindak lanjut oleh perangkat daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penanganan aduan masyarakat dalam tabel diatas merupakan gabungan keseluruhan jumlah aduan masyarakat dari Bagian Humas melalui SMS Gateway Pemkab 085787600900, Disdukcapil melalui SMS Gateway Capil 08562522277, dan DMPTSP melalui layanan kotak aduan.

Dengan banyaknya aspirasi, saran, masukan, keluhan dan aduan yang masuk menggambarkan bahwa adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Temanggung. Berikut kami sampaikan hasil penilaian ombudsman RI terkait dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung

Tabel 3.53  
**Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2013-2018**

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2015	34,46	Merah
2	2016	59,76	Kuning
3	2017	55,50	Kuning
4	2018	84,45	Hijau

❖ Capaian kinerja yang sudah terealisasi 99% di Tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” mendekati sempurna 100%.

❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran diatas, adalah sebesar Rp9.705.392.697,00 atau 92,63% dari total pagu sebesar Rp10.477.811.150,00.

Capaian indikator kinerja sebesar 99% dan capaian realisasi keuangan sebesar 87,26%, hal ini menunjukkan bahwa sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mendukung sasaran ini, telah dilaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan disektor publik diantaranya:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

#### 4. Sasaran Strategis 18 : Terwujudnya pengelolaan e-Government

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 18, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.54  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya pengelolaan e-Government												
Indikator kinerja	Satuan	2016			2017			2018			Target Akhir RPJMD	
		TK	TK	TK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1. Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	55	55	100	75	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata capaian sasaran				100			100			100		

Ket : TK=Target Kinerja, RK = Realisasi Kinerja, CK = Capaian Kinerja



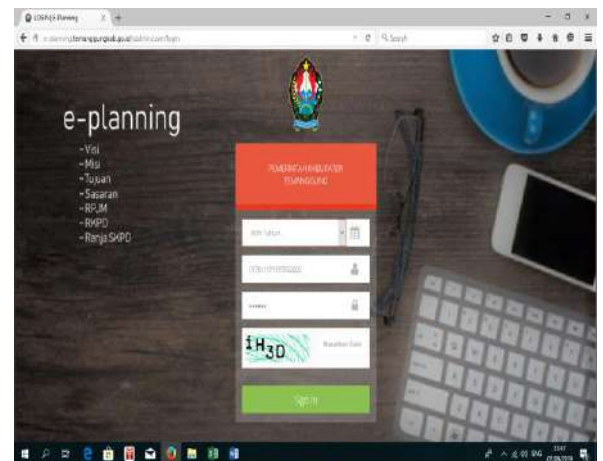
Gambar 3.39 Pelayanan Perijinan di DPMPTSP Kabupaten Temanaauna.

- ❖ Realisasi kinerja indikator pada sasaran “terwujudnya pengelolaan e-Government” dengan indikator kinerja cakupan jaringan sistem informasi e-Government tercapai 100% (dari target 100 % terealisasi 100 %).
- ❖ Pencapaian target kinerja sasaran sudah sesuai target yang ditetapkan. Aplikasi sistem informasi e-government yang dibangun/dikembangkan baik oleh PD/Unit Kerja maupun dari Pemerintah Pusat dan Provinsi telah mencakup seluruh Perangkat Daerah, UPT, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa.

Pada tahun 2018 ini juga telah dikembangkan beberapa sistem informasi, sebagian aplikasi telah terintegrasi antara lain :

- Sistem Informasi Perencanaan (<http://e-planning.temanggungkab.go.id/>) integrasi dengan Sistem Informasi Penganggaran (e-budgetting)
- Sistem Informasi Penganggaran (<http://e-budgeting.temanggungkab.go.id/>) integrasi dengan Sistem Informasi Penganggaran (e-planning)
- Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (<http://e-monev.temanggungkab.go.id/>)
- Aplikasi Retribusi Pasar online (<http://eretribusipasar.temanggungkab.go.id/>), sistem pembayaran non tunai dalam membayar retribusi pedagang pasar dengan melakukan tap kartu e-retribusi pada mesin Mpos.
- Aplikasi Risalah DPRD (<http://e-risalah.temanggungkab.go.id/>), merupakan aplikasi pencatat risalah rapat/siding DPRD dengan metode voice to text.

Daftar Aplikasi Sistem Informasi e-Government yang tersedia meliputi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagai berikut:



Gambar : 3.40 Tampilan aplikasi e-Kinerja Kabupaten Temanggung

Tabel 3.54  
**Tabel Aplikasi e-Government  
Kabupaten Temanggung**

No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tip e	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Website Portal Kabupaten Temanggung (temanggungkab.go.id)	Portal Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	Bagian Humas, Setda	G2C	Link dengan Aplikasi di Data Center Pemda
2	sms Gateway Kabupaten Temanggung(sms.temanggungkab.go.id)	Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sms	Bagian Humas, Setda	G2C	Server Colocation di Data Center Pemda
3	jdih.temanggungkab.go.id	Informasi Peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum, Setda	G2C	Server Colocation di Data Center Pemda
4	ppid.temanggungkab.go.id	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	G2C	Server di Data Center Pemda
5	Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Terpadu (gandem.temanggungkab.go.id) dan sisfo pusdat (mobile app)	Pusat informasi data terpadu (integrasi data)	Dinas Komunikasi dan Informatika	G2C	Integrasi data dengan Bank Data, Data Penduduk dsb
6	data.temanggungkab.go.id	Open Data	Dinas Komunikasi dan Informatika		Integrasi data dengan data.jatengprov.go.id
7	bankdata.temanggungkab.go.id	Informasi data pembangunan	Dinkominfo	G2C	Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
8	SIM PKB	Pelayanan PKB	Dinas Perhubungan	G2C	-
9	SIM Angkutan	Pelayanan Pengelolaan data dan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	G2C	-
10	Aplikasi KTP-el	Pelayanan KTP elektronik	Dindikcapil	G2C	Integrasi Data dengan Aplikasi Perizinan, Aplikasi Pendapatan dan Aplikasi Puskesmas, DPU dan pelayanan Lainnya
11	Sistem aplikasi pelayanan Kependudukan	Pelayanan Kependudukan (KK,KTP,NA, Surat menyurat, monografi)	Dindikcapil dan Kecamatan	G2C	Server di Dukcapil
12	Aplikasi Pemutakhiran penduduk	Pemutakhiran data penduduk	Dindikcapil dan 289 Desa/ Kelurahan	G2C	Server di Dindikcapil
13	sms center capil	Pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui sms	Dindikcapil	G2C	Server di Dindikcapil
14	perijinan.temanggungkab.go.id	Informasi dan Pelayanan Perizinan online	DPMPPTSP	G2C	Terintegrasi dengan data kependudukan di Data Center
15	SIMTAP	Pengelolaan Data Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP	G2C	Server Local DPMPPTSP
16	sipd.temanggungkab.go.id	Informasi profil daerah	Bappeda	G2C	Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
17	Website Perangkat daerah	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	Seluruh OPD (48 OPD)	G2C	Terintegrasi di Data Center
18	Website Kecamatan	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	20 Kecamatan	G2C	Terintegrasi di Data Center

19	Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	20 Kecamatan	G2C	Terintegrasi di Data Center
20	Sistem Informasi Desa /Website Desa / Kelurahan	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	266 Desa, 23 Kelurahan	G2C	Terintegrasi di Data Center
21	Anjungan Informasi Kepegawaian	Informasi kepegawaian untuk masyarakat	BKPSDM	G2C	Colocation Server di Data Center
22	lpse.temanggungkab.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah online	Bagian Pembangunan, Setda	G2B	Server di Data Center, terintegrasi dengan SIRUP LKPP
23	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Merencanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Bagian Pembangunan, Setda	G2B	Terintegrasi dengan LPSE, Server di LKPP
24	Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi (cellplan.temanggungkab.go.id)	Pelayanan permohonan rekomendasi Cell Plan untuk pendirian menara telekomunikasi	DPMPTSP	G2B	Server di Data Center
25	e-planning (e-planning.temanggungkab.go.id)	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	G2G	Terintegrasi dengan e-budgetting dan e-monev
26	Sistem Informasi Monitoring dan evaluasi (e-monev.temanggungkab.go.id)	Aplikasi Monitoring dan evaluasi pembangunan	Bappeda	G2B	Terintegrasi dengan e-planning dan e-monev
27	Aplikasi Analisis Kemiskinan (simdkt.temanggungkab.go.id)	Pengolahan data RTM	Bappeda	G2B	Server di Data Center
28	Aplikasi Mapatda (mapatda.temanggungkab.go.id)	Pengelolaan data Pendapatan Daerah dari sektor pajak	BPPKAD	G2B	Terintegrasi dengan Data Penduduk dan GIS Server di Data Center
29	Sistem akuntansi keuangan Daerah (SIKAD)	sistem akuntansi berdasar akrual	BPPKAD, Seluruh OPD, UPT/Unit Kerja	G2G	Dekstop base, Standalone
30	Aplikasi Barang Daerah (simbada.temanggungkab.go.id)	Pencatatan Barang Daerah online untuk seluruh Perangkat Daerah	BPPKAD	G2G	Server di Data Center
31	Aplikasi Penatausahaan Keuangan	sistem Pembukuan keuangan	BPPKAD, Seluruh OPD, UPT/Unit Kerja	G2G	Dekstop base, Standalone
32	sismiop.temanggungkab.go.id	Pengelolaan data PBB P2 online	BPPKAD	G2G	Terintegrasi dg Data Penduduk, GIS, Server di data Center
33	Aplikasi PBB	Pengelolaan Pembayaran PBB Kelurahan / Desa	BPPKAD, Kecamatan, Kelurahan/ Desa	G2G	Terintegrasi dengan Data Penduduk, GIS, Server di Data Center
34	SimGaji	Pengelolaan gaji pegawai	BPPKAD	G2G	Dekstop base, Standalone
35	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan daerah (sibangda.temanggungkab.go.id)	Melaporkan kegiatan maupun program semua SKPD setiap bulan	Bagian Pembangunan Setda	G2G	Terintegrasi dengan aplikasi Monev Bappeda
36	GIS RTRW	Peta RTRW	Bappeda	G2G	Dekstop base, Standalone
37	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Pengelolaan data kepegawaian	BKPSDM	G2G	Terintegrasi dg Aplikasi Presensi & TPP, Kinerja, Server di Data Center
38	Aplikasi absensi online (absensi.temanggungkab.go.id)	Pengelolaan absen dan tunjangan pegawai online	BPSDM	G2G	Integrasi dengan Mesin Presensi, SIMPEG dan TPP

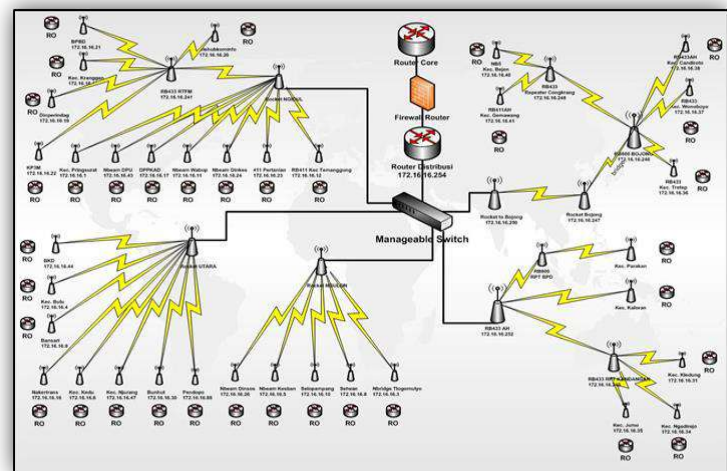
39	Aplikasi jabatan fungsional /e-fungsional	Pengelolaan data jabatan fungsional	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
40	PCAP system	Mengetahui data PCAP	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
41	Aplikasi Pelayanan Satu Pintu	Pelayanan kepegawaian satu pintu online	BPSDM	G2G	Colocation Server di Data Center
42	Aplikasi Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar (Sikejar)	Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
43	Aplikasi Penyusunan Formasi Pegawai (e-formasi)	Penyusunan Formasi Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
44	Aplikasi pengelolaan data Diklat Pegawai (e-diklat)	Pengelolaan data Penghargaan Diklat Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
45	Sisfo Setyalencana	Pengelolaan data Penghargaan Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
46	Aplikasi Pengelolaan kasus pegawai (e-Kasus)	Pengelolaan data kasus pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
47	Aplikasi Baperjakat	Pengolahan data bahan Baperjakat	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
48	e-Filling	Pengelolaan Dokumen File Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
49	Simpedes	Pengolahan data Perangkat Desa	Bagian Pemdes Setda	G2G	Intranet Server di Bagian Pemdes
50	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu	pelaporan online dari Puskesmas setiap bulan	Dinas Kesehatan	G2G	Colocation Server di Data Center
51	Sistem tanaman pangan	data base tanaman pangan	Dintanpangan	G2G	-
52	Sistem informasi pangan strategis	data base tanaman pangan	Dintanpangan	G2G	-
53	Sistem Informasi statistik hortikultura	Pengolahan data statistik hortikultura	Dintanpangan	G2G	-
54	e-office.temanggungkab.go.id	Surat Online	Dinkominfo	G2G	Terintegrasi di Data Center
55	tpp.temanggungkab.go.id	Pengelolaan TPP berdasar Kelas Jabatan	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi Kinerja
56	kinerja.temanggungkab.go.id	Pengelolaan kinerja harian pegawai	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi TPP
57	kinerja.temanggungkab.go.id/anjab	Pengelolaan Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg
58	Aplikasi Perhitungan Neraca Bahan Makanan	Perhitungan Neraca Bahan Makanan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
59	Aplikasi Pemetaan SKPG	Pemetaan SKPG	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
60	Aplikasi Pemetaan Rawan Pangan	Pemetaan Rawan Pangan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
61	Aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH)	Data Pola Pangan Harapan (PPH)	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
62	SIM TP	Pengolahan data statistik Ketahanan Pangan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
63	Sistem Keudes	Pengelolaan & pelaporan keuangan Desa	Desa	G2G	Dekstop base Standalone
64	Aplikasi Profil Desa	penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan	Dinpermades, Desa/Kelurahan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
65	SIM Perlengkapan Jalan	Pelayanan Pengelolaan data Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	G2G	Intranet Server di Dishub
66	Dapodik	Data Pokok Pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	G2G	



67	SIK Konsolidasi	Konsolidasi data penduduk	Dindikcapil, Desa	G2G	Server di Dindikcapil
68	SIMWAS	Manajemen Informasi pengawasan	Inspektorat	G2G	Colocation Server di Data Center
69	Arsip digital	Digitalisasi arsip	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
70	Otomasi Perpustakaan Slim 7 Cendana	Pelayanan perpustakaan daerah	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
71	Aplikasi SENAYAN	Manajemen perpustakaan	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
72	SPIPISE	Pengolahan data penanaman modal	DPMPTSP	G2G	Intranet server di DPMPTSP
73	Aplikasi pendataan industri kecil dan menengah	pendataan industri kecil dan menengah	Disperindagkop dan UMKM	G2G	Intranet server di Dis - perindagkop dan UMKM
74	SIKtoAFis	sinkronisasi data SIK dan e-KTP	Dindikcapil	G2G	Server di Dindikcapil
75	SIMRS/Billing System	Pelayanan pasien	RSUD	G2C	Intranet server di RSUD
76	SIMPUS (dashboardsimpus.temanggungkab.go.id)	Sistem Informasi Pelayanan Pasien Puskesmas	Seluruh Puskesmas	G2C	Colocation di Data Center
77	Sistem Informasi PMKS dan PSKS	Pengolahan data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	G2G	Server di Dinas Sosial
78	GIS Pertanian	Informasi data spasial Pertanian	Dintanbunhut	G2G	Desktop base, Standalone
79	SimDPU (Smart Office)	Portal Sistem Informasi DPUPKP	DPUPKP	G2G	Intranet server di DPUPKP
80	tataruang-dpupkp.temanggungkab.go.id	Sistem Informasi Tata Ruang	DPUPKP	G2G G2C	Hosting di Datacenter
81	SIM Perparkiran	Pengelolaan data parkir	Dinas Perhubungan	G2G	Intranet Server di Dishub
82	Prowasdes	Aplikasi pengawasan Laporan Keuangan Desa	Kecamatan Kranggan	G2G	Colocation Server di Data Center
83	Aplikasi Ketenagakerjaan	Mengetahui Tingkat pengangguran penduduk	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
84	Aplikasi kartu AK-1 dan database pencari kerja	Pelayanan Kartu Pencari Kerja	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
85	Aplikasi pendaftaran dan peserta pelatihan	DB pendaftar dan peserta pelatihan	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
86	Bursa kerja online	Informasi lowongan kerja	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center

Ket : G2C=Government to Citizen, G2B=Government to Business, G2G=Government to Government, G2E=Government to employees

Jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung e-Government Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk meningkatkan performansi telah dibangun jaringan fiber optic (FO) yang menghubungkan seluruh OPD dan satuan kerja dalam Kota Kabupaten Temanggung. Selain



Gambar : 3.41 Pengembangan Toologi Jaringan Intranet (WLAN) Pemda Temanggung

jaringan FO, untuk interkoneksi internet/ intranet telah dibangun jaringan wireless terpadu sampai di Kecamatan, UPT, SMP dan Kantor Desa/Kelurahan dengan topologi jaringan sebagai berikut:

- ❖ Untuk mendukung pencapaian sasaran **“terwujudnya pengelolaan e-Government”** digunakan sumber daya keuangan sebesar Rp. 6.882.467.796,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.942.766.100,- atau sebesar 99 %.  
Jika dibandingkan capaian sasaran yang tercapai 100% dan realisasi keuangan yang terealisasi 99 % maka terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung dengan program sebagai berikut:
  - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
  - Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi
  - Program statistik daerah
- ❖ Dengan capaian kinerja yang telah mencapai 100 % di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya pengelolaan e-Government” telah tercapai.
- ❖ Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima Penghargaan “Sebagai Badan Publik Menuju Informatif Peringkat 8 Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018”



Gambar 3.42 Penyerahan Piagam Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018



### C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan dapat dilihat untuk total anggaran belanja urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, penunjang urusan pemerintahan, pendukung, urusan kesatuan bangsa dan politik, kewilayahan sebesar Rp1.782.086.882.170,00 yang terealisasi sebesar Rp1.669.762.317.594,00 atau 93,70%.

Berikut adalah data realisasi anggaran pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun 2018, yang dapat menggambarkan besarnya anggaran dan realisasi guna mewujudkan sasaran strategis RPJMD pada tahun 2018.

Tabel 3.55  
Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan  
Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kesejahteraan petani					
INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	560.000.000,00	515.515.684,00	92,06
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	7.020.414.470,00	6.908.539.139,00	98,41
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.512.630.000,00	4.755.128.243,00	86,26
		Program pemberdayaan petani	390.000.000,00	369.847.762,00	94,83
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	155.000.000,00	148.593.500,00	95,87
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>13.638.044.470</b>	<b>12.697.624.328</b>	<b>93,10</b>
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah					
2	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	330.000.000,00	316.196.584,00	95,82
3	Tingkat Ketersediaan protein per Kapita	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25.000.000,00	24.742.500,00	98,97
		Program pengembangan budidaya perikanan	1.626.347.000,00	1.588.068.270,00	97,65
		Program pengembangan perikanan tangkap	100.000.000,00	91.435.000,00	91,44
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	95.000.000,00	94.079.999,00	99,03
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	500.000.000,00	472.023.300,00	94,40
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	40.000.000,00	29.993.310,00	74,98
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	355.000.000,00	341.515.647,00	96,20
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.042.800.000,00	1.757.530.750,00	86,04
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi	15.000.000,00	13.555.000,00	90,37

		peternakan			
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	50.000.000,00	48.908.900,00	97,82
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>5.179.147.000</b>	<b>4.778.049.260</b>	<b>92,26</b>
<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Investasi Daerah</b>					
4	Meningkatnya laju investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	471.466.000,00	462.325.531,00	98,06
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	718.421.500,00	647.688.173,00	90,15
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>1.189.887.500</b>	<b>1.110.013.704</b>	<b>93,29</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah</b>					
5	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59.334.000,00	56.943.940,00	95,97
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20.000.000,00	17.831.000,00	89,16
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	54.484.000,00	48.988.580,00	89,91
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	458.013.000,00	389.129.375,00	84,96
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204.490.000,00	195.183.642,00	95,45
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198.060.000,00	193.187.000,00	97,54
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	42.995.000,00	22.019.500,00	51,21
		Program Pengelolaan Pasar Daerah	3.592.752.000,00	3.193.565.520,00	88,89
		Program Pembinaan Pedagang	20.000.000,00	15.042.838,00	75,21
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354.505.000,00	345.346.012,00	97,42
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	316.055.000,00	276.057.500,00	87,34
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>5.320.688.000</b>	<b>4.753.294.907</b>	<b>89,34</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>					
6	Tingkat kunjungan wisatawan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	340.237.000,00	308.279.652,00	90,61
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	791.372.500,00	740.455.299,00	93,57
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	197.312.000,00	196.122.500,00	99,40
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	284.465.000,00	248.118.800,00	87,22
		Program Pengembangan Kemitraan	569.120.000,00	565.060.320,00	99,29
		Program Pengembangan Produk Wisata	471.382.000,00	440.843.674,00	93,52
		Program Pengembangan Nilai Keagamaan	2.282.611.000,00	2.130.109.241,00	93,32
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>4.936.499.500</b>	<b>4.628.989.486</b>	<b>93,77</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 6 : Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>					
7	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	822.010.000,00	728.709.980,00	88,65
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221.546.000,00	204.048.268,00	92,10
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	204.255.000,00	182.606.666,00	89,40
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	106.300.000,00	103.450.650,00	97,32

	Rata-rata capaian sasaran		1.354.111.000	1.218.815.564	90,01
	INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu	Realisasi	%
<b>SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin</b>					
8	Menurunnya Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	350.135.500,00	341.272.879,00	97,47
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	418.160.500,00	369.252.984,00	88,30
		Program pembinaan anak terlantar	138.850.000,00	133.762.000,00	96,34
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	138.352.000,00	135.126.125,00	97,67
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.473.820.000,00	1.307.051.048,00	88,68
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	63.500.000,00	55.330.640,00	87,13
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	158.692.000,00	158.488.750,00	99,87
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.101.472.000,00	1.067.894.023,00	96,95
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70.805.000,00	63.478.000,00	89,65
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	428.119.000,00	408.357.040,00	95,38
		Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan	199.550.000,00	195.903.000,00	98,17
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	86.265.000,00	79.082.000,00	91,67
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	49.018.000,00	47.508.000,00	96,92
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	12.844.000,00	64,22
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	192.347.000,00	178.029.000,00	92,56
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	845.946.050,00	434.268.910,00	51,34
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	16.222.000,00	15.647.000,00	96,46
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	26.840.000,00	26.550.800,00	98,92
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>5.778.094.050</b>	<b>5.029.846.199</b>	<b>87,05</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 8 : Meningkatnya ketertiban dan keamanan</b>					
9	Angka Kriminalitas	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.099.500.000,00	1.069.678.207,00	97,29
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000,00	126.541.000,00	63,27
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50.000.000,00	49.110.000,00	98,22
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	760.143.000,00	647.381.565,00	85,17
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50.000.000,00	49.533.000,00	99,07
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	797.000.000,00	793.193.000,00	99,52
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	275.973.000,00	259.538.134,00	94,04
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	217.370.000,00	208.283.648,00	95,82
		Program pendidikan politik masyarakat	154.681.000,00	149.398.074,00	96,58

Rata-rata capaian sasaran		3.619.667.000,00	3.367.656.628,00	93,04	
INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu	Realisasi	%	
<b>SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>					
10	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55.975.363.000,00	51.728.899.574,00	92,41
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.959.864.248,00	2.902.935.365,00	98,08
		Program Pembangunan turap/talud/brojong	3.389.545.400,00	3.304.174.515,00	97,48
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.779.759.100,00	5.481.734.688,00	94,84
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.606.061.700,00	1.538.177.528,00	95,77
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11.541.973.825,00	10.185.937.887,00	88,25
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	198.629.400,00	194.459.200,00	97,90
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	217.225.200,00	193.565.145,00	89,11
		Pengembangan Prasarana Perkotaan	18.879.127.500,00	15.403.669.452,00	81,59
		Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	3.153.023.850,00	3.134.956.658,00	99,43
		Program Pemberdayaan jasa Konstruksi	43.262.840,00	28.937.585,00	66,89
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	402.808.450,00	329.500.030,00	81,80
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.997.119.440,00	4.672.226.883,00	93,50
		Program Pengembangan Perumahan	1.184.454.000,00	1.150.025.137,00	97,09
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.249.695.900,00	1.213.020.728,00	97,07
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8.200.000.000,00	8.169.209.827,00	99,62
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38.411.000,00	36.987.296,00	96,29
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	250.540.000,00	197.023.466,00	78,64
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.481.329.000,00	1.325.338.861,00	89,47
		Program peningkatan pelayanan angkutan	265.146.000,00	259.164.981,00	97,74
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.662.691.000,00	3.553.284.908,00	97,01		
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	6.010.070.000,00	991.124.407,00	16,49		
11	Persentase minimal bencana yang terselesaikan (%)	Program Pengembangan Data/Informasi	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349.903.000,00	304.980.950,00	87,16
		Program Tanggap Darurat dan Logistik	2.664.149.000,00	2.313.319.981,00	86,83
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2.033.320.450,00	1.800.516.850,00	88,55
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>136.540.403.303</b>	<b>120.420.101.902</b>	<b>88,19</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>					
12	Persentase taman/ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten dengan kriteria baik (%)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60.800.000,00	59.622.000,00	98,06
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.599.161.700,00	3.698.754.252,00	66,06
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.959.363.200,00	1.808.836.022,00	92,32
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	351.568.000,00	341.431.501,00	97,12
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	233.795.300,00	93,52
13	Persentase pelayanan sampah perkotaan (%)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	480.284.000,00	477.115.900,00	99,34

Rata-rata capaian sasaran		8.701.176.900	6.619.554.975	76,08	
INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu	Realisasi	%	
<b>SASARAN STRATEGIS 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan</b>					
14	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.125.000,00	62.587.000,00	97,60
		Program pendidikan anak usia dini	530.902.500,00	522.404.005,00	98,40
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82.720.320.701,00	76.823.885.024,00	92,87
		Program Pendidikan Non Formal	2.907.000.000,00	2.855.692.500,00	98,24
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.152.600.000,00	17.040.870.740,00	99,35
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	514.950.000,00	507.418.600,00	98,54
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	125.000.000,00	94.747.500,00	75,80
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	235.000.000,00	183.988.800,00	78,29
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	500.000.000,00	482.043.000,00	96,41
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	358.123.500,00	324.961.011,00	90,74
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	400.000.000,00	305.445.000,00	76,36
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		Program Pendidikan Non Formal	171.480.000,00	164.911.930,00	96,17
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21.440.000,00	18.405.000,00	85,84
15	Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	655.950.000,00	585.307.700,00	89,23
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	134.975.500,00	123.917.975,00	91,81
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115.519.000,00	99.853.500,00	86,44
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6.000.000,00	5.400.000,00	90,00
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>106.638.386.201</b>	<b>100.226.839.285</b>	<b>93,99</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 12: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>					
16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91.375.000,00	68.468.894,00	74,93
17	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.583.000,00	25.248.100,00	77,49
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.826.752.600,00	1.717.226.297,00	94,00
18	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63.473.259.824,00	51.009.748.815,00	80,36
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	149.732.200,00	132.982.100,00	88,81
19	Angka Harapan Hidup	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	75.000.000,00	74.990.000,00	99,99
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	192.673.500,00	184.090.882,00	95,55
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	576.097.000,00	528.494.100,00	91,74
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408.283.500,00	259.307.400,00	63,51
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12.088.144.000,00	11.892.819.409,00	98,38
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	251.612.600,00	248.154.500,00	98,63
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1.452.741.500,00	1.386.238.729,00	95,42
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	59.608.000,00	55.109.710,00	92,45		

	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>80.677.862.724</b>	<b>67.582.878.936</b>	<b>83,77</b>
	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 13 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga</b>					
20	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	154.860.000,00	151.406.340,00	97,8
21	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201.293.500,00	184.768.025,00	91,8
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Keluarga Berencana	7.530.805.800,00	5.936.141.097,00	78,8
		Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	473.876.500,00	468.246.000,00	98,8
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>8.360.835.800</b>	<b>6.740.561.462</b>	<b>80,6</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 14: Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu</b>					
23	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.000.000.000,00	4.999.941.600,00	100,0
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	20.719.000.000,00	20.673.939.976,00	99,8
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	118.290.721.574,00	103.738.106.249,00	87,7
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426.084.300,00	244.160.647,00	57,30
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	13.654.846.500,00	13.207.194.370,00	96,72
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	26.061.000,00	24.817.900,00	95,23
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	80.416.000,00	29.451.000,00	36,62
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23.335.000,00	21.215.000,00	90,91
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>158.220.464.374</b>	<b>142.938.826.742</b>	<b>90,34</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 15:Terwujudnya pengelolaan e-Government</b>					
24	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.756.964.000,00	1.747.288.618,00	99,4
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	118.230.000,00	115.859.944,00	98,0
		Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	4.417.852.100,00	4.374.957.854,00	99,0
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	649.720.000,00	644.361.380,00	99,2
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>6.942.766.100</b>	<b>6.882.467.796</b>	<b>99</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 16:Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah</b>					
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148.090.000,00	136.352.000,00	92,1
		Program perencanaan pembangunan daerah	752.448.300,00	682.655.142,00	90,7
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.104.757.500,00	11.515.224.873,00	81,6
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	429.522.000,00	404.438.700,00	94,2

INDIKATOR KINERJA		Program	Pagu	Realisasi	%
26	Nilai EKPPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74.101.000,00	60.351.233,00	81,4
		Program Pendidikan Kedinasan	705.597.000,00	705.571.700,00	100,0
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.193.492.400,00	923.349.195,00	77,4
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	683.974.900,00	641.407.911,00	93,8
		Program administrasi kepegawaian	206.251.500,00	187.695.518,00	91,0
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	43.465.000,00	36.095.000,00	83,0
		Program Kerjasama Daerah	24.000.000,00	22.860.000,00	95,3
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	52.000.000,00	52.000.000,00	100,0
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	43.000.000,00	41.800.000,00	97,2
		Program pendidikan politik masyarakat	99.415.500,00	99.415.500,00	100,0
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	43.250.000,00	42.644.000,00	98,6
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19.998.000,00	18.335.000,00	91,7
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	24.891.000,00	23.606.000,00	94,8
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.780.233.600,00	2.226.968.200,00	80,1
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	35.000.000,00	25.000.000,00	71,4
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.686.282.500,00	11.287.675.336,00	76,9
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	148.090.000,00	136.352.000,00	92,1
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100.000.000,00	99.691.150,00	99,7
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	185.000.000,00	179.222.700,00	96,9
		Program Kerjasama Daerah	45.000.000,00	44.975.000,00	99,9
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.222.287.600,00	1.937.885.050,00	87,2		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	239.598.500,00	235.171.600,00	98,2		
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>			<b>39.089.746.300</b>	<b>31.766.742.808</b>	<b>81,27</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 17 :Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
27	Opini Pemeriksaan BPK	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	871.645.000,00	822.200.752,00	94,3
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	231.000.000,00	227.492.589,00	98,5
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	248.000.000,00	236.816.698,00	95,5
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160.000.000,00	91.124.040,00	57,0
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.844.011.142,00	6.127.505.109,00	89,5
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000,00	190.540.100,00	95,3
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90.000.000,00	66.972.401,00	74,4



		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	61.594.900,00	57.524.150,00	93,4
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>8.706.251.042</b>	<b>7.820.175.839</b>	<b>90</b>
	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 18: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>					
28	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.025.451.000,00	2.689.535.720,00	88,9
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26.000.000,00	24.982.500,00	96,1
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	219.754.500,00	202.277.900,00	
29	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.206.605.650,00	6.788.596.577,00	94,2
	<b>Rata-rata capaian sasaran</b>		<b>10.477.811.150</b>	<b>9.705.392.697</b>	<b>92,63</b>

Keterangan: Sumber BPPKAD hasil an audit BPK



**REALISASI KEUANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

No.	URUSAN	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>1.121.025.810.381,0</b>	<b>1.049.342.824.901,0</b>	<b>93,61</b>
	PENDIDIKAN	514.237.306.695	497.696.795.763	96,78
	KESEHATAN	313.735.357.614	283.733.805.783	90,44
	LINGKUNGAN HIDUP	18.129.920.048	15.809.367.193	87,20
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	142.444.405.593	131.545.211.615	92,35
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.533.649.900	3.432.724.072	97,14
	SOSIAL	6.397.695.831	6.027.581.462	94,21
	TENAGA KERJA	7.910.832.062	7.461.745.733	94,32
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.847.288.133	5.625.825.725	96,21
	PANGAN	17.675.625.998	16.811.731.966	95,11
	PERTANAHAN	8.841.661.000	8.645.410.163	97,78
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.624.954.337	6.115.496.521	92,31
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.286.641.251	8.091.508.092	97,65
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.004.682.300	6.404.387.097	80,01
	PERHUBUNGAN	16.484.215.065	11.027.623.393	66,90
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.339.371.130	15.790.374.850	96,64
		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.898.754.515	10.352.652.053
PENANAMAN MODAL		4.603.395.901	4.304.715.889	93,51
STATISTIK		861.611.400	852.160.280	98,90
KEBUDAYAAN		6.086.564.567	5.775.380.754	94,89
PERPUSTAKAAN		3.797.382.541	3.582.562.022	94,34
KEARSIPAN		284.494.500	255.764.475	89,90
2	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>	<b>30.222.778.171</b>	<b>28.105.388.438</b>	<b>92,99</b>
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.355.699.701	7.156.098.872	97,29
	PARIWISATA	1.522.279.000	1.450.145.294	95,26
	PERTANIAN	16.140.844.470	14.889.127.935	92,25
	PERDAGANGAN	4.743.150.000	4.161.219.675	87,73
	PERINDUSTRIAN	354.505.000	345.346.012	97,42

	TRANSMIGRASI	106.300.000	103.450.650	97,32
3	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>486.865.660.810</b>	<b>457.289.665.391</b>	<b>93,93</b>
	PENGAWASAN	4.709.957.474	4.602.924.459	97,73
	PERENCANAAN	9.960.623.456	9.437.682.643	94,75
	KEUANGAN	463.230.975.948	434.914.256.696	93,89
	KEPEGAWAIAN	7.288.034.932	6.698.489.105	91,91
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.676.069.000	1.636.312.488	97,63
4	<b>PENDUKUNG</b>	<b>129.564.053.797</b>	<b>121.537.939.813</b>	<b>93,81</b>
	PENDUKUNG KEPALA DAERAH	37.770.095.386	34.969.789.283	92,59
	PENDUKUNG DPRD	38.592.498.274	34.907.915.041	90,45
	PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA	1.476.032.849	1.415.310.832	95,89
	KEWILAYAHAN	51.725.427.288	50.244.924.657	97,14
5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14.408.579.011</b>	<b>13.486.499.051</b>	<b>93,60</b>
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.884.988.120	4.791.157.414	98,08
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.523.590.891	8.695.341.637	91,30
<b>JUMLAH</b>		<b>1.782.086.882.170</b>	<b>1.669.762.317.594</b>	<b>93,70</b>

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Secara umum, pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas misi dan sasaran-sasaran strategisnya. Dari 6 Misi, 2 Misi telah tercapai 100% (memuaskan), sedangkan 4 misi tercapai antara 89% sampai dengan 99% (sangat baik). Adapun sasaran yang berjumlah 18 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung tahun 2018 sebagian besar telah direalisasikan dengan rata-rata **95,32 %** atau dengan kategori "**sangat baik**".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 sasaran dapat disimpulkan bahwa 10 sasaran tercapai 100% dengan predikat "memuaskan", 6 sasaran tercapai dengan predikat "sangat baik", 1 sasaran tercapai dengan baik, dan 1 sasaran dengan capaian kurang. Dari 18 sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 29 indikator kinerja dengan capaian 12 indikator kinerja atau 41 % dengan kategori memuaskan, 13 indikator kinerja atau 44 % dengan capaian sangat baik, 3 indikator kinerja atau 10 % dengan kategori baik, dan 3 % dengan indikator kurang.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 605.371.842.414,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 538.287.832.518,- atau 88.92 % ( un audit per tanggal 1 Maret 2018 ).

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang.

Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 resiko kegagalanya dapat diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Bappeda telah melakukan review RPJMD di tahun 2016 (Perbup No 69 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD 2013-2018) yang selanjutnya dilanjutkan dengan review Renstra Perangkat Daerah.
2. Perubahan Perbup IKU bupati (IKU Bupati lebih makro)
3. Perjanjian kinerja dilakukan di depan Bupati secara langsung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja di masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan eselon terendah.
4. Capaian kinerja menjadi tanggungjawab semua perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang mendukung visi dan misi bupati
5. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Monitoring dan evaluasi renja Perangkat Daerah setiap 3 bulan oleh BAPPEDA

6. Monitoring dan evaluasi RKPK yang diinput setiap bulan dan dievaluasi setiap 4 bulan sekali oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Realisasi keuangan setiap bulan dengan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari pembuatan RKA/DPA, pembukuan keuangan, maupun barang oleh BPPKAD
8. Kementrian PAN dan RB telah mengeluarkan validasi kelas jabatan bagi seluruh pegawai di ngkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah digunakan dalam pemberian TPP
9. Pegawai telah mendokumentasikan pekerjaannya setiap hari pada e-kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan pegawai

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, khususnya tahun 2018 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.